



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS SEKOLAH PADA SD FRANCISCO YASHINTA
DAN SD NUR ISLAM DI KABUPATEN NUNUKAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
(KASUS SEKOLAH ANAK TKI DI DAERAH PERBATASAN)**

TESIS

**K A T M A N
0806441352**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
JUNI 2010**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS SEKOLAH PADA SD FRANCISCO YASHINTA
DAN SD NUR ISLAM DI KABUPATEN NUNUKAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR
(KASUS SEKOLAH ANAK TKI DI DAERAH PERBATASAN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**K A T M A N
0806441352**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
JUNI 2010**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : K a t m a n

NPM : 0806441352

Tanda Tangan :

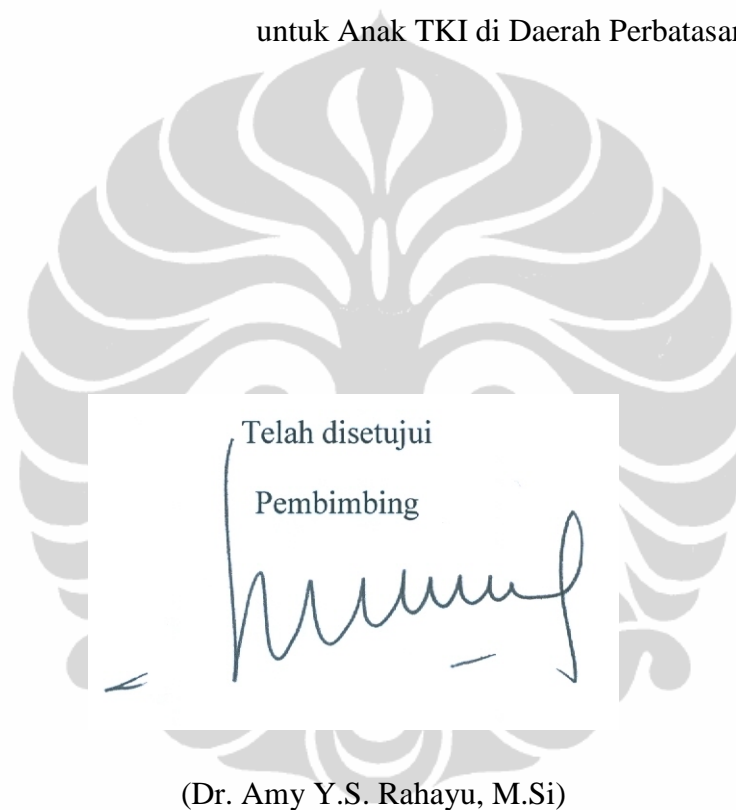


Tanggal : Juni 2010

Universitas Indonesia

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : K a t m a n
NPM : 0806441352
JUDUL TESIS : Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta
dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan
Propinsi Kalimantan Timur (Kasus Sekolah
untuk Anak TKI di Daerah Perbatasan)




HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Nama : K a t m a n
NPM : 0806441352
Judul : Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Kasus Sekolah untuk Anak TKI di Daerah Perbatasan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tafsir Nurchamid, AK. M.Si ()

Pembimbing : Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si ()

Penguji : Dr. Unifah Rosyidi ()

Sekretaris Sidang : Lina Miftahul Jannah, M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Juni 2010

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Kasus Sekolah untuk Anak TKI di Daerah Perbatasan). Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Indonesia.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perbaikan kebijakan bidang pendidikan di daerah perbatasan, dan pulau terluar lainnya dalam meningkatkan daya tampung dan mutu sekolah terutama kepada anak usia sekolah yang perlu perhatian khusus.

Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik ketika masa perkuliahan, saat penelitian lapangan, sampai pada penyusunan tesis ini, tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh diri sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc. Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Eko Prasajo.Mag.rer.publ, selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Dr. Amy Y.S.Rahayu, M.Si yang telah membuka wawasan penulis dengan penuh perhatian memberikan bimbingan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
5. Pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kabupten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

Universitas Indonesia

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya dengan hormat tesis ini Penulis sajikan dan berharap agar dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi Penulis sendiri.

Depok, Juni 2010

Penulis,



K a t m a n

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K a t m a n

NPM : 0806441352

Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Kasus Sekolah untuk Anak TKI di Daerah Perbatasan)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: Juni 2010

Yang menyatakan



(K a t m a n)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : K a t m a n
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Judul : Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Kasus Sekolah untuk Anak TKI di Daerah Perbatasan)

Penelitian tentang efektivitas sekolah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas organisasi pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam sebagai sekolah yang menampung pendidikan untuk anak TKI di daerah perbatasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Fransico Yashinta memenuhi empat dari delapan faktor yang diteliti. Keempat faktor tersebut adalah (1) Perencanaan program sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi SD Fransisco Yashinta; (2) Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (3) Tenaga pendidik memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan menyusun kelengkapan administrasi dalam pembelajaran; (4) Budaya dan lingkungan. Perolehan input berupa visi, misi, program kerja, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana telah didukung oleh proses budaya positif yang dibangun sehingga keluaran berupa prestasi akademik yang diukur berdasarkan tingkat ketuntasan belajar mencapai 80%.

SD Nur Islam memenuhi satu dari delapan faktor yang diamati yaitu partisipasi masyarakat dalam membantu pendanaan dan kebutuhan konsumsi santri. Implementasi terhadap tujuh faktor lainnya masih perlu peningkatan dan dukungan dari lembaga terkait lainnya. Perolehan input lemah sehingga keluaran berupa prestasi akademik yang diukur dari tingkat ketuntasan belajar hanya mencapai 20%.

Untuk meningkatkan efektivitas sekolah pada kedua lembaga tersebut perlu adanya pembinaan dan mediasi dari Dinas Pendidikan juga lembaga lainnya.

Kata Kunci : visi, misi, kurikulum, sarana prasarana, manajemen, prestasi akademik

ABSTRACT

Name : *K a t m a n*
Study Program : *Special Aspects of Administration and Education Policy*
Title : *School Effectiveness of the SD Francisco Yashinta and SD Nur Islam in Nunukan Regency, East Kalimantan Province*

The Research on the school effectiveness uses a qualitative approach and aims to analyze organizational effectiveness at the SD Francisco Yashinta and SD Nur Islam as the schools that accommodate TKI children education in the border area.

Results showed that SD Francisco Yashinta meets four of the eight factors studied. These four factors are; (1) Program planning as a tool to achieve the SD Francisco Yashinta's vision and mission; (2) Implementation unit level education curriculum (KTSP); (3) Teachers meet the requirements of academic qualifications and arrange paperwork in the learning; (4) Culture and Environment.

Obtaining inputs in the form of vision, mission, programs, curricula, teaching staff, facilities and infrastructure has been supported by the positive culture that was built so that the output of academic achievement as measured from the mastery learning levels reached 80%.

SD Nur Islam meets one of the eight factors measured were community participation in assisting the financing and consumption needs of students. Implementation of the seven other factors still need improvement and support from other relevant agencies. Obtaining inputs are so weak that output in the form of academic achievement as measured from the level of mastery learning only reached 20%.

To improve the effectiveness of school at both institutions need guidance and mediation from the Education Department and other institutions.

Keywords : vision, mission, curricula, infrastructure, management, academic achievement

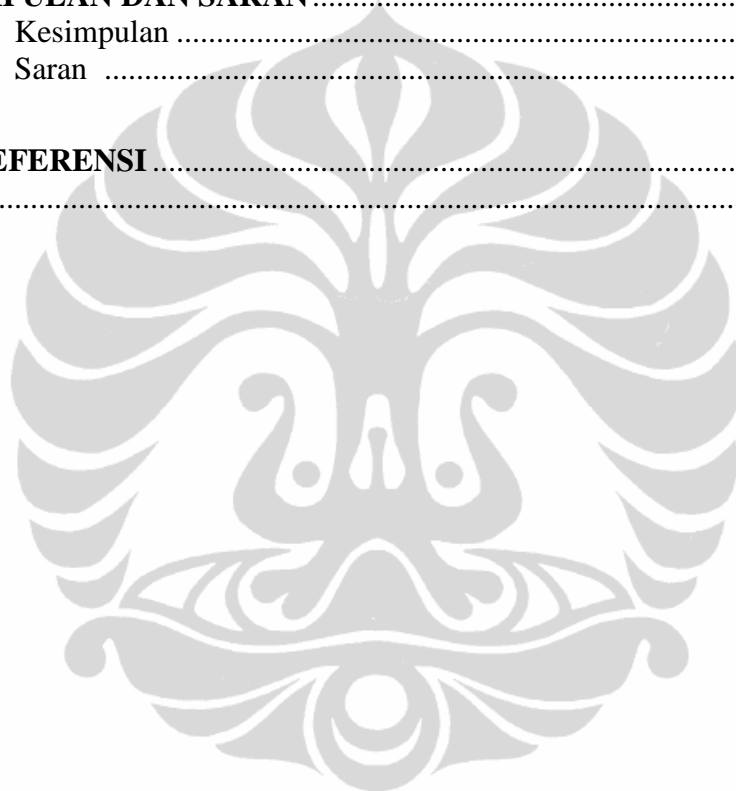
DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tujuan Pendidikan	11
2.2 Efektifitas Organisasi Pendidikan	17
2.2.1 Sekolah Efektif	18
2.2.2 Perspektif Fungsi Pendidikan	26
2.2.3 Konsep McBeath & Mortier	29
2.3. Definisi Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	34
2.4. Mediasi Interorganisasional	39
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Data Penelitian	43
3.3 Seting Penelitian	59
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	59
3.5 Instrumen Penelitian.....	60
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	60
3.7 Pembatasan dan Keterbatasan Penelitian	61

Universitas Indonesia

BAB 4	GAMBARAN UMUM	64
4.1	Profil Kabupaten Nunukan.....	64
4.2	Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan	68
4.3	Profil SD Fransisco Yashinta.....	72
4.4	Profil SD Nur Islam	76
BAB 5	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
5.1	Analisis Efektivitas SD Fransisco Yashinta.....	83
5.2	Analisis Efektivitas SD Nur Islam	99
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	108
6.1.	Kesimpulan	109
6.2.	Saran	109
	DAFTAR REFERENSI	110
	LAMPIRAN	115



DAFTAR GAMBAR

4.1. Peta Orientasi Kabupaten Nunukan65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Peta Sebaran Anak TKI di Sabah, Malaysia.....	3
Tabel 1.2. Jumlah Pelintas Batas Warga Negara Indonesia tahun 2006 -2007.....	4
Tabel 1.3. Perkembangan Jumlah Siswa Anak TKI	5
Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam	45
Tabel 4.1. Sarana Pendidikan tahun 2006-2007	69
Tabel 4.2. Jumlah Guru di Kabupaten Nunukan tahun 2007-2009	70
Tabel 4.3. Jumlah Siswa di Kabupaten Nunukan	70
Tabel 4.4. Capaian Angka Partisipasi Kasar tahun 2006 – 2009	71
Tabel 4.5. Penghuni Asrama SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam	72
Tabel 4.6. Perkembangan jumlah murid SD Fransisco Yashinta tahun 2001-2010	74
Tabel 4.7. Ketersediaan sarana dan prasarana	75
Tabel 4.8. Keadaan Guru SD Fransisco Yashinta tahun 2009/2010	76
Tabel 4.9. Perkembangan jumlah murid SD Nur Islam 2002/2010.....	78
Tabel 4.10 Ketersediaan sarana dan prasarana	80
Tabel 4.11 Keadaan Guru SD Nur Islam tahun 2009/2010	81
Tabel 5.1. Struktur Kurikulum menurut kelompok Mata Pelajaran di SD Fransisco Yashinta.....	86
Tabel 5.2. Rekapitulasi jumlah tenaga pendidik di SD Fransisco Yashinta.....	90
Tabel 5.3. Keterpenuhan parameter kesejahteraan guru di SD Fransisco Yashinta.....	91
Tabel 5.4. Sumber dana SD Fransisco Yashinta	95
Tabel 5.5. Struktur Kurikulum SD Nur Islam	99
Tabel 5.6. Rekapitulasi jumlah tenaga pendidik SD Nur Islam	101
Tabel 5.7. Keterpenuhan kesejahteraan guru di SD Nur Islam	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Mendalam	115
Lampiran II Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah	116
Lampiran III Transkrip Wawancara dengan Pejabat Dinas Pendidikan	132
Lampiran IV Transkrip Wawancara dengan siswa	140
Lampiran V Transkrip Wawancara dengan Guru	148
Lampiran VI Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	167



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada Bab satu penelitian ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Kondisi tentang sekolah untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya di tulis anak TKI adalah merupakan persoalan yang akan diungkap dalam bab ini dan dibahas dalam bab berikutnya.

1.1. Latar Belakang

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara lain adalah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah tersebut merupakan daerah lintas batas yang dimanfaatkan oleh para migran pencari kerja dari wilayah Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di Negara Bagian Sabah Malaysia. Sebagian pencari kerja menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai tempat transit sebelum menuju ke Malaysia. Kehadiran pendatang calon pekerja migran tersebut menuntut konsekuensi yang perlu perhatian serius. Jumlah pekerja migran yang legal maupun ilegal terus meningkat. Pada kasus tertentu masyarakat di kabupaten Nunukan merasakan dampak langsung dari kondisi tersebut. Tenaga kerja Indonesia ilegal yang tertangkap oleh polisi Malaysia dideportasi ke wilayah Nunukan. Demikian pula dengan tenaga kerja Indonesia yang telah memiliki keturunan, mereka menitipkan anaknya kepada sanak saudara ataupun kepada lembaga yang menampung anak-anak TKI untuk dapat bersekolah.

Salah satu fenomena akibat derasnya peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang menetap di Sabah, akumulasi jumlah anak usia sekolah khususnya pendidikan dasar yang tidak mendapat pelayanan pendidikan juga meningkat. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya partisipasi orang tua dalam membiayai sekolah anaknya. Kebutuhan di luar biaya operasional sekolah yang harus ditanggung oleh siswa mestinya menjadi tanggungjawab orang tua. Sekolah yang merupakan salah satu tempat pelayanan publik belum dapat menjangkau anak-anak yang berstatus sebagai anak tenaga kerja Indonesia. Pelayanan pendidikan bagi anak TKI saat ini dilakukan di kamp-kamp konsentrasi WNI di areal perkebunan di Sabah.

Sekolah merupakan suatu pusat pengembangan budaya dan tempat untuk menumbuhkan rasa patriotisme, fenomena dinamis di wilayah perbatasan dapat dijadikan sebagai peluang yang sangat baik dalam upaya memberikan kesempatan pendidikan bagi semua. Selanjutnya efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI oleh lembaga pendidikan keagamaan tampaknya perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, agar pemerintah memiliki kebijakan solutif yang komprehensif dalam bidang pendidikan terkait dengan heterogenitas kultur di wilayah tersebut sangat penting untuk melihat secara menyeluruh kebijakan yang ada dan aspek sosiologis masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Indikasi bahwa pemanfaatan TKI oleh perusahaan perkebunan di Malaysia akan terus berlanjut sangat jelas. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas mengenai isu TKI yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan tentang pemberian layanan pendidikan untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia dan keluarganya yang tinggal di Malaysia. Hasil kesepakatan tersebut diwujudkan melalui berdirinya pusat pembelajaran non formal yang difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat, Humana. Hal itu menunjukkan bahwa kedua Negara masih saling membutuhkan dalam hal berlangsungnya pemanfaatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Upaya sistematis tersebut akan meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan atau perusahaan Malaysia.

Jumlah tenaga kerja Indonesia yang paling banyak menimbulkan dampak langsung ke wilayah perbatasan RI – Malaysia adalah mereka yang bekerja di Serawak dan Sabah. Kebanyakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan – perkebunan memiliki keluarga dan anak keturunan. Ada dua kemungkinan dilakukan oleh orang tua. Pertama, mereka membiarkan anak-anak mereka berada diperkebunan tanpa pendidikan yang layak. Kedua, mengirimkan dan menitipkan anaknya di Kabupaten Perbatasan di Nunukan bagi mereka yang bekerja di Sabah.

Menurut hasil Studi Pengembangan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, bahwa jumlah TKI di Sabah tahun 2008 sebanyak 200.000 jiwa. Mereka umumnya berstatus sebagai pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang cukup. Sebanyak 2,7 juta TKI berpendidikan sekolah dasar. Sementara itu UU no 39 tahun 2005 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan minimal SMP

atau pendidikan setara. Menurut informasi dari *East Malaysian Planters Association (EMPA)* terdapat lebih dari 35.000 anak usia sekolah yang tersebar mengikuti tempat orang tua mereka bekerja. Menurut catatan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Kinabalu, tahun 2007 sebanyak 24.119 anak usia sekolah berada di Sabah. Dari jumlah tersebut 6.175 anak mendapatkan layanan pendidikan dari sebuah LSM di Sabah. Dengan demikian 18.000 lebih anak belum mendapatkan layanan pendidikan.

Tabel 1.1. Peta Sebaran Anak TKI di Sabah, Malaysia

No	Daerah	Jumlah Anak
1	Sandakan	7.976
2	Lahad Datu	8.233
3	Tawau, Kunak, Sempurna	3.000
4	Keningau	3.000
5	Beaufort dan Sipitang	500
6	Kudat, Pitas, da Kota Marudu	150
7	Kota Kinabalu	700
8	Ranau dan Kundasang	300
9	Labuan	350
	JUMLAH	24.199

Sumber: KJRI Kota Kinabalu 2008

Letak Geografis Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan, mempermudah hubungan lintas wilayah dengan luar negeri, baik untuk transit, migrasi maupun lintas batas, khususnya dengan Malaysia. Hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia turut mempengaruhi jumlah pelintas batas antar kedua Negara.

Pada tahun 2007 jumlah pelintas batas warga Negara Indonesia yang datang sebesar 166.038 orang, sedangkan yang berangkat ke Malaysia sebanyak 232.460 orang. Jumlah pelintas batas warga Negara Indonesia jauh lebih banyak dari pada jumlah pelintas batas warga Negara Malaysia. Jumlah pelintas batas warga Negara Malaysia yang datang ke Indonesia hanya 6.109, jumlah tersebut mengalami kenaikan 59,13% dibanding tahun 2006.

Tabel 1.2. Jumlah pelintas batas warga Negara Indonesia tahun 2006 - 2007

Bulan	Datang		Berangkat	
	2006	2007	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	4.390	6.945	2.530	10.672
Pebruari	3663	6016	2406	9849
Maret	3780	27464	3096	15319
April	3869	17049	2809	28142
Mei	13859	14244	12832	25871
Juni	5717	10022	3443	16332
Juli	6416	15760	3371	23293
Agustus	3780	12374	3096	24155
September	7740	12784	2702	24597
Oktober	7882	18255	3635	25440
Nopember	7156	8825	3503	9440
Desember	7331	16300	4144	19350
Jumlah	<u>75.583</u>	<u>166.038</u>	<u>47.567</u>	<u>232.460</u>

Kantor Imigrasi Nunukan 2008

Layanan pendidikan bagi anak-anak TKI merupakan implementasi dari undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemberian pendidikan khusus dan layanan khusus bagi anak Indonesia di luar negeri, maupun daerah terpencil atau terbelakang menjadi tugas pemerintah. Pelayanan pendidikan bagi anak TKI di Kabupaten Nunukan dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal. Dua lembaga yang saat ini menangani anak TKI adalah SD Islam Terpadu Nur Islam dan SD Katholik Fransisco Yashinta. Keduanya menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal. Jumlah anak TKI di Kabupaten Nunukan yang tertampung pada pendidikan formal pada tahun ajaran 2008/09 sebanyak 1.871 orang, tersebar di 42 sekolah. 33 SD, 6 SMP dan 3 SMA.

Jika dibandingkan dengan anak TKI yang tidak mendapat layanan pendidikan di Sabah sebanyak 24.199 anak (2007) maka yang bisa tertampung di Nunukan saat ini hanya 7,7%. Masih ada 92,3% anak TKI yang perlu mendapat pelayanan pendidikan.

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan, mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya, hal itu karena dalam MoU penempatan TKI di Malaysia tahun 2004 disebutkan bahwa TKI tidak dibenarkan membawa keluarga dan menikah dengan rakyat Malaysia selama bekerja. Ketentuan tersebut dijadikan salah satu dasar oleh Kerajaan Malaysia untuk tidak mengakui keberadaan anak-anak TKI yang lahir di Sabah maupun yang mengikuti orang tuanya dari Indonesia. Karena itulah anak-anak TKI tidak diperbolehkan untuk bersekolah di Sekolah Kebangsaan Malaysia.

Hasil studi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional pada Mei 2006, terungkap bahwa orang tua memiliki keinginan untuk menyekolahkan anaknya (usia SMP) di sekolah-sekolah Indonesia di perbatasan, dengan syarat sekolah tersebut menyediakan asrama bagi putra putri mereka. Keinginan ini pantas untuk segera direspons, mengingat jumlah anak Indonesia usia sekolah yang tidak bersekolah saat ini cukup besar dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Program yang terkait dengan permasalahan ini adalah mendirikan sekolah berasrama (khususnya SMP) di perbatasan. Untuk itu, maka perlu dilakukan studi penjajagan ke daerah perbatasan (seperti Kabupaten Nunukan) untuk memperoleh data pendukung agar dalam pelaksanaan penanganan anak-anak TKI di Malaysia sesuai program dan tepat sasaran.

Menurut Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2005, tujuan pembangunan wilayah perbatasan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009, adalah:

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan Nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pada era desentralisasi, peranan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sudah mulai berkurang. Namun demikian selain membuat kebijakan berupa UU Sisdiknas no 20/2003, Departemen Pendidikan Nasional juga melakukan intervensi langsung untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak TKI. Intervensi tersebut berupa pemberian beasiswa kepada anak-anak TKI di Kabupaten Nunukan dengan besaran yang berbeda setiap tahunnya.

Tabel 1.3. Perkembangan jumlah siswa anak TKI

Tahun	Jumlah			
	Sekolah	Siswa Seluruhnya	Siswa Anak TKI Nunukan	Anak TKI di Sabah
2007	222	29.153	1.038	24.119
2008	232	31.865	1.138	38.000
2009	232	35.301	1.871	40.000

Sumber: Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu: 2009

Terkait dengan besarnya jumlah anak TKI Sabah yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan,

“setelah kita pelajari berbagai alternatif yang paling masuk akal, menyediakan pelayanan pendidikan di Nunukan dan Sebatik”. (*Spirit Media Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus, edisi 23 tahun III Oktober 2008 halaman 03*).

Petrus Kanisus, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, mengatakan bahwa penanganan anak-anak TKI di Malaysia itu harus segera terwujud, karena jumlahnya sangat banyak dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ada dua tempat di perbatasan Malaysia yang strategis untuk menampung anak-anak TKI tersebut, yaitu Nunukan dan Krayan. Para TKI yang bekerja di Malaysia secara periodik pergi ke Nunukan untuk menguruskan pasport dan dokumen penting lainnya. Rata-rata setiap harinya 300 orang TKI datang ke Nunukan. Dengan aktivitas seperti itu, Nunukan menjadi daerah penting bagi penanganan TKI beserta keluarganya.

Menurut kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, dalam penanganan anak-anak TKI ini, terungkap ada dua pertanyaan mendasar yang perlu dipikirkan, yaitu:

- Apakah pemerintah Malaysia itu menginginkan agar pemerintah RI menangani sendiri pendidikan anak-anak TKI atau
- Malaysia sebenarnya tidak menginginkan anak-anak TKI belajar di Malaysia.

(Dikdasmen: 2006)

Kondisi pendidikan anak TKI sebagai hasil laporan kunjungan Tim Ditjen Mandikdasmen pada bulan Mei 2006 yang melakukan observasi terhadap sekolah yang dikelola oleh Yayasan Gabirel Manek dan Yayasan Hidayatullah.

Hasil wawancara dengan beberapa anak TKI memperlihatkan bahwa umumnya orang tua lepas, bahkan setelah masuk asrama mereka tidak lagi menengok anaknya. Seorang anak beumur 8 tahun menceritakan bahwa ia lahir di Sabah, orang tua di Kota Kinabalu, memiliki kakak 2 orang (satu sekolah di pesantren, satu lagi tidak sekolah). Untuk anak-anak TKI yang tinggal di Asrama disediakan makan siang khusus setiap hari Jumat dari donatur tertentu.

Secara umum, efektivitas pelayanan pendidikan di suatu sekolah mengacu kepada karakteristik sekolah efektif yang mencakup kejelasan visi dan misi sekolah, ketersediaan sarana prasarana belajar, tenaga pendidik yang professional, lingkungan belajar yang kondusif, pendanaan dan manajemen yang kuat, adanya partisipasi masyarakat, dan pengawasan.

1.2. Pokok Permasalahan

Terkait dengan latar belakang yang diungkapkan di atas, terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana Efektivitas sekolah untuk anak TKI di daerah perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan?
- 1.2.2. Bagaimana mediasi lembaga lain terhadap penyelenggaraan sekolah untuk anak TKI di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

- 1.3.1. Menganalisis Efektivitas sekolah untuk anak TKI di daerah perbaatsan Negara di Kabupaten Nunukan.
- 1.3.2. Menganalisis mediasi lembaga terhadap penyelenggaraan sekolah untuk anak TKI di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan akademik peneliti dalam memahami permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak TKI khususnya dan pendidikan di daerah perbatasan Negara pada umumnya.
- 1.4.2. Memberikan bahan informasi bagi lembaga yang menjadi subjek penelitian tentang berbagai hal yang terkait dengan Efektivitas pengelolaan lembaganya sebagai bahan umpan balik dalam mengantisipasi keberlanjutan program pelayanan pendidikan yang diberikan.
- 1.4.3. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang peran penting lembaga pendidikan di perbatasan Negara dalam turut serta mencerdaskan masyarakat khususnya anak-anak TKI, sehingga dapat memberikan arah dalam menyusun kebijakan bidang pendidikan di daerah perbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari enam Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan keterbatasan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang definisi anak TKI dan kebijakan pendidikan yang meliputi landasan teori tentang Efektivitas sekolah, tujuan pendidikan, efektivitas sekolah, anak TKI, mediasi lembaga lain terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, tipe penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB 4: GAMBARAN UMUM

Bagian ini mendeskripsikan tentang Kondisi Umum Kabupaten Nunukan, profile pendidikan Kabupaten Nunukan, Gambaran Umum tentang SD Katholik Fransisco Yashinta dan SDIT Nur Islam di Kabupaten Nunukan, dan Gambaran umum tentang pelayanan pendidikan untuk anak TKI.

BAB 5: PEMBAHASAN DAN ANALISIS EFEKTIVITAS SEKOLAH UNTUK ANAK TKI

Dalam Bab ini dianalisis tentang efektivitas sekolah bagi anak TKI, dengan mengacu pada teori pendidikan yang diturunkan dari teori Delors, teori efektivitas sekolah, dan teori mediasi oleh Wayne Parsons, serta parameter lain berupa kebijakan pemerintah.

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan analisis dari bab-bab sebelumnya, dan saran bagi sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah yang lebih baik, dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk anak TKI.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang konsep tujuan pendidikan, definisi anak TKI dan kebijakan pendidikan yang meliputi landasan teori tentang efektivitas sekolah, dan mediasi lembaga lain terhadap penyelenggaraan sekolah untuk anak TKI. Kajian teori tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menganalisis hasil-hasil yang diperoleh.

2.1. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggungjawab. (UU Sisdiknas: 2003; ps. 3). Tujuan pendidikan tersebut selaras dengan pendapat Delors tentang empat pilar pendidikan yang dipublikasikan oleh UNESCO. Keempat pilar yang merupakan tujuan pengembangan melinium (MDGs) di bidang pendidikan tersebut adalah *learn to know, learn to do, learn to be dan to live together* (Delors, 1990). Delor menyatakan bahwa seseorang diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai pengetahuan dan fenomena, memiliki keterampilan berbuat sesuatu atau cekatan, sigap, dan kreatif, memahami dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dengan segala konsekuensi melalui pendidikan.

Pemahaman tentang tujuan pendidikan tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan internasional. Dengan demikian penetapan tujuan suatu lembaga pendidikan hendaknya dapat mengakomodir keempat pilar pendidikan tersebut sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat berfungsi sebagai moderasi keseimbangan baik lokal, nasional maupun internasional.

Penetapan tujuan lembaga pendidikan yang jelas akan menentukan pula kejelasan fungsi lembaga pendidikan tersebut, sehingga pencapaian tujuan terukur. Konsep empat pilar Delors merupakan garis besar tujuan pendidikan dan

Learning to know, adalah jenis belajar yang memperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan terstruktur dan penguasaan alat-alat pembelajaran. Pembelajaran ini

memberikan pemahaman kepada anak didik tentang hakekat dirinya sebagai manusia. Selain memahami diri sendiri, manusia diharapkan belajar untuk memahami alam sekitarnya. Dengan demikian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk yang bermartabat, dan mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain.

Manusia dapat mencapai tujuan tersebut jika didukung oleh rasa senang yang diperolehnya dari pemahaman, pengetahuan dan penemuan tentang hal baru. Kesenangan untuk menemukan hal baru sering dilakukan oleh para peneliti. Sekolah sebagai agen pembaharuan dapat menjadikan pembelajaran sebagai suatu cara memperluas cakrawala untuk mengembangkan hal-hal baru yang menarik. Semakin luas ilmu pengetahuan seseorang semakin baik pula pemahamannya terhadap lingkungannya. Cara belajar tersebut dapat merangsang berkembangnya intelektual peserta didik sehingga mendorong tumbuhnya rasa ingin tahu yang lebih besar, daya kritis yang lebih tajam dan mengembangkan kemandirian dalam merespon perubahan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, semua anak, dimanapun mereka tinggal, harus mendapat pendidikan dan menjadi ilmu pengetahuan sebagai teman hidup secara berkelanjutan.

Pada tingkat pendidikan dasar, kurikulum dirancang untuk penguasaan disiplin ilmu yang dapat digunakan sebagai alat, sumber ide dan metode referensi yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan mutakhir dan paradigma kontemporer. Seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan akan menghadapi kendala untuk bekerja dengan orang.

Learning to know menyiratkan belajar tentang bagaimana cara belajar dengan mengembangkan satu konsentrasi, keterampilan memori dan kemampuan untuk berpikir kritis. Proses meningkatkan kemampuan berkonsentrasi dapat dilaksanakan melalui berbagai cara sesuai dengan kesempatan belajar yang tersedia di masyarakat.

Pengembangan keterampilan memori (*memory skill*) merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk mengantisipasi dominasi arus informasi yang sifatnya instan. Sebagaimana orang beranggapan bahwa mengasah keterampilan memori sebagai tindakan sia-sia. Menurut Delors kemampuan memori manusia dapat mengungguli komputer manakala berhadapan dengan fakta-fakta yang satu sama lain terdapat kemiripan. Lebih lanjut Delors mengatakan pentingnya latihan-latihan (*drill*) yang dapat merangsang perkembangan memori anak sekalipun cara belajar tersebut merupakan pola

pembelajaran tradisional dan dianggap membosankan. Namun demikian, pekerjaan yang dilakukan tidak secara rutin, dapat mengembangkan keterampilan memori melalui latihan memecahkan masalah yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

Learning to do, pada masa industralisasi pendidikan keterampilan sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, namun pada abad otomatisasi model pendidikan tersebut banyak ditinggalkan. Hal itu bermakna bahwa kebutuhan akan tenaga kerja terampil digantikan pekerjaan mesin yang serba otomatis. Pada akhirnya "*Learning to do*" tidak lagi berorientasi pada pelatihan tugas fisik tetapi menekankan pada kompetensi personal.

Terjadi pergeseran orientasi dari keterampilan teknik yang dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat menjadi kompetensi personal. Pada dunia industri manufaktur, pengetahuan dan informasi merupakan dua hal yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Kecanggihan mesin produksi pada industri memerlukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan intelektual.

Akibat kompleksitas pertumbuhan ekonomi maka layanan swasta berkembang pesat termasuk sektor publik seperti pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Organisasi masa depan akan dipengaruhi oleh teknologi tinggi yang keberhasilannya ditentukan pula oleh terbangunnya komunikasi dan informasi. Pendidikan menuntun manusia agar siap untuk berinovasi.

Setiap negara menyadari pentingnya kelompok-kelompok kecil, jaringan dan kemitraan menyoroti kemungkinan bahwa kemampuan interpersonal yang sangat baik akan menjadi pekerjaan penting persyaratan dari sekarang. Terlebih lagi, pola-pola kerja baru, baik dalam industri maupun di sektor jasa, akan memanggil untuk aplikasi intensif informasi, pengetahuan dan kreativitas. Semua hal-hal yang dipertimbangkan, bentuk-bentuk baru kompetensi pribadi didasarkan pada tubuh pengetahuan teoretis dan praktis yang dikombinasikan dengan dinamika pribadi dan pemecahan masalah yang baik, pengambilan keputusan, inovatif dan keterampilan tim.

Learning to be, prinsip fundamental *learn to be* adalah bahwa pendidikan harus memberikan kontribusi kepada setiap individu. Pendidikan untuk semua harus mampu mengembangkan independensi peserta didik. Salah satu asumsi *learning to be* bertujuan membangun manusia seutuhnya sehingga terpenuhi kekayaan kepribadiannya, kompleksitas ekspresi, komitmen sebagai individu, anggota keluarga dan masyarakat, maupun sebagai warga dan produser.

Pembangunan manusia ini, yang dimulai saat lahir dan berlanjut sepanjang hidup seseorang adalah sebuah proses dialektika yang didasarkan pada pengetahuan diri dan hubungan dengan orang lain. Ini juga mensyaratkan pengalaman pribadi yang sukses. Sebagai sarana pelatihan kepribadian, pendidikan harus menjadi proses yang sangat individual dan pada saat yang sama interaktif terhadap pengalaman sosial.

Hal lain yang melatarbelakangi *learning to be* adalah kekhawatiran akan dehumanisasi dunia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Sehingga pendidikan diharapkan memberikan bekal kepada anak didiknya untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menjadi manusia yang bertanggung jawab.

Tugas pokok pendidikan adalah untuk memastikan manusia menikmati kebebasan berpikir, penilaian, perasaan, dan berimajinasi dalam mengembangkan bakat mereka dan menjaga hidup mereka. Dalam dunia yang sangat tidak stabil di mana salah satu kekuatan pendorong utama tampaknya inovasi ekonomi dan sosial, imajinasi dan kreativitas harus diberikan tempat khusus. Sebagai ekspresi kebebasan manusia, mereka mungkin terancam oleh adanya pemaksaan dalam perilaku individu. Dunia abad kedua puluh satu membutuhkan manusia dengan berbagai bakat dan kepribadian.

Semua manusia harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan estetika, artistik, sains, sosial dan budaya, penemuan dan eksperimen, yang merupakan perkembangan baru dari masa sebelumnya. Kepedulian terhadap kemanusiaan dalam mengembangkan imajinasi dan kreativitas juga harus mengembalikan nilai budaya lisan dan pengetahuan yang merupakan hasil dari pengalaman anak-anak atau orang dewasa.

Learning to live together, dilatar belakangi oleh munculnya berbagai tindak kekerasan dalam kehidupan akhir-akhir ini. Hal ini bertentangan dengan harapan yang menempatkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Sepanjang sejarah manusia, konflik selalu terjadi secara terus menerus yang berpotensi luar biasa terhadap penghancuran manusia itu sendiri. Media informasi yang menyebarkan berita tersebut dapat kepada publik, namun tidak mampu berperan sebagai peredam konflik. Pada kondisi ini, pendidikan belum mampu berbuat banyak. Oleh karena itu peserta didik harus diberikan bekal tentang belajar hidup bersama.

Sebuah gagasan untuk mengajarkan tindakan non-kekerasan di sekolah patut dipuji. Sekalipun ide tersebut masih menghadapi tantangan karena adanya

kecenderungan alami manusia lebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri atau kelompoknya. Selain itu, iklim persaingan umum yang baik dalam perekonomian domestik dan internasional cenderung mengarahkan daya saing dan kesuksesan pribadi ke dalam nilai-nilai modern. Bahkan, daya saing ini kini diterjemahkan ke dalam perang ekonomi yang tak kenal lelah dan ketegangan antara kaya dan miskin yang menghancurkan negara sehingga memperburuk persaingan. Sangat disayangkan jika penafsiran yang salah tentang apa yang dimaksud dengan persaingan ini dijadikan pula sebagai tata nilai yang diopertahankan dalam dunia pendidikan.

Untuk memperbaiki kondisi ini diperlukan komunikasi antara orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik untuk mengurangi risiko terjadinya pertentangan ras atau kelompok keagamaan. Jika kelompok-kelompok yang berbeda adalah pesaing atau jika mereka tidak mempunyai status yang sama di wilayah geografis yang sama, hal ini memungkinkan timbulnya konflik tersembunyi.

Kesimpulan akan tampak bahwa pendidikan harus mengadopsi dua pendekatan yang saling melengkapi. Dari anak usia dini, harus fokus pada penemuan orang lain dalam tahap pertama pendidikan. Pada tahap kedua pendidikan dan dalam pendidikan seumur hidup, itu harus mendorong keterlibatan dalam proyek-proyek umum. Hal ini tampaknya menjadi cara yang efektif untuk menghindari konflik atau menyelesaikan konflik laten.

Salah satu tugas pendidikan adalah baik untuk mengajar siswa dan mahasiswa tentang keragaman manusia dan untuk menanamkan dalam diri mereka kesadaran akan persamaan dan saling ketergantungan antara semua orang. Dari awal masa kanak-kanak, sekolah harus merebut setiap kesempatan untuk mengejar ini bercabang dua pendekatan. Beberapa subjek meminjamkan diri untuk ini - geografi manusia dalam pendidikan dasar, bahasa asing dan sastra di kemudian hari.

Selain itu, apakah pendidikan ini disediakan oleh keluarga, masyarakat atau sekolah, anak-anak harus diajarkan untuk memahami reaksi orang lain dengan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Mana semangat empati ini didorong di sekolah, ia memiliki efek positif pada orang-orang muda 'perilaku sosial selama sisa hidup mereka. Sebagai contoh, mengajar anak-anak untuk melihat dunia melalui mata etnis lain atau kelompok-kelompok agama adalah suatu cara untuk menghindari beberapa kesalahpahaman yang menimbulkan kebencian dan kekerasan di antara orang dewasa.

Dengan demikian, mengajar sejarah agama atau adat istiadat dapat menyediakan alat referensi yang berguna untuk membentuk perilaku masa depan.

Terakhir, pengakuan terhadap hak-hak orang lain tidak boleh membahayakan dengan cara anak-anak dan kaum muda yang diajarkan. Guru yang begitu dogmatis bahwa mereka menahan rasa penasaran atau kritik sehat, bukan mengajar murid-muridnya bagaimana cara untuk terlibat dalam perdebatan dapat melakukan lebih banyak ruginya daripada kebaikan. Lupa bahwa mereka menempatkan diri di seberang sebagai model, mereka mungkin, karena sikap mereka, menimbulkan kerugian seumur hidup murid-murid mereka dalam hal yang terakhir keterbukaan pada orang lain dan kemampuan mereka untuk menghadapi ketegangan yang tak terelakkan antara individu-individu, kelompok dan bangsa. Salah satu alat yang penting untuk pendidikan di abad dua puluh satu akan cocok forum dialog dan diskusi.

Ketika orang bekerja sama dalam proyek-proyek menarik yang tidak terbiasa melibatkan mereka dalam bentuk tindakan, perbedaan dan bahkan konflik antara individu-individu cenderung pucat dan kadang-kadang hilang. Sebuah bentuk baru identitas yang diciptakan oleh proyek-proyek ini yang memungkinkan orang untuk mengatasi rutinitas kehidupan pribadi mereka dan nilai melampirkan apa yang mereka miliki bersama sebagai melawan apa yang memisahkan mereka. Di bidang olahraga, misalnya, ketegangan antara kelas-kelas sosial atau kebangsaan pada akhirnya bisa dilas menjadi semangat solidaritas oleh komitmen untuk penyebab umum. Dalam dunia kerja juga, begitu banyak prestasi tidak akan mungkin terjadi jika orang itu tidak berhasil bergerak di luar konflik yang umumnya muncul dalam hirarki organisasi melalui keterlibatan mereka dalam proyek yang sama.

Oleh karena itu pendidikan formal yang cukup sisihkan waktu dan kesempatan dalam kurikulum untuk memperkenalkan anak muda untuk proyek-proyek kolaboratif dari usia dini sebagai bagian dari olahraga atau kegiatan budaya. Tetapi pendekatan ini juga membuat mereka terlibat dalam kegiatan sosial: renovasi daerah kumuh, bantuan untuk orang-orang yang kurang beruntung, aksi kemanusiaan, membantu warga negara senior skema dan seterusnya. Organisasi pendidikan lainnya harus mengambil alih kegiatan ini dari sekolah. Poin lain adalah bahwa, dalam kehidupan sekolah sehari-hari, keterlibatan guru dan murid dalam proyek-proyek umum dapat membantu untuk mengajarkan sebuah metode untuk menyelesaikan konflik dan menyediakan sumber yang

berharga untuk murid referensi di kemudian hari. Fungsi lembaga pendidikan sebagai agen perubahan akan mencapai tujuan yang diharapkan jika lembaga tersebut memenuhi faktor-faktor sebagai lembaga yang efektif.

2.2. Efektivitas Organisasi Pendidikan

Dalam kajian teori tentang efektivitas organisasi dalam penelitian ini adalah sekolah untuk anak TKI, akan ditinjau berbagai pendapat dan hasil penelitian sebelumnya yang meliputi pengertian efektivitas, sekolah efektif, efektivitas sekolah dalam perspektif manajemen dan perspektif fungsi, serta pentingnya pendidikan khususnya untuk anak TKI.

Sebelum memberikan definisi tentang efektivitas secara struktural, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian Efektivitas menurut makna leksikal. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (Ensiklopedi Administrasi, 1989:147).

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers, 1985:1). Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu :

- Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
- Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;

- Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi : bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Steers, 1985:4-7)

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulos dan Tenenbaum (Richard M. Steers, 1985:20) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Barnard (dalam Gibson, 1994:27), mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson (dalam Handayani, 1985:16) :

Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Katz dan Kahn (Richard M. Steers, 1985:48) berpendapat bahwa efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Liang Gie (1988:34) berpendapat bahwa efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Sondang P. Siagian (1981:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. M. Manullang (1986:214) berpendapat :

Prestasi atau efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perorangan, atau dengan kata lain bila tiap anggota organisasi secara

terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.

Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999 : h.27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfiesthe motives of the aim, whatever it is effective or not”.

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila

mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Disamping itu, menurut Chester I Barnard, dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999 : h. 28), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut :

“Effectiveness of cooperative effort relates to accomplishment of an objective of the sistem and it is determined with a view to the sistem’s requirement. The efficiency of a cooperative sistem is the resultant of the efficiency of the individuals furnishing the constituent effort, that is, as viewed by them”.

Efektivitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu). Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : Efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien. Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002 : 139), menyatakan :

“doing the right things is more important than doing the things right.

Selanjutnya dijelaskan bahwa:

“effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right”

Efektivitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar. Atau juga *“effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly”*. Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran

menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Penghematan sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai *Cost Reduction Program* (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai *Cost Improvement Program* (Program Perbaikan Biaya) yang berarti mengefektifkan biaya.

Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

2.2.1. Sekolah Efektif

Berdasarkan hasil penelitian Sergiovanni (1987) secara tipikal organisasi sekolah yang efektif diidentifikasi dan dilihat dari pencapaian hasil tes siswa. Keberhasilan sekolah didukung oleh komitmen yang kuat terhadap tujuan dimana siswanya memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi yang dibuktikan dengan pencapaian hasil tes sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Organisasi sekolah yang efektif menggambarkan manajemen sekolah dan manajemen pengajaran yang bermutu, metode

dan perilaku mengajar, dan penerapan kurikulum dalam pengajaran yang tepat serta sikap personal yang mendukung.

Tingkat efektivitas menunjukkan bahwa organisasi akan lebih efektif apabila kelompok-kelompok informal, kebutuhan-kebutuhan individu, dan tujuan-tujuan birokrasi berperan secara bersama atau saling berfungsi secara optimal satu sama lain yang didukung oleh variabel teknologi, perkembangan lingkungan, kesempatan baik, team working yang solid, kecakapan perorangan, dukungan politik dan motivasi yang kuat (Sagala, 2008:158). Model dan kriteria organisasi yang efektif menurut Cameron dan Whetten (1983) adalah sangat beragam sehingga tidak ada definisi tunggal keefektifan organisasi yang jelas, tidak mungkin dan juga tidak diinginkan (Holdaway dan Johnson, 1993:167). Secara umum teori keefektifan berorientasi kepada tujuan, Sergiovanni (1987:33) menyetujui pendapat beberapa ahli keefektifan yaitu Etzioni (1964) bahwa keefektifan adalah derajat dimana organisasi mencapai tujuannya. Steers (1975) keefektifan organisasi menekankan perhatian pada kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang akan dicapai, dan Tobert (1987) bahwa keefektifan organisasi adalah kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuannya (Sagala, 2005:69)

Pendapat para ahli tersebut memfokuskan pada tujuan sebagai indikator organisasi yang efektif. Tujuan dapat dicapai jika proses dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan, dalam proses ini harus menggambarkan bahwa semua pihak yang terkait mengambil peran sesuai porsi, bukan menjadi bagian pekerjaan orang perorang, tetapi sebuah team working yang solid (Sagala, 2008:159).

Design organisasi pendidikan yang efektif adalah kesesuaian antara hasil layanan belajar di kelas yang dicapai dengan harapan dan kemampuan mencapai hasil yang kompetitif dengan memberdayakan sekolah, serta memberi peran yang berarti bagi masyarakat penolong pendidikan (Sagala, 2008: 159). Persepsi yang sama terhadap visi dan misi pendidikan bagi eksekutif, legislative, penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan, dan masyarakat luas di daerah tersebut merupakan kunci mencapai pendidikan bermutu dan akuntabel.

Kapasitas dan kemampuan para pengambil kebijakan diperlukan untuk menggerakkan organisasi lebih efektif menurut Welsh (2003:94) adalah memahami secara betul interaksi antar konstitusi dan peraturan, interaksi antara peraturan dengan

staf, interaksi antara staf dengan dengan kewargaan, dan interaksi antara kewargaan dengan konstitusi. Setiap interaksi mempunyai implikasi bagi seluruh anggota organisasi dan pencapaian tujuan dan target organisasi. Analisis organisasi ini digunakan untuk mengatasi berbagai konflik organisasi yang bersifat negative dan mengelola secara arif konflik yang bersifat positif. Oleh karena pelayanan pendidikan oleh sekolah sebagai bentuk kebijakan publik Efektivitasnya sangat ditentukan pula oleh mediasi/interaksi internal dan eksternal antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, dan sekolah sebagai ujung tombak pelayanan publik tersebut.

Wayne Parsons mengatakan bahwa organisasi keagamaan pada *welfare state* berfungsi sebagai penyedia utama untuk banyak layanan sosial dan pendidikan. (Wayne Parsons:2008:500).

Hesselbein at al (1997:83) mengemukakan bahwa hal yang mendasar dalam suatu organisasi adalah semua personel pada semua tingkatan memahami visi dan misi yang memfokuskan pada nilai-nilai dasar organisasi untuk melayani pelanggannya. Dapat ditegaskan bahwa kriteria keefektifan organisasi penyelenggara pendidikan adalah terjaminnya pencapaian visi, misi, tujuan, dan target secara simultan antara Dinas Pendidikan dan sekolah pada semua jenjang. Hasil penelitian Nanang Fatah (1999) menyimpulkan bahwa (1) dalam pelaksanaan kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan SD ternyata alokasi biaya satuan persiswa untuk setiap wilayah pedesaan dan perkotaan, wilayah kecamatan dan tingkat sekolah tidak ada perbedaan; (2) sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan SD belum dilaksanakan secara efektif dan efisien; (3) perencanaan biaya (penganggaran) dari berbagai sumber dana belum terarah pada peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan biaya secara langsung berhubungan dengan pengadaan bahan pengajaran, pembinaan guru dan siswa belum mendapatkan skala prioritas.

Penelitian lain oleh Manap Somantri (1999) berjudul “Pengembangan Model Perencanaan Strategis Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar”. (1) potensi lingkungan belum dipertimbangkan secara serius untuk kepentingan perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan peningkatan mutu dikdas; (2) faktor-faktor internal sistem pendidikan beserta kinerjanya belum mampu mencapai hasil yang optimal; (3) koordinasi secara aktual dalam perencanaan dan pemecahan masalah tim koordinasi wajar dikdas hanya intensif di tingkat propinsi, di

pihak lain tingkat kabupaten dan kecamatan hanya sebagai pelaksana dan yang dimintai masukan bagi perencanaan tingkat propinsi; (4) implementasi perencanaan dan manajemen pendidikan pada tataran sekolah memberikan sumbangan berarti terhadap pencapaian hasil dan peningkatan mutu pendidikan.

Konsep Sekolah Efektif menurut hasil meta-analisis MacBeath & Mortimore (2001) sekolah efektif memiliki ciri-ciri: visi dan misi yang jelas, kepala sekolah yang professional, guru yang professional, lingkungan belajar yang kondusif, ramah siswa, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas dan berimbang, penilaian dan pelaporan prestasi yang bermakna, dan pelibatan masyarakat yang tinggi.

Kesimpulan itu berdasarkan hasil riset di Amerika Serikat, Coleman (1966) melaporkan bahwa siswa yang berprestasi tinggi di sekolah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan hidupnya berhasil adalah siswa yang berasal dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi. Sedangkan siswa yang prestasinya rendah, tidak mampu belajar di sekolah, *drop out*, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak mempunyai motivasi belajar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang sosial ekonominya rendah.

Di Inggris, Robbins (1962) melaporkan bahwa hampir semua siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya mempunyai profesi yang tinggi. Hanya 2% siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya tidak mempunyai kecakapan/pendidikan.

Pusat Penelitian dan Pengukuran New South Wales, (1960-1970) Australia, menyimpulkan bahwa pendapat/pandangan orang tua tentang nilai-nilai pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran anak di sekolah. Berdasarkan pendapat orang tua tersebut, dapat diprediksi prestasi siswa di sekolah, kapan siswa *drop out*, jenis pekerjaan apa yang akan ditekuninya. Kesimpulannya latar belakang keluarga merupakan faktor penting yang menentukan prestasi/ keberhasilan siswa di sekolah. Apa yang dibawa siswa ke sekolah jauh lebih penting dari pada proses yang terjadi di dalam sekolah. Sekolah tidak dapat membuat perubahan yang signifikan terhadap siswa. Dari kesimpulan tersebut pada kenyataannya ada sekolah-sekolah yang secara konsisten menghasilkan siswa-siswa berprestasi tinggi, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berhasil hidupnya, apapun latar belakang keluarga siswa.

Hasil penelitian Ritter (1979) Inggris, melaporkan bahwa sekolah yang menghasilkan siswa-siswa berprestasi tinggi memiliki cirri-ciri: menekankan pada

pembelajaran, guru merencanakan bersama dan bekerjasama dalam pelaksanaan pembelajaran, dan ada supervise yang terarah dari guru senior dan kepala sekolah.

Beberapa penelitian di Amerika Serikat Weber (1971), Austin (1978), Brookeover & Lezotte (1979), Edmond & Frederickson (1979), Phi delta Kappa (1980) secara meta analisis menyimpulkan bahwa sekolah tersebut mempunyai cirri-ciri: kepemimpinannya kuat, memiliki harapan yang tinggi bagi siswa dan guru, lingkungannya yang kondusif, kepala sekolah berperan sebagai ‘intruactional leader”, kemajuan prestasi belajar siswa sering dimonitor, dan adanya dukungan pelibatan orang tua siswa secara aktif.

2.2.4 Efektivitas Sekolah dalam Persfektif Fungsi Pendidikan

Efektivitas sekolah menurut Ing Chaypor, didukung oleh tiga komponen, yaitu input, process, dan output. Hasil penelitian yang dilakukan tentang Aplikasi Prinsip-prinsip Sekolah Efektif di SMP PIRI Ngaglik, Sleman, Yogyakarta mengelompokan indikator Input yang meliputi visi, misi, sumber daya manusia, kurikulum, sarana prsarana, pembiayaan. Indikator proses meliputi manajemen, kepemimpinan, proses belajar mengajar, peran orang tua siswa dan warga sekolah, lingkungan dan iklim sekolah. Output meliputi prestasi akademis, penghargaan yang ditermia siswa dan guru, kepuasan pelanggan.

Sekolah sebagai tempat pelayanan pendidikan merupakan tempat agen perubabahan dan memiliki konteks sosial yang kompleks, yang memiliki keterbatasan sumber daya dan melibatkan berbagai konstituen lembaga berwenang, administrator sekolah, guru, murid, orang tua, pembayar pajak, pendidik, dan masyarakat (Cheng,1993). dalam konteks sosial membicarakan Efektivitas sekolah sangat sulit tanpa membahas fungsi sekolah. Oleh karena itu dalam membahas efektivitas sekolah perlu klarifikasi terlebih dahulu terhadap tujuan dan fungsi sekolah. Averch, et al (1974:3) dalam Yin Cheong Cheng menyatakan bahwa sekolah negeri di Amerika Serikat memiliki lima fungsi penting; sosialisasi, pemersatu dan menegakkan kedisiplinan pada latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda; sorting, mengidentifikasi peran sosial ekonomi manusia pada masa mendatang; *custody*, fungsi kedudukan anak; pelatihan ilmu pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan angka melek huruf, dengan minimal memberikan keterampilan kerja yang relevan dan mendorong kreatifitas dan kemandirian individu. Bolman dan Deal, 1991a; Kazamias dan Schwart, 1977; Townsend, 1994)

membagi fungsi sekolah menjadi lima jenis: fungsi teknis/ekonomi, fungsi kemanusiaan/sosial, fungsi politik, fungsi budaya, dan fungsi pendidikan.

Fungsi teknis/ekonomi mengacu pada sumbangsih sekolah terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan individu, lembaga, masyarakat setempat, dan masyarakat internasional. Pada tingkat individu, sekolah dapat membantu siswa dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan kompetensi dalam masyarakat modern atau persaingan ekonomi menyediakan peluang dan latihan kerja. Pada tingkat lembaga, sekolah adalah lembaga pelayanan yang menyediakan pelayanan yang bermutu; juga memberikan tempat kehidupan dan tempat kerja dalam masyarakat untuk klien, majikan dan semua stake holder. Pada tingkat sosial kemasayarakatan, sekolah menyediakan layanan kebutuhan ekonomis dan instrumental masyarakat setempat, penyedia tenaga kerja pada sistem ekonomi, membentuk perilaku ekonomi siswa (McMohan,1987) memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan stabilitas struktur sumber daya ekonomi manusia (Hinchiffe, 1987). Pada tingkat internasional menyediakan tenaga kerja yang bermutu tinggi yang diperlukan dalam kompetisi internasional, kerjasam ekonomi, perlindungan bumi, perubahan tehnologi dan informasi.

Fungsi sosial kemasayarakatan kontribusi sekolah terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada tingkat sosial yang berbeda-beda. Pada level individu sekolah membantu siswa dalam perkembangan psikologi, sosial, dan jasmani, serta mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin. Pada tingkat lembaga, sekolah sebagai perwujudan pranata sosial atau membangun sistem sosial dalam hubungan antar manusia yang berbeda-beda. Iklim dan hubungan sosial sering dijadikan tolok ukur dalam kualitas kerja dan belajar untuk guru dan murid. Pada tingkat masyarakat, sekolah memberikan pelayanan terhadap kebutuhan sosial dan masyarakat setempat, mendukung integrasi sosial, membantu mobilitas sosial, menekankan persamaan sosial pada sebagai anggota masyarakat dari berbagai latar belakang. Menseleksi orang-orang yang berkompeten pada peran dan posisi yang cocok, dan membantu perubahan sosial dan perkembangan jangka panjang (Cheng, 1991a). Pada tingkat internasional, sekolah diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk harmonisasi internasional, kerjasama sosial, hubungan kemanusiaan global, eliminasi nasional, regional, ras dan bias jender.

Fungsi politik mengacu kepada kontribusi sekolah terhadap perkembangan politik

pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individu, sekolah membantu siswa untuk mengembangkan cinta tanah air dan keterampilan untuk melatih tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Pada tingkat lembaga, sekolah sebagai tempat menanamkan norma politik, nilai dan keyakinan, diskusi kritis dan cerminan peristiwa politik yang ada. Pada tingkat masyarakat, sekolah memegang peran penting untuk melayani kebutuhan politik lokal, pengakuan terhadap pemerintahan, memelihara struktur dan stabilitas sosial, promosi kesadaran dan gerakan demokrasi, dan memfasilitasi rencana perkembangan dan perubahan politik (Thomas, 1983). Pada tingkat internasional, sekolah diharapkan memberikan pemahaman internasional, kepentingan global, koalisi internasional, gerakan damai anti perang, eliminasi konflik regional dan antar bangsa.

Fungsi budaya, sekolah diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan transmisi budaya pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individu, sekolah membantu siswa untuk mengembangkan kreatifitasnya dan kesadaran estetis dan disosialisasikan dengan norma-norma keberhasilan, nilai dan keyakinan sosial. Pada level lembaga sekolah berperan sebagai tempat transmisi budaya secara sistemik dan reproduksi generasi berikutnya, integrasi budaya, revitalisasi budaya dari kepurukan tradisi. Pada tingkat masyarakat, sekolah sebagai unit budaya yang membawa nilai secara eksplisit dan harapan masyarakat setempat, mentransmisikan semua nilai dan tanda-tanda masyarakat kepada siswa, integrasi sub budaya dan latar belakang yang berbeda, revitalisasi kekuatan budaya yang ada. Pada tingkat internasional, sekolah dapat mendorong apresiasi budaya yang berbeda dan penerimaan terhadap norma, tradisi, nilai dan keyakinan yang berbeda pada Negara dan wilayah yang berbeda, dan memberikan kontribusi terhadap budaya global melalui integrasi beragam budaya.

Fungsi pendidikan, kontribusi sekolah terhadap mengembangkan dan memelihara pendidikan pada berbagai tingkat sosial. Pada tingkat individu, sekolah berfungsi membantu siswa dalam cara belajar bagaimana belajar dan membantu guru bagaimana belajar cara mengajar. Mengembangkan profesionalisme guru. Pada tingkat lembaga, sekolah berfungsi sebagai sistematisasi belajar, mengajar, dan menularkan ilmu pengetahuan, dan sebagai pusat pengembangan dan perubahan pendidikan. Pada tingkat masyarakat, sekolah berfungsi untuk menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan setempat, memfasilitasi pengembangan profesi pendidikan dan struktur pendidikan, menularkan ilmu pengetahuan untuk generasi mendatang, dan memberikan sumbangsih

dalam membentuk masyarakat belajar. Sekolah juga mengembangkan pendidikan global dan pertukaran dan kerjasama pendidikan internasional. Pada tingkat internasional, sekolah dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan di dunia.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang undang undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyebutkan fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sekolah sebagai satuan pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan pikiran dan mengembangkan pengetahuan anak didik.

2.2.2. Efektivitas Sekolah menurut McBeath dan Mortimore

Hasil metaanalisis MacBeath & Mortimore (2001) tentang karakteristik sekolah efektif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) visi dan misi yang jelas; (2) kepala sekolah yang profesional; (3) guru yang profesional; (4) lingkungan yang kondusif (5) ramah siswa; (6) manajemen yang kuat; (7) kurikulum yang luas dan berimbang; (8) penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna; (9) pelibatan masyarakat yang tinggi. Karakteristik tersebut secara lengkap yang kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator sekolah efektif, selengkapnya sebagai berikut:

Visi dan Misi yang jelas:

1. Sekolah mempunyai visi, misi yang dirumuskan secara jelas.
2. Visi, misi dirumuskan bersama dengan stakeholders sekolah.
3. Visi, misi dijadikan acuan oleh warga sekolah.
4. Visi, misi dijabarkan menjadi tujuan/sasaran, program dan kebijakan sekolah.
5. Lingkungan sekolah dan operasional sekolah mencerminkan kebijakan dan tujuan/sasaran sekolah.

Kepala sekolah yang profesional:

1. Rincian kualifikasi dan pengalaman kepala sekolah terpajang.
2. Kepala sekolah mampu mengkomunikasikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah.

3. Kepala Sekolah menjalankan sekolah menuju pada pencapaian visi dan misi.
4. Sekolah mempunyai rencana pengembangan sekolah yang dilaksanakan dan direview dan dimonitor secara teratur.
5. Kepala sekolah mampu mendiskusikan isu-isu rencana pengembangan sekolah dengan warga sekolah secara terbuka dan konstruktif.
6. Kepala sekolah dihargai oleh warga sekolah termasuk orang tua, staf guru dan siswa.
7. Kepala sekolah selalu menyediakan waktu untuk berbicara atau berdiskusi dengan orang tua.
8. Kepala sekolah mampu mendemonstrasikan pengetahuan ttg sekolah dan siswanya.
9. Kepala sekolah mampu memberikan supervisi yang mengarah pada peningkatan pembelajaran.
10. Kepala sekolah menerima orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan pembelajaran siswa.
11. Kepala sekolah menjunjung tinggi moral warga termasuk moral staf guru.

Guru yang profesional:

1. Rincian kualifikasi dan pengalaman guru terpajang.
2. Guru merasa nyaman bekerja di sekolah.
3. Guru dipandang positif oleh siswa
4. Guru mampu menggunakan berbagai pendekatan mengajar sesuai dengan kebutuhan.
5. Guru dan orang tua mampu berdiskusi masalah pembelajaran dan non pembelajaran yang timbul dan alternatif pemecahan masalah.
6. Guru mengundang orang tua untuk melihat apa yang dipelajari siswa dan bagaimana siswa mencapainya.
7. Guru mengundang orang tua untuk melihat bagaimana disiplin ditegakkan di kelas.
8. Guru mengundang orangtua untuk membantu kegiatan kelas, misalnya

kegiatan seni, olahraga, membaca dan kegiatan pembelajaran lainnya.

9. Guru mengikuti berbagai program pengembangan profesi yang direncanakan secara sistematis.

Lingkungan yang kondusif:

1. Gedung, halaman, dan peralatan sekolah bersih dan terawat.
2. Orang tua dapat melihat hubungan yang positif antara masyarakat sekolah dan lingkungannya.
3. Mekanisme untuk partisipasi siswa dalam organisasi sekolah jelas, misalnya aturan untuk menjadi perwakilan kelas.
4. Sekolah mempunyai aturan/kebijakan yang dirumuskan dengan jelas mengenai isu-isu disiplin, mengganggu siswa lain, dan kesejahteraan siswa lainnya.
5. Guru, orang tua, dan siswa memahami aturan/kebijakan tersebut.
6. Isu-isu seperti gangguan terhadap siswa dan disiplin siswa didiskusikan dengan warga sekolah.

Ramah siswa:

1. Sekolah menyediakan unit/staf pendukung, misalnya guru BP, UKS, unit pembimbingan karir dan unit pendukung lainnya bagi siswa.
2. Siswa mempunyai akses yang mudah terhadap semua unit/staf pendukung tersebut.
3. Sekolah melakukan kerjasama antara unit/staf pendukung tersebut dengan pusat layanan masyarakat yang lebih luas, misalnya Puskesmas, Kepolisian, lembaga psikologi.

Manajemen sekolah yang kuat:

1. Orangtua dan komite sekolah puas dengan alokasi dana, keputusan ttg jenis dan waktu pengeluaran dana.
2. Sekolah menyediakan staf administrasi yang memadai untuk mendukung operasi sekolah.
3. Staf administrasi mengenal semua siswa dan orang tuanya.
4. Sekolah didukung oleh teknologi memadai.
5. Sekolah mempunyai fasilitas fisik lain seperti peralatan olah raga,

lapang olahraga, perpustakaan, panggung pentas dan lain-lain.

6. Sistem pengembangan keterampilan guru dan sistem penilaian kinerja guru tersedia dan dilaksanakan termasuk penjadwalannya.
7. Sekolah menyediakan waktu untuk guru merencanakan dan melakukan pengembangan diri.
8. Jumlah siswa sesuai dengan petunjuk operasional sekolah dan pengaturan kelas bisa disesuaikan tergantung kebutuhan.
9. Siswa merasa puas dengan pengaturan jadwal dan pengaturan mata pelajaran.
10. Sekolah memajang RPS dan RAPBS
11. Sekolah melaporkan kegiatan dan pendanaan kepada stakeholders
12. Sekolah memiliki budaya mutu.
13. Sekolah melakukan monev terhadap kinerjanya.
14. Sekolah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kurikulum yang luas dan berimbang:

1. Semua mata pelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan.
2. Sekolah menyediakan program khusus bagi siswa-siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, termasuk siswa yang kesulitan belajar atau siswa yang kemampuan belajarnya melebihi rata-rata.
3. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, misalnya musik, olah raga, debate dan lain-lain.
4. Guru dapat menjelaskan kepada orang tua bagaimana kurikulum dijabarkan dan diberikan pada siswa.
5. Dalam menjabarkan kurikulum, guru menghubungkannya dengan kecakapan hidup dan visi sekolah.

Penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna:

1. Orang tua memahami dan puas dengan tingkat informasi yang diberikan ttg anak mereka.
2. Orang tua diberi informasi tentang perkembangan akademik, sosial, personal dan fisik siswa.

3. Orang tua dapat melihat perubahan pendekatan mengajar yang dilakukan guru berdasarkan hasil penilaian.
4. Guru menggunakan berbagai macam teknik penilaian.
5. Informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan mereka belajar mereka bersifat membangun dan membimbing.

Pelibatan orangtua dan masyarakat yang tinggi:

1. Orang tua mempunyai sikap yang positif terhadap sekolah dan sangat giat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
2. Orang tua terlibat dalam pembelajaran siswa dalam berbagai bentuk dan hadir dalam berbagai kegiatan.
3. Orang tua terlibat dalam menentukan visi, misi, tujuan dan kebijakan sekolah.
4. Sekolah memberikan pelatihan atau pembimbingan kepada orang tua mengenai cara membantu tugas sekolah, memahami isu-isu pendidikan, dan isu kesamaan gender.
5. Komite sekolah mempunyai hubungan yang erat antara dan orang tua siswa.
6. Orang tua puas dengan tingkat komunikasi antara sekolah dengan orang tua.
7. Sekolah meminta dan menerima masukan dari orang tua tentang kepuasan orang tua thd kinerja sekolah.
8. Sekolah dipandang sebagai bagian penting dari masyarakat.
9. Sekolah mempunyai hubungan dengan sekolah lain, organisasi pemerintah, pusat-pusat pelayanan masyarakat, organisasi bisnis dan masyarakat luas pada umumnya.

Sumber: Suparlan; 2008

2.3. Definisi tentang Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia atau yang disebut TKI adalah buruh migran asal Indonesia yang bekerja pada perusahaan-perusahaan perkebunan, industri maupun rumah tangga di luar Negeri dalam penelitian adalah di Sabah Malaysia. Sementara itu anak TKI

sendiri adalah anak usia sekolah antara satu sampai dengan delapan belas tahun yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di Sabah Malaysia. Dalam dokumen laporan hasil studi Departemen Pendidikan Nasional menyebut anak-anak TKI sebagai anak-anak WNI yang bekerja di wilayah Sabah Malaysia.

....SIKK tidak disebut sebagai bentuk pelayanan pendidikan untuk anak-anak TKI tetapi sebaiknya disebut SIKK sebagai bentuk pelayanan pendidikan untuk Warga Negara Indonesia. (Depdiknas;2008, 35)

Perusahaan Malaysia yang mempekerjakan TKI tidak menyebut para pekerjanya dengan istilah TKI mereka menyebut dan bahkan umumnya masyarakat Malaysia dan masyarakat non- Indonesia lainnya yang tinggal di Malaysia menyebutnya sebagai “Indon”. Istilah yang di lingkungan KJRI dianggap merendahkan warga Negara Indonesia di Malaysia. Bahkan sebutan Indon tersebut seolah-olah menjadi sebutan resmi bagi warga Negara Indonesia yang berada di Malaysia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia sendiri sebutan tersebut dirasakan membuat kelas bangsa Indonesia lebih rendah dari bangsa lain. Namun sebutan itu menjadi terbiasa bagi sejumlah tenaga kerja Indonesia yang sudah puluhan tahun tinggal di daerah “plantation” kelapa sawit di Sabah. Sebagian besar pekerja perkebunan tersebut tidak memiliki keterampilan lain selain menanam, menyangi, dan memetik kelapa sawit milik tuannya. Pekerjaan tersebut secara turun temurun akan dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Sabah dan membina rumah tangga secara “illegal” dengan sesama TKI di perkebunan tersebut. Dari perkawinan tidak resmi tersebut melahirkan anak yang pada akhirnya dianggap anak illegal oleh kerajaan Malaysia. Karena status itulah menurut Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu hingga tahun 2009 sebanyak lebih dari 40.000 anak usia di bawah 18 tahun tidak dapat menikmati layanan pendidikan. Jumlah tersebut diperoleh melalui pemutihan dokumen kewarganegaraan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Anak-anak tersebut pada umumnya lahir di perkebunan kelapa sawit secara illegal, sehingga tidak memiliki surat kelahiran atau akte kelahiran. Jadi Anak TKI dapat didefinisikan sebagai anak-anak usia sekolah atau umur 1 sampai dengan 18 tahun yang salah satu atau kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh di Sabah Malaysia.

Sementara itu dalam penelitian ini yang disebut pelayanan pendidikan untuk anak

TKI adalah kesempatan belajar bagi siswa berstatus sebagai anak TKI yang diberikan oleh sekolah dasar di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

Pendidikan menempati posisi penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Pendidikan memberikan kontribusi pemecahan terhadap persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat modern. Oleh karenanya, salah satu kebijakan dasar bangsa yang progresif, harus membangun, menyediakan, dan mendukung kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kondisi warga negaranya. (John & Edgard R.Morphet, 1975 : 2)

Oleh karena itu, dukungan finansial untuk pendidikan merupakan bentuk investasi yang ditentukan besarnya oleh benefit yang diterima negara atau pribadi. Pendidikan bagi negara akan menghasilkan manfaat pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi meningkat pada level terendah pendidikan, stabil pada level tengah, kemudian menurun pada level *secondary* dan *postsecondary*. (Tienken, 2008: 2)

Selain itu, pendidikan juga akan memberikan *private benefit*. Toth (2009) mengungkapkan pendidikan memberikan kontribusi peningkatan produktivitas tenaga kerja selama tahun 1990-an antara 19,5 sampai 2,5 %. Hal itu berdampak kepada meningkatnya penghasilan pekerja. Toth juga mengungkapkan, *private return* yang diterima setiap penambahan sekolah satu tahun adalah dari 4,7 sampai 6,8%.

Gambaran singkat di atas memberikan argumen yang menunjukkan pendidikan sangat penting bagi pembangunan negara. Oleh karena itulah, kebijakan pemerintah selalu didorong untuk menempatkan pendidikan diposisi utama.

Hannum dan Buchman (2005), seperti dikutip Nishimoku (2007) berkeyakinan bahwa pendidikan memberikan kontribusi kepada perkembangan sosial, kesehatan, partisipasi dalam sektor ekonomi dan demokrasi. Negara-negara internasional telah menempatkan pendidikan, terutama pendidikan dasar, sebagai agenda terpenting pembangunan internasional, menghimbau negara donor untuk memberikan bantuan agar negara penerima meningkatkan anggaran untuk pendidikan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) mendukung adanya wajib belajar (*compulsary education*). Artikel 26 deklarasi tersebut menekankan bahwa “*elementary education*” harus wajib. Pada April 2000, 1100 orang delegasi dari 164 negara berkomitmen “Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*)” pada the World Education

Forum di Dakar, dengan the Dakar Framework for Action, yang bertujuan “*free and compulsory education of good quality for all by 2015*”. (E.G. West Centre, 2009). Lebih jauh, *Dakar Framework for Action* menyebutkan bahwa ada empat elemen pendidikan berkualitas:

- Media pembelajaran yang tepat mono atau multimedia
- Kecukupan isi kurikulum secara kultural
- Metode pembelajaran yang profesional
- Finansial dan material yang cukup. (Nishimuka, 2007)

Wajib belajar, dengan demikian, tidak hanya menyangkut akses terhadap pendidikan dasar, tetapi pemerintah harus menjamin pendidikan yang disediakan adalah pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas harus integral dengan wajib belajar. Dampaknya, wajib belajar yang tidak disertai kualitas tidak menghasilkan outcome yang positif. Lebih luas lagi, sekolah yang tidak menunjukkan hasil positif, orang tua tidak akan mengirim anaknya untuk menempuh pendidikan.

Di Indonesia, program wajib belajar tidak bisa dipisahkan dengan program pemberantasan buta huruf. Seperti ditulis Jalal dan Nina Sardjunani (2007), Sebelum Indonesia merdeka, program tersebut telah dilaksanakan dan dikenal dengan nama “Kursus ABC”. Saat itu, hanya 3% dari populasi yang terdaftar di sekolah formal. Pada tahun 1951, pemerintah merancang “Rencana Pendidikan Masyarakat 10 Tahun” yang akan memerangi buta huruf selama 10 tahun. Namun, pada tahun 1960 masih ditemukan 40% penduduk yang buta huruf. Pada tahun itu pula, Presiden memutuskan buta huruf akan tereliminasi di tahun 1964. Pada tanggal 31 Desember 1964, tulis Jalal dan Nina, diumumkan bahwa seluruh penduduk yang berusia 13-45 tahun, kecuali di Irian, telah bebas dari buta huruf. Mereka mampu menulis dan membaca kalimat-kalimat sederhana.

Akan tetapi, akses pendidikan usia 6-11 tahun masih terbatas dan angka buta huruf terus bertambah. Pada tahun 1966-1979, Indonesia mengadopsi “Melek Huruf Tradisional” (*traditional literacy*) dari UNESCO. Menurut metode ini, peserta diajarkan bagaimana membaca dan menulis juga keterampilan. Belakangan, metode itu dikenal sebagai “*The Functional Literacy Program*”. Program ini tidak untuk memberantas buta huruf sebanyak mungkin tetapi lebih kepada meningkatkan produksi kelompok peserta buta huruf. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan institusi lain yang pekerjanya masih ada buta huruf. Pada tahun 1970-1990, Indonesia

mengimplementasikan Program Paket A. Program ini diadopsi dari konsep “lingkaran spiral”. Menurut konsep “lingkaran spiral”, belajar dan mengajar diawali dengan isu kehidupan sehari-hari pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pada periode ini pula dicanangkan Wajib Belajar 6 Tahun. Indonesia berhasil memberantas buta huruf secara signifikan. Pada tahun 1994, Presiden RI menerima “*Avicenna Award*” dari UNESCO.

Sejak 1990 sampai 2000, menurut Jalal dan Nina (2007), pemerintah terfokus pada Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan Program Paket A dan B menjadi penyelenggara wajib belajar jalur nonformal (PP Nomor 47 Tahun 2008 pasal 3 ayat 3).

Terlepas dari hal tersebut diatas, wajib belajar, pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau. Program Wajib Belajar dilaksanakan sejak tahun 1984 (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun) kemudian setelah 10 tahun diluncurkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sejak 1994, melalui Instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1994. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama sebagai pelaksanaan 34 (4) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 2 Tahun 2008 menjelaskan bahwa program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia sedangkan tujuannya adalah wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mengenai pendanaan Program Wajib Belajar, pada pasal 9 (1) PP itu menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan setingkat pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah, tanpa memungut biaya dari masyarakat. Namun, pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, pembiayaan untuk investasi lahan, sarana, dan prasarana lain merupakan tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib

memberikan bantuan biaya pendidikan kepada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak mereka.

Program wajib belajar, berdampak kepada meningkatkan akses terhadap pendidikan. Pada November 2008, Mendiknas mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sudah mencapai 93,79 persen. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, ditargetkan pada tahun 2008 mencapai 71,83 persen. APM SMP sudah mencapai 75,33 persen, termasuk di tingkat madrasah tsanawiyah (MTs). Sedangkan untuk angka transisi, yaitu persentase anak SD yang melanjutkan ke SMP ditargetkan pada tahun 2008, mencapai 92,50 persen. Ternyata tahun ini saja, menurut Bambang, sudah mencapai 92,70 persen. Namun, angka putus sekolah masih 3,01 persen dan ditargetkan turun pada tahun ini sudah bisa turun hingga 2,58 persen. Di samping itu, pada tahun 2004, tercatat sejumlah 15,41 juta orang buta aksara untuk usia 15 tahun ke atas atau 10,2 persen dan pada tahun 2008 angka buta huruf sudah turun menjadi 12,24 juta orang atau 7,49. Pemerintah menargetkan pada tahun 2009, angka buta huruf bisa turun menjadi 5 persen. (Ditptksd Diknas, 2008)

Peran *human capital* dalam pertumbuhan ekonomi negara merupakan stimulus reformasi pendidikan di beberapa negara. (Stanley, 2007 : 91) Jika dikaitkan dengan ekonomi negara, John dan Edgard (1975 : 92) mengemukakan bahwa ekonomi sebuah negara dibangun melalui formasi modal. Investasi, tulis mereka, adalah menyediakan biaya untuk menambah modal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pengeluaran biaya untuk pendidikan merupakan investasi pendidikan. Reformasi pendidikan tersebut antara lain kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung proses pendidikan.

2.4. Mediasi Interorganisasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang berikai. Dari segi terminologi terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Salah satu diantaranya adalah definisi yang

diberikan oleh the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted. (David Spencer, Michael Brogan, 2006:9)

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan berindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan. Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipecaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan.

Dengan kata lain, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator/penengah harus: (1) Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain. (2) Mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan. (3) Memiliki keinginan berbagi dan merasakan. (4) Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model mediasi di bawah ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan *bottom lines* dari *disputants* dan secara persuasif mendorong *disputants* untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses

mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. (David Spencer, Michael Brogan, 2006:101-103).

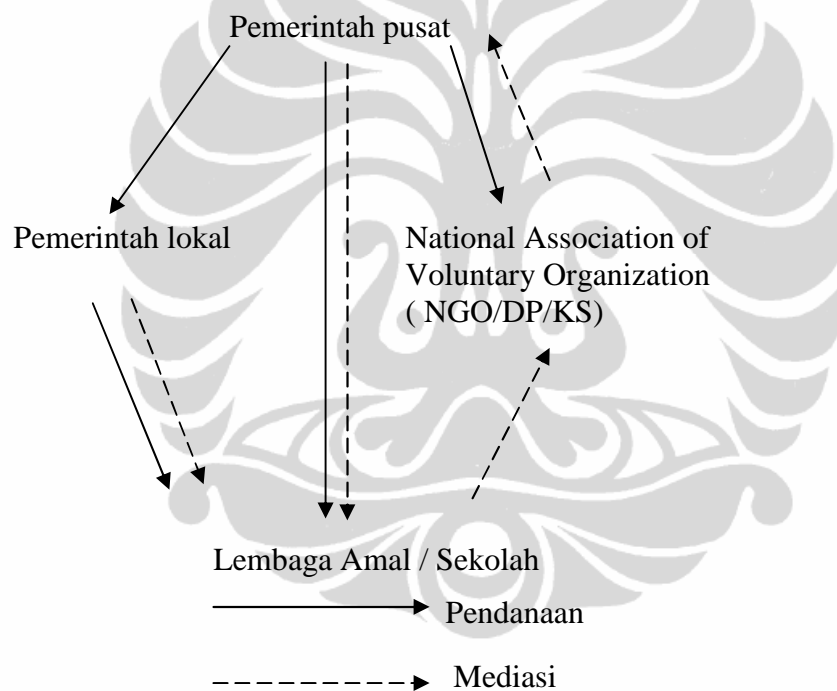
Mediasi dalam model analisis interorganisasional menurut Wayne Parsons, keterlibatan sektor sukarela (atau sektor swadaya masyarakat) dalam area kebijakan dan sosial adalah persoalan yang semakin banyak mendapat perhatian. Sektor sukarela secara historis sangat penting dalam sejarah Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kelompok sukarela berusaha melakukan kerja sosial untuk orang miskin dan lemah dan banyak diantaranya yang menonjol dalam sejarah. (Butler dan Wilson, 1990: 9-14). Organisasi keagamaan khususnya memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan lembaga-loembaga bantuan amal yang sampai kemunculan *welfare state*, berfungsi sebagai penyedia utama untuk banyak “layanan sosial” dan pendidikan. (Wayne Parsons, 2008: 500).

Pertumbuhan *welfare state* dan pendidikan massal membuat eksistensi sektor sukarela ini kurang dibutuhkan di abad ke-20. Namun, belakangan ini, peran sektor sukarela mulai menonjol lagi karena Negara tidak lagi mampu atau tak lagi ingin menyediakan serangkaian pelayanan seperti yang pernah diharapkan (Mellor, 1995). Peran mereka dideskripsikan secara ekstensif dan akurat sebagai agen privat dari kebijakan publik (Streeck dan Schmitter, 1985).

Organisasi sukarela menggunakan orang-orang tetap, dan mereka harus mendapatkan uang untuk pembiayaan. Bantuan atau amal (*charity*) adalah bisnis besar (Wayne Parson, 2008: 501). Ini membuat beberapa pihak mengatakan bahwa ide “sektor sukarela” harus diganti dengan gagasan “sektor ketiga” (Osborne dan Gaebler, 1992:44) yang diakui punya peran dalam penyampaian pelayanan dan barang publik. Tanggung jawab yang diemban oleh sektor ini sebagai akibat dari pengurangan kesejahteraan dan kebijakan antinegara kesejahteraan. (Wayne Parsons, 2008: 501).

Pembiayaan sektor privat mungkin mendukung aktivitas kelompok sukarela yang berasosiasi dengan pemerintah; pemerintah mungkin memilih menyampaikan kebijakan melalui sektor sukarela dan mendapatkan dana dari hibah; atau mungkin ada jejaring pendanaan dan dukungan yang memfasilitasi pertukaran dana, keahlian, dan komitmen. Model yang paling tepat untuk menjelaskan campuran itu adalah **model** dari **analisis interorganisasional**, yang menekankan pada dependensi organisasi-organisasi, seperti kelompok sukarela, terhadap sumber daya dari lembaga dana di sektor publik dan privat. Hubungan tersebut menimbulkan pola interaksi neo-korporatis antara Negara, National Association of Voluntary Organization, pemerintah lokal, dan lembaga bantuan. (Wayne Parsons, 2008 : 5002).



Gambar 2.1 Hubungan pemerintah – Voluntary

Sumber: Wayne Parsons (2008)

Dalam relasi ini agen Negara dan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan keputusan strategis sektor sukarela melalui kekuatan dana dan mediasinya.

Untuk memahami secara lebih baik interaksi antara pemerintah dan warganya di tempat di mana pemerintah dan orang bertemu maka mengkaji interaksi birokrat dengan kliennya di tingkat lapangan merupakan keharusan. (Lipsky, 1971). Ada kondisi tertentu di lingkungan kerja birokrasi yang tampaknya relative menonjol dalam membentuk

interaksi birokrat - warga Negara. Dari analisis yang dilakukan, ada hal-hal yang signifikan, yaitu bahwa birokrasi yang ada tidak mampu merespons secara baik permintaan akan pelayanan yang lebih baik dan simpatik kepada klien (Lipsky, 1976:208-10). Kebijakan yang paling baik diimplementasikan adalah kebijakan yang “*backward mapping*” atau “*bottom up*” (Elmore, 1979,1985).



BAB 3

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, tipe penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, teknik pemilihan informan, teknik pengolahan dan analisis data, serta batasan dan keterbatasan penelitian ini.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sebagaimana dikemukakan Moleong (1995:5), pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah lain pendekatan kualitatif adalah postpositivism, metode etnografis, metode fenomenologis, metode subjektif, studi kasus, metode humanistic. Menurut Usman dan Akbar (1996:81), metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umum bersifat kualitatif. Adapun yang dijadikan alasan pemilihan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan kualitatif dianggap lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan perilaku organisasi yang dikaitkan dengan Efektivitas kebijakan pemerintah yang sebelumnya tidak diduga. Moleong (1995:5) menyatakan:

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi.

Informan dalam penelitian kualitatif dipilih secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan dan tingkat akurasi maksimal. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian ialah si peneliti sendiri. Dalam pengumpulan data, peneliti terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.

Merujuk pendapat Merriam (1988:19-20) enam asumsi metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk;

penelitian kualitatif lebih tertarik pada arti-bagaimana manusia membuat dirinya, pengalamannya, dan struktur alam menjadi berarti; peneliti kualitatif adalah alat utama untuk mengumpulkan dan mengolah data; riset kualitatif melibatkan pekerjaan lapangan sehingga secara fisik peneliti mengunjungi orang lapangan, dan institusi untuk meneliti atau merekam perilaku dalam setting yang alami; hasil penelitian adalah deskriptif kualitatif dalam pengertian peneliti lebih mengutamakan proses, makna dan pengertian yang diperoleh dari kata-kata atau gambar; dan proses penelitian ini bersifat induktif dalam pengertian peneliti membangun suatu abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari detail.

Menurut Cresswel dua ciri khusus design penelitian ini adalah;

“the constant comparison of data with emerging categories, and theoretical sampling of different groups to maximize the similarities and the differences of information”.

3.2. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, antara lain meliputi: struktur organisasi sekolah dan dinas pendidikan kabupaten Nunukan; jenis-jenis layanan yang diberikan Sekolah Dasar Katolik Fransisco Yashinta dan Sekolah Dasar Nur Islam; bentuk dan prosedur pelayanan bidang kurikulum terhadap siswa, sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, kualifikasi dan kompetensi guru, sumber pembiayaan, mediasi oleh lembaga lain menyangkut teknis pelayanan. Disamping itu juga dibutuhkan data mengenai siswa dan guru (latar belakang siswa, pekerjaan orang tua siswa, pendidikan guru, dan sebagainya).

Informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan substansi informasi, yaitu:

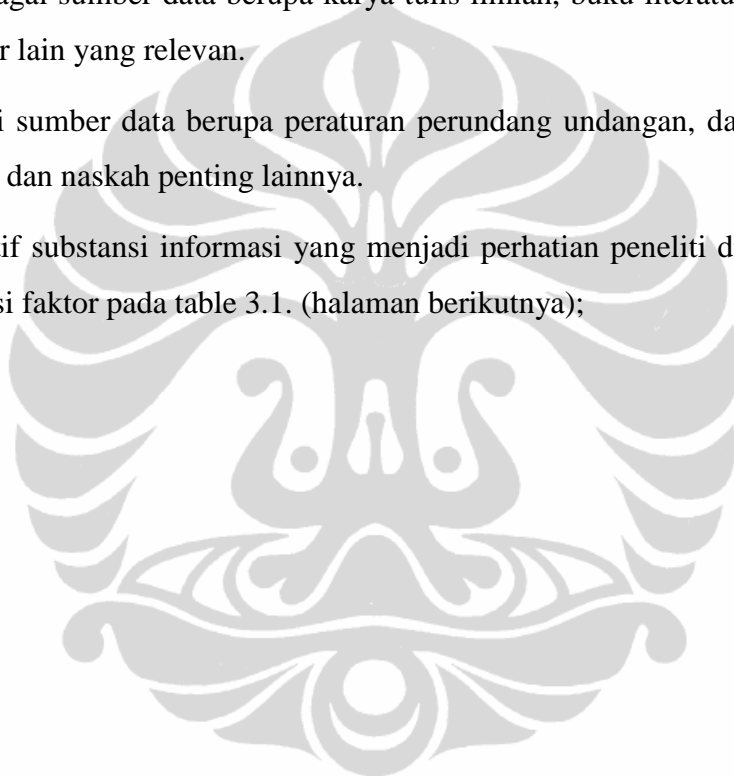
- 1) Perencanaan program yang merupakan penjabaran visi, misi sekolah
- 2) Penerapan kurikulum sekolah
- 3) Tenaga pendidik yang meliputi profesionalisme guru dan kepala sekolah
- 4) Pengawasan dan evaluasi
- 5) Budaya dan lingkungan sekolah
- 6) Sarana dan prasarana sekolah

- 7) Keuangan dan pembiayaan
- 8) Peran serta masyarakat dan mediasi oleh lembaga lain

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Informan yaitu orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan antar lain Kepala Sekolah, Guru, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Siswa, orang tua siswa, dan masyarakat.
- 2) Perpustakaan sebagai sumber data berupa karya tulis ilmiah, buku literature, majalah ilmiah dan sumber lain yang relevan.
- 3) Dokumen sebagai sumber data berupa peraturan perundang undangan, data statistik, arsip, foto, brosur dan naskah penting lainnya.

Secara tabulatif substansi informasi yang menjadi perhatian peneliti disampaikan dalam operasionalisasi faktor pada table 3.1. (halaman berikutnya);



Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Efektivitas pelayanan pendidikan adalah tercapainya tujuan pelayanan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab (Renstra Depdiknas 2005-2009); learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together (Delors), mencakup kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, pendanaan, peningkatan daya tampung.					
1	Perencanaan program kerja yang mendukung tercapainya Visi dan Misi sekolah					
	Indikator:					
	sekolah memiliki strategi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah	primer : wawancara mendalam	informan: Kepala Sekolah	bagaimana upaya kepala sekolah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan lembaga agar sekolah tercapai	visi dan misi dirumuskan dengan jelas, dan menjadi acuan dalam menyusun program sekolah	Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas yang diwujudkan dalam program kerja yang mencerminkan kebijakan dan tujuan sekolah
	sekolah mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga	primer : wawancara mendalam	informan: Kepala Sekolah	bagaimana upaya kepala sekolah memecahkan kendala yang dihadapi	serta menjasdi acuan warga sekolah	
sekolah memanfaatkan daya dukung yang ada dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga sekolah	primer : wawancara mendalam	informan: Kepala Sekolah	bagaimana kepala sekolah memperoleh daya dukung dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga			

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 1)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
2	Penerapan Kurikulum Sekolah					
	<p>Indikator:</p> <p>Sekolah menyediakan program khusus, ekstrakurikuler, serta kecakapan hidup</p>	<p>sekunder: studi dokumentasi</p>	<p>program kerja sekolah</p>	<p>sejauh mana kurikulum sekolah menampung aspirasi siswa berkebutuhan khusus, dan mengembangkan bakat, serta kecakapan hidup siswa</p>	<p>sekolah menyediakan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus; sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler; sekolah mengajarkan kecakapan hidup</p>	<p>Standar Nasional: setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik</p>

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 2)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Penguasaan siswa terhadap aspek akademik (pengetahuan, keterampilan, dan sikap)	sekunder: studi dokumentasi	leger nilai	tingkat ketuntasan belajar siswa	nilai < standar; nilai > standar; nilai = standar dibuat sesuai dengan KTSP ; dibuat tidak sesuai dengan KTSP;	
	Silabus disusun mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP)	sekunder: studi dokumentasi	Silabus	kesesuaian silabus dengan KTSP	tidak sesuai dengan KTSP; tidak dibuat	
	Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) disusun mengacu pada Silabus	sekunder: studi dokumentasi	Silabus	kesesuaian RPP dengan silabus	dibuat sesuai dengan silabus ; dibuat tidak sesuai dengan silabus; tidak dibuat; dilaksanakan sesuai RPP; dilaksanakan tidak sesuai RPP; tidak dilaksanakan	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 3)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
3	Tenaga Pendidik yang meliputi profesionalisme kepala sekolah dan guru					
	Indikator:					
	Kualifikasi akademik guru minimal D2	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: Biodata guru	apakah kualifikasi guru sesuai dengan standar tenaga pendidik	sesuai; tidak sesuai	kualifikasi, pengalaman dan kemampuan guru dalam menggunakan berbagai pendekatan mengajar dapat menumbuhkan profesionalisme guru. Hal ini didukung pula dengan program pengembangan profesi secara sistematis, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua siswa dalam masalah pembelajaran.
	Guru mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: Biodata guru	apakah kompetensi guru sesuai dengan bidang yang diajarkan	sesuai; tidak sesuai	
	Pengalaman mengajar guru minimal 5 tahun	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: Biodata guru	berapa lama pengalaman mengajar guru	<5 th; >5 th; >10 th; > 15 th	
	Penguasaan kelas dalam kegiatan belajar mengajar	primer	observasi	sejauh mana penguasaan guru dalam mengelola kelas	metode sesuai RPP, peran siswa, dll	
Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan supervisi guru secara rutin	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: riwayat pendidikan	apakah upaya pembinaan terhadap guru	dilakukan supervisi kelas: tidak dilakukan supervisi kelas		

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 4)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	guru menghasilkan modul/silabus sebagai hasil karya pengembangan profesi	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: hasil karya	berapa banyak modul/silabus yang disusun	sesuai kebutuhan : tidak sesuai kebutuhan	
	guru mengikuti aktivitas dalam forum ilmiah	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: biodata guru	bagaimana keterlibatan guru dalam forum ilmiah	tidak pernah; pernah; sering	
	guru terlibat dalam organisasi kependidikan dan sosial	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: biodata guru	sejauh mana guru terlibat dalam organisasi pendidikan dan social	tidak pernah; pernah; sering	
	guru mendapatkan penghargaan karena prestasi yang diraih	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: biodata guru	berapa banyak penghargaan yang pernah diterima guru	sesuai perolehan	
	sekolah berupaya melakukan pengembangan diri guru	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala Sekolah	apa upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau guru sendiri dalam mengembangkan diri	dilakukan oleh KS; dilakukan oleh guru: tidak dilakukan oleh keduanya; dilakukan oleh keduanya	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 5)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
4	Sarana dan Prasarana sekolah yang memadai dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif					
	Indikator:					
	Ruang kelas yang dimiliki sesuai dengan rombongan belajar	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah ruang kelas sesuai dengan rasio jumlah murid perkelas	jumlah ruang kelas = jumlah rombel; @ ruang kelas < 28 siswa	Sarana prasarana berupa gedung, halaman dan peralatan sekolah bersih dan terawat.
	Sekolah memiliki perpustakaan yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai standar	ada; tidak; ada tidak sesuai	Sekolah mempunyai fasilitas fisik, peralatan olahraga, lapangan olah raga, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.
	Sekolah memiliki lab IPA yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki ruang lab yang sesuai standar	ada; tidak; ada tidak sesuai	
	Sekolah memiliki tempat olah raga yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki tempat olah raga yang sesuai standar	ada; tidak; ada tidak sesuai	
	Sekolah memiliki ruang pimpinan yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki ruang pimpinan yang memadai	> 12 m ²	
	Sekolah memiliki ruang guru yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki ruang guru yang memadai	>32 m ²	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 6)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Sekolah memiliki asrama/pemondokan untuk siswa yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki asrama/pemondokan yang sesuai standar	ada; tidak; ada tidak sesuai	
	Sekolah memiliki jamban yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki jamban yang memadai	1:60 untuk pria; 1:50 untuk wanita; 1:3 untuk guru	
	Sekolah memiliki tempat ibadah yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki tempat ibadah	> 12 m ²	
	Sekolah memiliki ruang UKS yang memadai	sekunder: studi dokumentasi	daftar inventaris sekolah	apakah sekolah memiliki ruang UKS yang memadai	> 12 m ²	
5	Keuangan dan pembiayaan sekolah mendukung manajemen yang kuat					
	Indikator: pemerintah memberikan dukungan dana secara rutin	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: RAPBS	apakah ada bantuan dana dari pemerintah	rutin, tidak rutin, tidak ada	Orang tua siswa dan Komite Sekolah puas dengan kondisi dan pengelolaan dana dalam RAPBS
	primer : wawancara mendalam	informan; Kepala Sekolah	bagaimana proses pendanaan dari pemerintah diperoleh	given, proposal, dll		

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 7)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah daerah setempat memberikan dukungan dana secara rutin	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: RAPBS	apakah ada bantuan dana dari pemerintah daerah	rutin, tidak rutin, tidak ada	
		primer : wawancara mendalam	informa: Kepala Sekolah	bagaimana pendanaan dari pemerintah daerah	given, proposal, dll	
	Lembaga swadaya masyarakat/swasta/donatur memberikan dukungan dana secara rutin	sekunder: studi dokumentasi	dokumen: RAPBS	apakah ada dukung pendanaan dari lembaga non pemerintah/swasta /donatur	rutin, tidak rutin, tidak ada	
		primer : wawancara mendalam	informan; Kepala Sekolah	bagaimana proses pendanaan dari lembaga non pemerintah/swasta /donatur	given, proposal, dll	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 8)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat setempat memberikan dukungan dana terhadap pendidikan di sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, orang tua siswa	apakah masyarakat setempat turut memberikan sumbangan financial ke sekolah	memberikan secara rutin; memberikan tidak secara rutin; tidak memberikan; memberikan jika ada permintaan dari sekolah	
	Orang tua siswa memberikan dukungan dana secara rutin terhadap pendidikan di sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, orang tua siswa	apakah orang tua turut memberikan sumbangan financial ke sekolah	memberikan secara rutin; memberikan tidak secara rutin; tidak memberikan; memberikan jika ada permintaan dari sekolah	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 9)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
6	Peranserta masyarakat dan mediasi oleh lembaga lain					
	Indikator:					
	adanya mediasi yang baik antara pemerintah dengan sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala Sekolah, pejabat pusat	bagaimana bentuk mediasi pemerintah terhadap pelayanan pendidikan di sekolah	Terjalin mediasi yang intens antara sekolah dengan pemerintah	
	terjadi mediasi yang baik antara pemerintah daerah dengan sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Dinas Pendidikan	bagaimana bentuk mediasi pemerintah daerah terhadap pelayanan pendidikan di sekolah	terjalin mediasi yang intens antara sekolah dengan pemerintah daerah	
	terjadi mediasi yang baik antara sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat dan orang tua	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, LSM, wakil orang tua murid	bagaimana bentuk mediasi antara sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat, dan orang tua murid.	terjalin mediasi yang intens antara sekolah dengan lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan lembaga non pemerintah lainnya	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 10)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pelayanan pendidikan bagi anak TKI memberikan manfaat bagi orang tua siswa</p> <p>Orang tua siswa memiliki pengetahuan tentang masa depan anaknya</p>	<p>primer : wawancara mendalam</p> <p>primer : wawancara mendalam</p>	<p>Informan: orang tua siswa</p> <p>Informan: orang tua siswa</p>	<p>apakah orang tua merasakan manfaat dari pendidikan anaknya di sekolah</p> <p>apakah orang tua siswa memberikan arah bagi masa depan anaknya</p>	<p>sangat bermanfaat; bermanfaat; tidak bermanfaat; sangat tidak bermanfaat</p> <p>ya; tidak</p>	
	Orang tua siswa optimistis terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: orang tua siswa	apakah orang tua siswa yakin akan keberhasilan anaknya melalui pendidikan di sekolah	ya; tidak	
	Pelayanan pendidikan bagi anak TKI memberikan manfaat bagi masyarakat setempat	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, tokoh masyarakat sekitar sekolah	apakah masyarakat setempat merasakan manfaat dari pelayanan pendidikan anak TKI	sangat bermanfaat; bermanfaat; tidak bermanfaat; sangat tidak bermanfaat	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 11)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat setempat memiliki pengetahuan tentang masa depan pendidikan anak-anak TKI	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, tokoh masyarakat sekitar sekolah	apakah masyarakat setempat memiliki pengetahuan tentang masa depan pendidikan anak-anak TKI	ya; tidak	
	Masyarakat setempat optimistis terhadap keberhasilan pelayanan pendidikan di sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Kepala sekolah, tokoh masyarakat sekitar sekolah	apakah masyarakat setempat yakin akan keberhasilan pelayanan pendidikan bagi anak TKI di sekolah	ya; tidak	
	Pelayanan pendidikan bagi anak TKI memberikan manfaat bagi pemerintah daerah	primer : wawancara mendalam	Informan: Dinas pendidikan kabupaten	apakah pemerintah daerah merasakan manfaat dari pelayanan terhadap anak TKI di sekolah	sangat bermanfaat; bermanfaat; tidak bermanfaat; sangat tidak bermanfaat	
	Pemerintah daerah memiliki pengetahuan tentang masa depan pendidikan anak-anak TKI di daerah Nunukan	primer : wawancara mendalam	Informan: Dinas pendidikan kabupaten	apakah pemerintah daerah memberikan arah bagi masa depan pendidikan anak-anak TKI	ya; tidak	
	Pemerintah daerah optimistis terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah	primer : wawancara mendalam	Informan: Dinas pendidikan kabupaten	apakah pemerintah daerah yakin akan keberhasilan pendidikan di sekolah	ya; tidak	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 12)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
7	Budaya dan lingkungan sekolah					
	Indikator: Adanya mekanisme partisipasi siswa dalam organisasi sekolah	primer: Wawancara mendalam	Informan: Kepala Sekolah dan siswa	Bagaimana mekanisme partisipasi siswa dalam organisasi	Mekanisme partisipasi siswa jelas; tidak jelas; tidak ada	Sekolah efektif memiliki mekanisme partisipasi siswa yang jelas
	Adanya tata tertib sekolah yang ditaati warga sekolah	primer; Wawancara mendalam	Informan: Kepala Sekolah; guru, siswa	Bagaimana warga sekolah menaati tata tertib yang ada	disiplin; tidak disiplin; tidak ada tata tertib	sekolah efektif memiliki kedisiplinan dalam menjalankan tata tertib
	Sekolah menyediakan bimbingan dan konseling kepada siswa dan menjalin kerjasama dengan pusat layanan masyarakat lainnya	primer: Wawancara mendalam	Informan: Kepala Sekolah	Bagaimana ketersediaan layanan bimbingan dan konseling dan kerjasama dengan pusat layanan masyarakat lainnya	tersedia layanan bimbingan karier dan kerjasama dengan pusat layanan masyarakat; tidak tersedia layanan bimbingan konseling dan kerjasama dengan pusat layanan masyarakat;	

Tabel 3.1. Operasionalisasi Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam
(lanjutan – 13)

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	INFORMASI YANG INGIN DIKETAHUI	UKURAN	JUDGEMENT
1	2	3	4	5	6	7
8	Pengawasan dan evaluasi					
	Indikator: Orang tua memahami dan puas dengan informasi tentang perkembangan belajar anaknya	primer: Wawancara mendalam	Informan: orang tua siswa	sejauh mana orang tua siswa memahami perkembangan belajar anaknya	Orang tua mendapatkan informasi akademik; sosial; personal dan fisik siswa	
	Siswa memahami bahwa hasil penilaian guru merupakan informasi tentang kemajuan belajar sebagai upaya membangun dan membimbing siswa	primer: Wawancara mendalam	Informan: siswa	sejauh mana siswa memahami hasil penilaian guru sebagai proses umpan balik	siswa mendapatkan umpan balik berupa penilaian sebagai upaya peningkatan prestasi siswa	

Sumber: Diolah dari MacBeath & Mortimore dan Permendiknas No. 19/2007

3.3. Seting Penelitian

Penelitian ini mengambil seting situasi atau wilayah yang merupakan wilayah perbatasan Negara yang menampung anak-anak TKI Sabah di kabupaten Nunukan. Alasan pemilihan lapangan penelitian ini Karena SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam merupakan lembaga pelayanan pendidikan yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan anak-anak TKI Sabah. Oleh karena itu perlu diungkapkan mengenai Efektivitas sekolah tersebut dalam memberikan pelayanan kepada anak TKI dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat maupun yang dapat mendukung pelayanan pendidikan pada kedua lembaga tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data dan menjadi segalanya dalam seluruh proses penelitian, dengan dibantu oleh pihak lain dalam pengumpulan data. Sekalipun penelitian kualitaitaif langkah-langkah penelitian tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun peneliti mempersiapkan langkah-langkah sebagai pedoman. Dalam penelitian ini akan mengikuti pendapat Usman dan Akbar (1996:83-86) memetakan enam langkah untuk memudahkan pelaksanaan penelitian yaitu: studi pendahuluan, pembuatan pradesign penelitian, seminar pra desing, penelitian lapangan, pengumpulan data, dan analisis data. Tahapan penelitian ini adalah:

1. Tahap Pralapangan
 - Menyusun Rancangan Penelitian
 - Memilih Lapangan Penelitian
 - Mengurus perijinan
 - Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - Memilih dan menetapkan nara sumber/informan
 - Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti membuka pemahaman terhadap subjek penelitian dan menjalin hubungan keakraban agar dalam pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh data dan informasi yang akurat dan objektif, kemudian dilakukan analisis data. Pada tahap ini dilakukan secara serentak dan bergulir.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan kesan visual (*visual image*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan keempat metode tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

Studi literature, yaitu teknis pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Studi dokumen, teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, Undang undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, pernyataan politik pejabat pemerintah yang terkait dengan pelayanan pendidikan anak TKI, serta dokumen atau sumber informasi lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Wawancara mendalam, yaitu tehnik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menggali data lebih mendalam dari nara sumber / informan terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk merekam persepsi dan opini tentang obyek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan para informan.

Pengamatan, dilakukan secara langsung oleh peneliti (pengamatan partisipasi) di lapangan, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Sekolah Fransisco Yashinta, dan SD Hidayatullah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung fenomena dari objek yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pelayanan publik terhadap anak-anak TKI di kedua Sekolah tersebut.

Dalam penelitian ini tidak disediakan instrument khusus dalam melakukan studi literature, namun hasil telaahannya disarikan dalam bagian kajian pustaka. Dari kajian literature dihasilkan berbagai informasi yang mendasarai kalim posisi masalah

penelitian yang menjadi perhatian dan method yang dikembangkan dalam melakukan penelitian.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dengan berbagai aspek terutama data guru, siswa, kurikulum, dan pembiayaan, serta hal lain yang terkait dengan layanan pendidikan.

Selanjutnya wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam informasi dalam berbagai aspek sehingga dapat memperluas cakrawala yang menjadi perhatian subjek penelitian. Untuk memudahkan dan mengarahkan pendalaman informasi dibuat rambu-rambu berupa pedoman wawancara mendalam tidak berstruktur. Untuk mempermudah pengolahan data hasil wawancara, peneliti atau pewawancara dilengkapi dengan recorder dan video camera untuk melengkapi informasi yang bersifat naratif. Hasil rekaman wawancara dan video merupakan pula bukti fisik untuk menguatkan hasil penelitian.

3.5. Instrumen Penelitian

- 1) Peneliti Sendiri
- 2) Pedoman observasi

Pedoman observasi dibuat untuk mengetahui Efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI.melalui dimensi input dan proses. Sehingga diperoleh gambaran tentang kekuatan input dan proses dalam mendorong tercapainya output yang diharapkan

- 3) Pedoman wawancara mendalam

Pedoman wawancara dibuat selain untuk mengetahui Efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI menurut persepsi informan, sekaligus sebagai alat konfirmasi data yang telah diperoleh sebelumnya.

3.6. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data merupakan bagian penting dalam penelitian. Pengolahan data ini dimaksudkan untuk memanfaatkan data yang diperoleh menjadi suatu bentuk

informasi yang bermanfaat. Pengolahan data penelitian ini terdiri dari pemrosesan satuan dan kategorisasi, yaitu:

Pemrosesan Satuan; Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber (wawancara, pengamatan, studi pustaka, dan dokumen). Selanjutnya membuat abstraksi dengan membuat rangkuman inti dan penghalusan data.

Kategorisasi dan validasi data; Kategorisasi dilaksanakan pada saat pengolahan dan analisis data. Kategorisasi disusun atas dasar kriteria, pikiran, intuisi tertentu terhadap data yang diperoleh, kemudian menempatkan data pada kategori masing-masing, misalnya kelompok input, proses, dan output.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian percaya dan dapat diterapkan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan dan pengecekan ulang. Proses triangulasi ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data yang telah diolah dengan informan dan informan kunci. Selain itu, pengujian keabsahan data didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dan kepastian sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat diterapkan pada semua konteks dalam populasi.

Penafsiran data dilakukan dengan cara yang telah dikumpulkan dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan, kemudian ditafsirkan dengan menghubungkan dengan konsep dan teori yang ada.

3.7. Pembatasan dan keterbatasan penelitian

Pembatasan penelitian ini adalah hanya untuk mengetahui Efektivitas Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI dan bagaimana mediasi dilakukan oleh lembaga lain: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut.

Keterbatasan penelitian ini adalah meliputi delapan faktor efektivitas sekolah yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi tidak terilustrasikan dengan baik. Selain itu, keterbatasan akan ketersediaan data sumber yang relevan dengan topik penelitian memungkinkan tingkat kedalaman hasil penelitian kurang optimal.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

Bagian ini mendeskripsikan tentang Kondisi Umum Kabupaten Nunukan, profile pendidikan Kabupaten Nunukan, Gambaran Umum tentang SD Katholik Fransisco Yashinta dan SDIT Nur Islam di Kabupaten Nunukan, dan Gambaran umum tentang sekolah untuk anak TKI.

4.1. Profil Wilayah Kabupaten Nunukan

Sebelum mengamati lebih jauh tentang sekolah untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, terlebih dahulu dalam bab ini diuraikan mengenai profil umum wilayah dan profil pendidikan Kabupaten Nunukan. Kondisi wilayah dan kondisi umum pendidikan di kabupaten tersebut dapat memberikan gambaran mengenai posisi pelayanan pendidikan untuk anak TKI di wilayah tersebut.

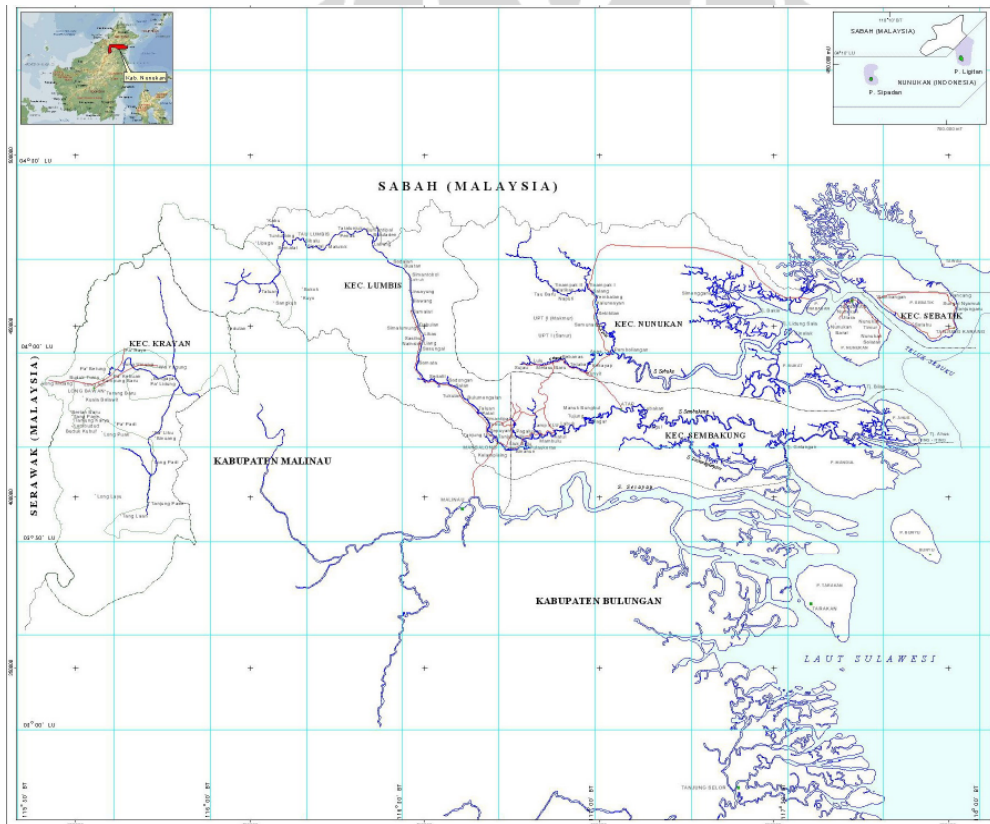
4.1.1. Aspek Geografis dan Kependudukan

Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Secara administratif Kabupaten Nunukan berdiri pada tahun 1999 yang meliputi delapan kecamatan. Pada tahun 2009 menjadi sembilan kecamatan karena adanya pemekaran kecamatan. Wilayah Kabupaten Nunukan mencakup Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Kerayan, dan Kecamatan Kerayan Selatan. Sebagian dari wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak.

Lima kecamatan berada di Pulau Kalimantan (*mainland*), dan empat kecamatan lainnya merupakan wilayah kepulauan, yang mendiami Pulau Nunukan, Pulau Sebatik dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Tinabasan, Ahus, Bukat, Itai, Iting-iting, Sinelak.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nunukan terbentang pada $115^{\circ} 22' 30''$ - $118^{\circ} 44' 55''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 30' 00''$ - $4^{\circ} 24' 55''$ Lintang Utara, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Malaysia Timur – Sabah
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
- Sebelah Barat : Negara Malaysia Timur – Serawak



Gambar 4.1. Peta orientasi wilayah Kabupaten Nunukan

Penduduk Kabupaten Nunukan terdiri dari penduduk asli, yaitu suku Dayak, suku Bulungan dan suku Tidung, dan pendatang yang menetap, yang umumnya berasal dari suku Bugis, Timor, Toraja, dan Tinghoa.

Sebagai kabupaten pemekaran yang secara etnis sangat heterogen, perkembangan dan pembangunan Kabupaten Nunukan, terutama di ibu kota kabupaten, cukup cepat dan dinamis. Walaupun demikian, Kabupaten Nunukan menghadapi kendala pengembangan wilayah karena beberapa wilayah sulit untuk dijangkau melalui jalan darat maupun laut. Kecamatan yang sulit dijangkau dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut adalah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, yang berbatasan darat dengan Malaysia.

Kabupaten Nunukan memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis secara ekonomi-politis. Kawasan perbatasan yang termasuk wilayah Sabah, Malaysia, secara *de facto* jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan perbatasan yang termasuk wilayah Indonesia. Hal ini dapat secara mudah dilihat di Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Nunukan dan Nunukan Selatan dibanding dengan distrik Sebatik dan Tawau, Malaysia.

Tiga kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, dan Nunukan merupakan jalur lintas batas Malaysia-Indonesia. Di wilayah ini, penduduk setempat dan pendatang menggunakan jalur Nunukan-Sebatik-Tawau dalam pelintasan batas kedua negara tersebut. Bahkan, Kabupaten Nunukan merupakan kawasan yang menjadi sasaran lokasi deportasi para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Sabah secara illegal.

4.1.2. Aspek Klimatologis

Kabupaten Nunukan terbentang di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis sehingga mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2003, Nunukan beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,6⁰C, suhu terendah 23,4⁰C pada bulan Agustus dan tertinggi 31,8⁰C pada bulan April. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas sesuai dengan topografi kecamatan Nunukan yang dekat dan dikelilingi laut.

Kabupaten Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2003 kelembaban udara cenderung tidak fluktuaktif,

berkisar antara 78% sampai dengan 87%. Rerata curah hujan 183,3 mm, yang tertinggi sebanyak 301,5 mm pada bulan Juni dan terendah 38,8 mm pada bulan Pebruari.

Rerata kecepatan angin cenderung stabil, yaitu 0,5 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 53% , terendah 38% pada bulan Desember dan tertinggi 79% pada bulan April.

4.1.3. Aspek Bentang Alam

Bentang alam Kabupaten Nunukan terbagi menjadi empat bagian, yaitu bentang alam dataran rendah, daerah bergelombang, perbukitan, dan pegunungan. Penjelasan masing-masing bentang alam tersebut adalah sebagai berikut :

Bentang Alam Dataran Rendah: bentang alam ini meliputi hampir 5% dari seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Terletak di daerah pesisir pantai dan daerah aliran sungai utama. Elevasi bentang tersebut mencapai 25 meter di atas permukaan laut, yang ditumbuhi oleh flora pertanian lahan basah, hutan rawa bakau, dan flora pertanian lahan kering serta pemukiman pedesaan.

Bentang Alam Daerah Bergelombang hingga Hampir Datar: bentang alam ini meliputi sekitar 5% Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sembakung, di sekitar daerah aliran sungai Sebuku dan daerah aliran sungai Sembakung.

Bentang Alam Perbukitan: bentang alam ini meliputi hampir 45% menempati Kabupaten Nunukan, yang terletak di sekitar Long Bawan, Mansalong, dengan elevasi dari 25 meter hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Relief permukaan dari landai hingga curam.

Bentang Alam Pegunungan: bentang alam ini meliputi hampir 35% dari luas Kabupaten Nunukan dengan elevasi dari 1.200 meter hingga 2.250 meter di atas permukaan laut, yang relatif curam. Gunung-gunung yang ada di dalamnya di antaranya adalah Gunung Harun, G.Titak, G. Telapak, G. Pinggaulun, G. Bantuantalau, dan G. Maliat.

4.1.4. Aspek Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan (*land use*) di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dalam sudut pandang penggunaan lahan secara wilayah (*regional*), dengan tingkat kedetailannya dalam skala wilayah sesuai dengan dokumen di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2004, di bagi menjadi 5 fungsi kawasan yaitu kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Kawasan Budidaya non Kehutanan (KBNK), Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pantai Berhutan Bakau dan Kawasan Penyangga Perbatasan (*Buffer Zone*). Sejauh ini, penggunaan lahan secara detail untuk setiap kawasan belum dapat dipaparkan secara spesifik karena data berupa pemetaan secara teknis tata ruang yang menjabarkan penggunaan lahan hingga skala yang lebih detail belum dibuat. Namun demikian secara umum penggunaan lahan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kawasan terbangun (*Built up area*) dan kawasan yang terbentuk Secara alamiah (*non Built up area*) dan kawasan khusus perbatasan berupa kawasan penyangga (*Buffer zone*).

4.2. Profil Pendidikan Kabupaten Nunukan

Perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap penyelenggaraan pendidikan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan berbagai jenjang dan jenis pendidikan serta dilakukannya upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru. Bentuk-bentuk pelayanan pendidikan diberikan baik melalui pendidikan formal sekolah negeri dan swasta serta pendidikan non formal melalui penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti paket A, B dan C.

Layanan pendidikan tersebut, selain untuk penduduk setempat juga diperuntukan bagi warga pendatang, terutama di Kecamatan Nunukan, Sebatik dan Sebatik Barat yang merupakan pintu perlintasan dengan negara Malaysia. Selain itu, kesulitan anak-anak TKI untuk memperoleh pendidikan di Malaysia menjadikan Nunukan sebagai salah satu tujuan yang dipilih oleh TKI untuk menyekolahkan anaknya di wilayah Indonesia, yaitu di Kabupaten Nunukan. Hal ini memunculkan masalah tersendiri bagi Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk

anak-anak tersebut di wilayah Nunukan. Secara umum, sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 jumlah sarana pendidikan untuk jenjang Taman Kanak Kanak hingga Sekolah Menengah, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Nasional secara kuantitatif mengalami perkembangan. Pada tahun 2006 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 TK, 125 SD Negeri dan 15 SD Swasta, 20 SLTP N dan 8 SLTP Swasta, 13 SLTP Satu Atap dan Terbuka, 7 SMU Negeri, 10 SMU Swasta dan 2 SMKN. Peningkatan jumlah sarana pendidikan 2006 – 2009 sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1. Sarana Pendidikan tahun 2006 - 2009

TAHUN	JUMLAH SEKOLAH				JUMLAH
	TK	SD	SMP	SMA/SMK	
2006	21	140	41	19	221
2007	24	139	39	19	222
2008	25	141	46	19	232
2009	30	138	48	17	231

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Pengurangan jumlah pada jenjang Sekolah Dasar dikarenakan adanya regrouping sekolah yang jumlah muridnya sangat berkurang. Hal lain yang merupakan penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga pengajar yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban kerja seorang guru terhadap muridnya. Rasio ini juga mencerminkan mutu pembelajaran di kelas, karena semakin besar angka ini berarti beban kerja seorang guru semakin berat, pengawasan atau kontrol terhadap siswa akan berkurang.

Tabel 4.2. Jumlah Guru di Kabupaten Nunukan tahun 2007 - 2009

TAHUN	JUMLAH GURU				
	TK	SD	SMP	SMA	JUMLAH
2007	61	1.160	363	166	1.750
2008	73	1.053	505	303	1.934
2009	98	1.210	640	361	2.309

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan: 2009

Rasio antara murid:guru untuk jenjang SD tahun 2007 mengalami penurunan, baik untuk SD Negeri maupun SD Swasta mengalami perubahan. Rasio murid guru untuk SD Negeri sebesar 19,82 artinya seorang guru bertanggungjawab terhadap 19 murid, sedang untuk SD Swasta rasio guru murid sebesar 17,07. Penurunan rasio guru murid menunjukkan bahwa beban kerja seorang guru juga menurun. Pada tingkat SLTP Negeri menunjukkan rasio murid-guru sebesar 17,23. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya pada jenjang SLTA Negeri juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 rasio murid-guru 14,55 meningkat dari tahun sebelumnya 13,30.

Tabel 4.3. Jumlah Siswa di Kabupaten Nunukan

TAHUN	JUMLAH SISWA				
	TK	SD	SMP	SMA	JUMLAH
2007	1.097	18.754	5.844	3.458	29.153
2008	1.100	20.416	6.540	3.809	31.865
2009	1.268	22.271	7.222	4.540	35.301

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Jumlah siswa di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan pada semua jenjang. Sehingga angka partisipasi kasar pada semua jenjang pendidikan juga

meningkat. Pada tahun 2007 peningkatan angka partisipasi kasar pada jenjang Sekolah Dasar meningkat ..% dari tahun 2006. Tahun 2008 menjadi 97,58% dan tahun 2009 101,52%. demikian pula pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4. Capaian Angka Partisipasi Kasar tahun 2006 - 2009

TAHUN	ANGKA PARTISIPASI KASAR			
	TK	SD	SMP	SMA
2008	-	97,58	76,46	59,09
2009	-	101,52	89,48	61,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

4.3. Pelayanan Pendidikan untuk Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pemerintah daerah setempat tidak mengeluarkan kebijakan khusus tentang pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI, namun sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Nunukan telah menampung dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI. Jumlah anak TKI di kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan tersebar di 42 sekolah, terdiri dari 33 Sekolah Dasar, 6 Sekolah Menengah Pertama, dan 3 Sekolah Menengah Atas.

Pada umumnya pekerjaan orang tua murid adalah buruh, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.32 dan Gambar 4.7. Hal ini bersesuaian selain dengan profesi orang tua anak TKI yang bekerja di Malaysia adalah sebagai buruh juga ada kontribusi dari orang tua murid setempat yang orang tuanya berprofesi sebagai buruh.

Pada tahun ajaran 2008/2009 jumlah seluruh murid berstatus sebagai anak TKI sebanyak 1.867 murid. Angka tersebut sekitar 5,1% dari seluruh murid di Kabupaten Nunukan. Dua diantara beberapa sekolah yang menampung anak-anak TKI adalah SD Katolik Fransisco Yashinta dan SDIT Nur Islam. Kedua lembaga tersebut masing-masing berada di bawah Yayasan Gabriel Manek dan Yayasan

Hidayatullah. Keduanya secara khusus memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI dengan perlakuan berbeda dari sekolah negeri. Perbedaan tersebut terutama adalah dalam rekrutmen murid dan pelayanan yang diberikan. Baik SD Katolik Fransisco Yashinta maupun SDIT Nur Islam menyediakan sarana tempat tinggal untuk muridnya berupa asrama atau pemondokan. Jumlah anak TKI yang mendapatkan pelayanan fasilitas asrama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Penghuni Asrama SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam

NO	UMUR	ANAK TKI		NON TKI	
		SD FY	SD NI	SD FY	SD NI
1.	0 – 5,0	3	1	-	-
2.	5,1 – 6,0	-	1	-	10
3.	6,1 – 10,0	10	20	-	12
4.	10,1 – 15,0	14	30	-	-
5.	➤ 15	7	-	-	-
JUMLAH		34	52	-	22

Sumber: SD Fransisco Yashinta

SD Katolik Fransisco Yashinta

SD Katholik Fransisco Yashinta adalah sebuah Lembaga Pendidikan Katholik yang berada di bawah Yayasan Gabriel Manek yang memberikan pelayanan pendidikan formal dan membina pendidikan non formal bagi anak-anak TKI di Kabupaten Nunukan. Identitas lengkap sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

- Nama Sekolah : SD Katolik Fransisco Yashinta
- N.I.S : 30402645
- N.S.S : 102160804019
- Provinsi : Kalimantan Timur
- Kecamatan : Nunukan

- Desa/Kelurahan : Nunukan Selatan
- Jalan dan Nomor : P. Antasari No. Rt 01
- Kode Pos : 77482
- Telepon : 0556-2025343
- Daerah : Perkotaan
- Status Sekolah : Swasta
- Kelompok Sekolah : Inti
- Akreditasi : tahun
- Tahun berdiri : 2002
- Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi dan Siang
- Bangunan Sekolah : Milik Sendiri
- Luas Bangunan : 9 X 42 M2
- Lokasi Sekolah : Sei Sembilan
- Jarak ke Pusat Kecamatan : 3 km
- Terletak pada lintas : Kabupaten
- Organisasi Penyelenggara : Yayasan

Pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah siswa kelas I sampai dengan kelas VI sebanyak 267 siswa, terdiri dari 159 siswa laki-laki dan 108 siswa perempuan. Usia siswa antara 7 tahun hingga yang tertua 17 tahun. Perkembangan jumlah murid SD Fransisco Yashinta sebagaimana tabel 4.4.

Tabel 4.6. Perkembangan jumlah murid SD Fransisco Yashinta tahun 2001 - 2010

KELAS	L/P	TAHUN AJARAN								
		2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	L	5	18	21	45	20	36	33	31	22
	P	14	15	17	36	16	27	15	17	19
II	L	0	7	22	27	22	32	22	25	29
	P	0	20	11	19	17	23	20	10	19
III	L	0	0	14	20	26	31	24	23	26
	P	0	0	15	14	19	20	21	22	12
IV	L	0	0	0	18	22	17	28	29	25
	P	0	0	0	12	14	11	12	19	22
V	L	0	0	0	14	21	22	12	29	29
	P	0	0	0	16	12	16	16	14	17
VI	L	0	0	0	0	13	15	21	10	28
	P	0	0	0	0	15	14	11	19	19
Jumlah (L/P)	L	5	25	57	124	124	153	140	147	159
	P	14	35	43	97	93	111	95	101	108
Jumlah siswa		19	60	100	221	217	264	235	248	267
Jumlah anak TKI		18	56	87	98	107	122	123	155	189
Persentase		95%	93%	87%	44%	49%	46%	52%	63%	71%

Sumber data; Laporan Sekolah tahun 2002 - 2010

Sekolah tersebut didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan berupa luas tanah milik sendiri 3000 meter persegi dan luas bangunan 9 X 48 meter serta lapangan olah raga berukuran 20 X 10 meter. Ruang belajar dengan luas masing-masing 56 meter persegi sebanyak 6 ruang. Namun hanya 5 ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Satu ruang lainnya disekat menjadi tiga

bilik masing-masing untuk ruang guru, ruang Kepala Sekolah SD dan ruang Kepala Sekolah SMP. Selain ruang kelas, sarana ibadah berupa sebuah gereja berada di samping gedung sekolah. Gereja tersebut terbuat dari dinding kayu dalam bentuk rumah panggung. Sarana penting lainnya adalah satu kamar mandi guru, dan dua kamar mandi/WC siswa, gudang, klinik kesehatan, dan asrama siswa, serta rumah guru.

Bangunan asrama terletak di belakang bangunan rumah guru. Kelengkapan asrama terdiri dari empat kamar: dua kamar untuk siswa putri dan dua kamar untuk siswa putra. Pada setiap kamar terdapat antara enam sampai dengan delapan tempat tidur bertingkat dengan jumlah penghuni dua belas sampai dengan lima belas siswa. Namun jumlah penghuni asrama saat ini sebanyak 89 orang. Untuk meningkatkan pelayanan asrama, saat ini sedang dalam penyelesaian satu bangun asrama yang melekat dengan asrama yang lama terdiri dari tiga kamar dan satu ruangan untuk makan serta belajar. Dapur sebagai sarana logistik siswa yang tinggal di asrama berada di depan asrama dengan daya tampung sekali makan 60 sampai dengan 70 orang. Di dalam asrama tidak dilengkapi meja belajar dan hanya beberapa almari sebagai tempat penyimpanan buku.

Tabel 4.7. Ketersediaan sarana dan prasarana

No	Jenis Ruang	Baik		Rusak Ringan	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
	Ruang Kelas/Teori	5	7X8	1	
	Ruang Kepala Sekolah	1			
	Ruang Guru	1			
	Ruang TU	1	3X4		
	Kamar Mandi/WC Siswa	2	2X3	1	
	Ruang Gudang	1			
	Rumah Ibadah	1	20X25		
	Rumah Dinas Guru				
	Ruang Penjaga Sekolah				
	Asrama Siswa	1			

Sumber; Laporan SD Fransisco Yashinta

Tabel 4.8. Keadaan Guru SDK Fransisco Yashinta Tahun 2009/2010

No	Jabatan	Tugas	Jam	Kualifikasi	Status
1.	Kepala Sekolah	-	-	PGSD-D2	Yayasan
2.	Guru Kelas	Kelas I	25	PGSD – D2	Yayasan
3.	Guru Kelas	Kelas VI B	30	PGSD-D2	Yayasan
4.	Guru Kelas	Kelas II	25	PGSD-D2	Yayasan
5.	Guru Kelas	Kelas VI A	32	SPG	Kontrak
6.	Guru Kelas	Kelas V	30	S1	Honorar
7.	Guru Kelas	Kelas III	28	SPG	Honorar
8.	Guru Kelas	Kelas IV	28	SPG	Honorar
9.	Guru Mulok	Kelas I - VI	21	S1	Honorar
10.	Guru Penjas	Kelas I - VI	28	SMA	Honorar
11.	Guru Peng	Kelas I - III	24	D2	Honorar
12.	Guru Peng	Kelas IV-VI	24	SMA	Honorar

Sumber: Laporan Bulanan SD Fransisco Yashinta

SD Nur Islam

SD Nur Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memberikan pelayanan pendidikan formal dan membina pendidikan non formal bagi anak-anak TKI. Sekolah Dasar Nur Islam adalah sekolah swasta di bawah Yayasan Hidayatullah, dengan alamat di Jl. Pesantren Hidayatullah RT 02 Selisung, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Identitas lengkap dari sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

- Nama Sekolah : SD Nur Islam
- N.I.S : 30402645
- N.S.S : 102160804019
- Provinsi : Kalimantan Timur

- Kecamatan : Nunukan
- Desa/Kelurahan : Nunukan Selatan
- Jalan dan Nomor : Jl. Pesantren Hidayatullah
- Kode Pos : 77482
- Telepon : -
- Daerah : Perkotaan
- Status Sekolah : Swasta
- Kelompok Sekolah : Inti
- Akreditasi : tahun
- Tahun berdiri : 2002
- Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi dan Siang
- Bangunan Sekolah : Milik Sendiri
- Luas Bangunan : +/- 112 meter persegi
- Lokasi Sekolah : Sei Sembilan
- Jarak ke Pusat Kecamatan : 3 km
- Terletak pada lintas : Kabupaten
- Organisasi Penyelenggara : Yayasan

Lembaga pendidikan ini mulai beroperasi di Nunukan pada tahun 1996. Pendidikan formal baru berjalan sejak tahun 2002. Pada tahun 2002 jumlah siswa baru 10 orang. Pada tahun 2009 jumlah siswa 143 orang 56 siswa diantaranya adalah anak-anak TKI yang tinggal di asrama. SDIT Nur Islam menerapkan sistem pembelajaran yang dipadukan dengan pesantren. Adapun perkembangan jumlah murid sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai pada Tabel 4.7;

Tabel 4.9. Perkembangan Jumlah Murid SDIT Nur Islam Tahun 2002 - 2010

KELAS	L/P	TAHUN AJARAN								
		2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	L	0	3	0	23	6	12	14	12	12
	P	0	7	0	17	17	18	20	18	13
II	L	0	0	0	11	12	14	14	15	15
	P	0	0	0	7	7	13	13	13	14
III	L	0	0	0	12	10	12	11	11	21
	P	0	0	0	2	9	7	7	7	9
IV	L	0	0	0	4	10	7	6	7	11
	P	0	0	0	2	2	11	9	11	14
V	L	0	0	0	5	2	8	8	8	8
	P	0	0	0	4	6	6	7	6	9
VI	L	0	0	0	0	3	21	30	10	6
	P	0	0	0	0	4	7	12	2	11
Jumlah (L/P)	L	0	7	0	55	43	74	83	63	73
	P	0	3	0	32	45	62	68	57	70
Jumlah siswa		0	10	0	87	88	136	151	120	143
Jumlah anak TKI		0	0	0	0	0	40	40	57	56
Persentase		0	0	0	0	0	29%	26%	48%	39%

Sumber data; Laporan Sekolah 2002 – 2010

Sarana yang tersedia berupa tanah luas tujuh hektar terdiri tanah wakaf dan tanah yang dibeli oleh Yayasan. Empat hektar tanah dipergunakan untuk budidaya tanaman sebagai media pembelajaran keterampilan pertanian. Hasil panen berupa sayur mayur, umbi-umbian, padi dan tanaman lainnya yang dimanfaatkan untuk bahan makanan bagi para santri. Usaha tersebut dapat meringankan beban belanja logistik terutama sayur mayur dan lauk pauk. Selain usaha pertanian tanaman, siswa dan guru juga mengelola usaha tambak ikan bandeng, lele, peternakan ayam, sapi, dan kebun kelapa. Secara geografis lokasi sekolah ini sangat strategis karena berada di pinggir pantai, dan akses jalan ke kota sangat mudah, dengan kondisi baik.

Sarana belajar berupa ruang kelas sebanyak enam ruang, sebuah masjid sebagai tempat ibadah, ruang kantor guru, dan satu buah asrama siswa. Ruang belajar masing-masing berukuran 7 X 6 meter = 42 meter persegi dilengkapi dengan meja belajar dan kursi plastik untuk kelas III, IV, V, dan VI. Sementara untuk kelas I dan II sengaja diberikan bangku pendek ukuran satu meter persegi tanpa kursi untuk memberikan kebebasan gerak siswa. Ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang tata usaha berada dalam satu ruangan. Kondisi bangunan ruangan tersebut sangat baik, intensitas cahaya di dalam ruangan cukup. Kondisi meubeler yang ada di dalam ruang tersebut cukup memadai.

SDIT Nur Islam menerapkan kurikulum tingkat satuan pelajaran. Namun demikian di sekolah tersebut tidak ditemukan adanya dokumen atau buku kurikulum. Sebagian besar guru mengajar tanpa menyusun silabus dan rencana pengajaran terlebih dahulu. Penyampaian pelajaran hanya berpegang pada buku pegangan guru.

Sarana olah raga tempat bermain yang tersedia dikelilingi oleh bangunan sekolah masjid dan asrama luasnya mencapai +/- 5000 meter persegi.

Sementara itu kondisi asrama siswa yang terdiri dari tiga bangunan induk, masing-masing untuk siswa putra SD, SMP dan asrama putri yang letaknya terpisah cukup jauh. Asrama putra untuk siswa sekolah dasar dengan kapasitas 36 orang dihuni oleh 29 siswa, sedang asrama putri dengan kapasitas 70 orang dihuni oleh 27 siswa sekolah dasar dan 20 siswa SMP. Baik asrama putra maupun putri tidak ada ibu asuh atau bapak asrama yang mengawasi. Di dalam asrama tidak ada tempat tidur

sehingga penghuni asrama tidur beralaskan lantai. Asrama putra terdiri dari tiga kamar masing-masing menampung 12 orang. Kamar putra dilengkapi dengan lemari kayu dan sebuah rak sepatu. Adapun penghuni asrama dengan kategori umur sebagai berikut:

Kebutuhan makan sehari-hari dilayani oleh sebuah dapur umum yang menyediakan makan untuk mereka yang tinggal di asrama. Namun asrama tersebut tidak dilengkapi dengan ruang makan. Sehingga pada jam makan anak-anak harus mengambil ke dapur dan membawa piring mereka ke kamar masing-masing.

Sebuah bangunan masjid berada di depan area kompleks asrama, walaupun kondisinya belum selesai dibangun namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan peribadatan. Bangunan penunjang lainnya adalah ruang koperasi, ruang tamu dan toilet guru dan siswa masing-masing satu unit.

4.4. Sarana Prasarana Pembelajaran dan Ruang Penunjang Lainnya

SD Nur Islam

Tabel 4.10. Ketersediaan sarana dan prasarana

No	Jenis Ruang	Baik		Rusak Ringan	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
	Ruang Kelas/Teori	6	7X8 m	6	
	Ruang Koperasi	1	3x5		
	Ruang Kepala Sekolah	1	3x4		
	Ruang Guru	1	3X4		
	Ruang TU	1	3X4		
	Kamar Mandi/WC Siswa	1	2X3	1	
	Rumah Ibadah	1	20X25		
	Asrama Siswa	4	6X12	4	
	Unit Produksi				

Sumber; Laporan SD Nur Islam

Tabel 4.11. Keadaan Guru SDIT Nur Islam Tahun 2009/2010

No	Jabatan	Tugas	Jam	Kualifikasi	Status
1.	Kepala Sekolah	-	-	S1	Yayasan
2.	Guru Kelas	Kelas I		SMA	Yayasan
3.	Guru Kelas	Kelas II		SMA	Yayasan
4.	Guru Kelas	Kelas III		SMEA	Yayasan
5.	Guru Kelas	Kelas IV		SMA	Yayasan
6.	Guru Kelas	Kelas V		SMA	Yayasan
7.	Guru Kelas	Kelas VI		S1	Yayasan
8.	Guru Mapel	Kelas IV		S1	Yayasan
9.	Guru Mapel	Kelas I - VI		KMA	Yayasan
10.	Guru Mapel	Kelas I - VI		S1	Yayasan

Sumber: Laporan bulanan SD Nur Islam

BAB 5

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Sekolah untuk anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Nunukan merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah yayasan berbasis agama. Kedua sekolah tersebut memiliki otoritas penuh dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Mereka terbuka untuk menerima intervensi dari luar. Bentuk intervensi dapat berupa materiil dan non materiil. Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah di Kabupaten Nunukan, secara fisik kedua sekolah tersebut memiliki sarana prasarana di bawah sekolah negeri. Untuk melihat sejauh mana Efektivitas lembaga tersebut, peneliti mendapatkan beberapa rujukan mengenai karakteristik sekolah efektif.

California Centre for Effective Schools (CCES) menyebutkan tujuh faktor yang turut menentukan Efektivitas sekolah, yaitu: (1) *A clear and focused mission*; (2) *High expectation for success*; (3) *Instructional leadership*; (4) *Frequent monitoring of student progress*; (5) *opportunity to learn and student time to task*; (6) *safe and orderly environment*; (7) *home/school relation*.

Sementara itu dari hasil metaanalisis yang dilakukan MacBeath & Mortimore (2001) menyebutkan Sembilan karakteristik/faktor sekolah efektif, yaitu (1) visi dan misi yang jelas; (2) kepala sekolah yang profesional; (3) guru yang profesional; (4) lingkungan yang kondusif; (5) ramah siswa; (6) manajemen yang kuat; (7) kurikulum yang luas dan berimbang; (8) penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna; dan (9) pelibatan orang tua dan masyarakat yang tinggi.

Dengan memperhatikan hasil kajian sebelumnya, penelitian tentang Efektivitas sekolah untuk anak TKI ini dapat dijelaskan melalui faktor-faktor yang diamati sebagai berikut; 1) Perencanaan program yang merupakan penjabaran visi, misi sekolah; 2) Penerapan kurikulum sekolah; 3) Tenaga pendidik yang meliputi profesionalisme guru dan kepala sekolah; 4) Pengawasan dan evaluasi; 5) Budaya dan lingkungan sekolah; 6) Sarana dan prasarana sekolah; 7) Keuangan dan pembiayaan; 8) Peran serta masyarakat dan mediasi oleh lembaga lain;

Selanjutnya pada bagian ini akan dibahas masing-masing faktor untuk menganalisis sejauhmana Efektivitas Sekolah untuk anak-anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam serta mediasi lembaga lain terhadap pelayanan pendidikan tersebut.

5.1. Sekolah Dasar Fransisco Yashinta

Keberadaan SD Fransisco Yashinta sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara Bagian Sabah Malaysia. Sebagian besar siswa yang dilayani adalah berasal dari Nusa Tenggara Timur dan sebagian kecil Toraja. Oleh karena itulah sekolah tersebut memiliki visi yang kuat untuk memberikan pelayanan kepada anak TKI di kabupaten Nunukan. Dari sembilan faktor yang dikaji, Efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI pada sekolah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.1.1. Perencanaan program yang merupakan penjabaran visi, misi sekolah.

Penetapan tujuan lembaga tidak bisa terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi lembaga. Selain menetapkan visi dan misi satuan pendidikan dasar dan menengah harus menetapkan tujuan dan mengembangkannya. Pencapaian tujuan lembaga dilakukan melalui pelaksanaan program kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Pelaksanaan rencana kerja dimaksud diharapkan untuk mencapai hasil yang optimal Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja didukung pula oleh struktur organisasi yang membagi pekerjaan secara jelas, pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel, pengaturan berbagai bidang kesiswaan, kurikulum-pengajaran, sarana dan prasarana, pembiayaan, budaya lingkungan, dan peran serta masyarakat.

SD Fransisco Yashinta telah memiliki visi lembaga yaitu menjadi sekolah beriman yang dewasa, mandiri dan terpercaya di masyarakat dalam mencerdaskan bangsa dalam rangka mensukseskan wajib belajar dengan meneladani Bunda Maria ibu kehidupan.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan lembaga tersebut memiliki misi untuk memiliki generasi unggul di bidang Iptek, menyiapkan kader-kader kerajaan

Allah dalam berbagai bidang kehidupan yang memiliki kepekaan sosial, hati nurani yang jernih, cerdas, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat, memajukan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam bidang pendidikan agama, pendidikan umum, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meraih prestasi akademik dan non akademik minimal tingkat kabupaten, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, mengamalkan hasil pembelajaran agama hasil proses kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan, menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat dan gereja, dan merangkul dan menolong anak-anak TKI.

Dalam sosialisasi terhadap visi dan misi sekolah, kepala sekolah mengingatkan kembali kepada guru pada saat pertemuan.

“kadang dalam pertemuan kita ingatkan apa yang menjadi visi dan misi daripada sekolah ini. Sehingga dalam imbalanced gaji mereka tidak menuntut”.

Ditinjau dari perspektif manajemen (Djma'an Satori), fungsi pendidikan (Sergiovani) dan hasil penelitian CCES maupun MacBeath dan Mortimore SD Fransisco Yashinta telah merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga secara jelas. Hal ini akan turut menentukan keberhasilan lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan kepada anak TKI. Tujuan akademik yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan pendidikan pendidikan nasional dan empat pilar pendidikan Delors.

5.1.2. Penerapan kurikulum sekolah

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Atas dasar hal tersebut maka perlu dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sesuai dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kurikulum yang diterapkan di SD Katolik Fransisco Yashinta telah disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari sentralisasi ke desentralisasi. Kurikulum ini disusun oleh satu team penyusun yang terdiri atas unsur sekolah dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta dengan bimbingan narasumber ahli pendidikan dan pembelajaran dari Dinas Pendidikan dan Yayasan. Pengembangan kurikulum tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- Beragam dan terpadu
- Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- Menyeluruh dan berkesinambungan;
- Belajar sepanjang hayat; dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, diharapkan dapat berlangsung secara efektif yang mampu membangkitkan aktivitas dan kreatifitas anak. Hal ini menekankan kepada para pendidik agar mampu menciptakan pelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan bagi anak, sehingga anak betah di sekolah. Untuk itu, sekolah tersebut menghendaki agar pembelajaran memperhatikan beberapa hal, antara lain bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan kreativitas dan aktivitas anak, efektif, demokratis, menantang, menyenangkan dan mengasyikan.

Tabel 5.1. Struktur Kurikulum menurut Kelompok Mata Pelajaran di SD Fransisco Yashinta

No	Kelompok Mata pelajaran	Cakupan
1	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia mencakup etika , budi pekerti , atau moral sebagai perwujudan dari Pendidikan agama.
2	Kewarganegaraan dan Kepribadian	<p>Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan anak didik akan status , hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.</p> <p>Kesadarn dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak – hak asasi manusia kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak , dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>

Lanjutan Tabel 5.1.

3	Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD dimaksudkan untuk mengenal , menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi , serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berprilaku ilmiah yang kritis , Kreatif dan mandiri.
4	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas , kemampuan yang mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan dan ekspresi , baik kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup , maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5	Jasmani , Olahraga dan kesehatan	Kelompok mata pelajaran Jasmani , Olahraga dan kesehatan pada SD dimaksud untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran , sikap dan perilaku hidup sehat bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV / AIDS, demam berdarah, menabur, dan penyakit yang potensial untuk mewabah.

Sumber: KTSP SD Fransisco Yashinta

Cakupan pada masing-masing kelompok mata pelajaran tersebut sesuai dengan standar kurikulum tingkat sekolah dasar. Artinya bahwa sekolah tersebut

dalam melakukan layanan pendidikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun demikian, sebagai lembaga pendidikan yang sebagian besar siswanya adalah anak TKI yang memiliki kekhasan perilaku dan kultur, kurikulum sekolah tersebut tidak menunjukkan kekhasan atau keunggulan dari sekolah normal lainnya. Namun pada penanaman sikap berbangsa dan bernegara selain memberikan pelajaran berupa teori di dalam kelas mengingat sebagian siswa sekolah tersebut dilahirkan dan dibesarkan di Sabah, Malaysia sebagai anak TKI maka sekolah menganjurkan agar siswa melekatkan merah putih pada baju bagian depan. Hal itu dimaksudkan untuk menanamkan rasa nasionalisme.

Sementara itu, keberhasilan capaian akademik siswa selain dilihat dari persentase kelulusan tiga tahun terakhir yang selalu 100%, prestasi akademik juga digambarkan melalui prestasi siswa terhadap standar ketuntasan belajar untuk mata pelajaran tertentu dalam kurun waktu tertentu. Hasil ketuntasan belajar siswa dilihat dari pencapaian nilai ujian sekolah pada tahun 2006/2007 terhadap lima pelajaran pokok yaitu Bahasa Indonesia 82,1%, Matematika 75%, Ilmu Pengetahuan Alam 64,3%, Pendidikan Kewarganegaraan 64,4%, dan Ilmu Pengetahuan Sosial 70,14% siswa tuntas belajar. Pada tahun ajaran 2006/2007 tersebut siswa yang paling banyak tidak tuntas belajar adalah untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 45,7%.

Pada tahun 2007/2008 tingkat ketuntasan belajar terhadap mata pelajaran yang sama adalah Bahasa Indonesia 96,9%, Matematika 21,9%, Ilmu Pengetahuan Alam 84,4%, Pendidikan Kewarganegaraan 53,1%, Ilmu Pengetahuan Sosial 100% siswa tuntas belajar. Pada tahun ajaran tersebut siswa terbanyak tidak tuntas belajar untuk pelajaran Matematika yaitu sebesar 78,1%.

Tingkat kelulusan siswa dalam yang mencapai 100% tersebut menunjukkan bahwa output pelayanan pendidikan dapat dikatakan efektif. Namun demikian jika ditinjau dari ketuntasan belajar yang mensyaratkan bahwa pembelajaran yang produktif bila keberhasilan siswa mencapai 80-85%, maka pada tahun 2006/2007 dan 2007/2008 terhadap lima mata pelajaran pokok, menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketuntasan belajar siswa dari satu mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia pada

tahun 2006/2007 menjadi tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekalipun demikian terjadi penurunan prestasi cukup serius pada mata pelajaran Matematika.

5.1.3. Tenaga pendidik

Ketersediaan tenaga pendidik dan profesionalismenya turut menentukan Efektivitas sekolah (MacBeath & Mortimore; 2001). Selain kedua hal tersebut kualifikasi akademik dan kesejahteraan tenaga pendidik juga merupakan faktor yang diamati dalam penelitian ini. Paradigma modern menyebutkan bahwa kesejahteraan yang berkaitan dengan profesi bukan hanya diukur dari besarnya materi yang diperoleh sebagai upah profesi, namun menyangkut hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Kesempatan mengelola keluarga, keterjangkauan lokasi pekerjaan dari tempat tinggal, kesempatan berekreasi, dan fasilitas kesehatan merupakan indikator tingkat kesejahteraan guru sebagai pekerja di sekolah. Kualifikasi akademik atau tingkat pendidikan guru sangat menentukan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Dengan terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik, sebuah lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan secara efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Semua guru SD Fransisco Yashinta adalah pegawai swasta, dengan komposisi 60% sebagai tenaga honorer dan 40% sebagai pegawai yayasan. Kualifikasi akademik yang dimiliki 75% memenuhi kualifikasi akademik karena memiliki sertifikat untuk mengajar dan 25% tidak memenuhi kualifikasi akademik.

Upaya sekolah ataupun yayasan untuk meningkatkan kualitas guru masih sangat rendah. Kegiatan peningkatan kualitas guru melalui penataran atau pelatihan hanya menunggu undangan dari Dinas Pendidikan Setempat. Pengembangan diri guru sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan oleh guru di SD Fransisco Yashinta. Pernyataan Kepala Sekolah, *“kalau kita diminta, kita kirim”*.

Tabel 5.2. Rekapitulasi jumlah tenaga pendidik di SD Fransisco Yashinta

No	Status	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Guru Kelas	7 orang
3	Guru Pendidikan Jasmani	1 orang
4	Guru Bahasa Inggris	1 orang
5	Guru Peng	2 orang
Jumlah		12 orang

Sumber: Laporan Bulanan SD Fransisco Yashinta

SD Fransisco Yashinta melakukan hal-hal yang mendukung penyelenggaraan pealyanan pendidikan efektif. Hal itu dilakukan melalui tersedianya rincian kualifikasi dan pengalaman guru di ruang guru, guru merasa nyaman di sekolah, dan guru dipandang positif oleh siswa.

Ditinjau dari kebutuhan jumlah guru, SD Fransisco Yashinta memiliki sumber daya yang cukup karena 75% guru memenuhi standar akademik sebagai tenaga pendidik. Namun kesejahteraan guru yang ditinjau dari pendapatan, masih menunjukkan standar penghasilan di bawah upah minimal regional, dari segi sosial kesejahteraan mereka terpenuhi. Tidak ada jaminan kesehatan dan rekreasi bagi guru dan keluarganya. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kesejahteraan guru di SD Fransisco Yashinta.

Tabel 5.3. Keterpenuhan parameter kesejahteraan guru di SD Fransisco Yashinta

Aspek	Parameter	Keadaan Parameter
Finansial	Gaji (dalam rupiah)	600.000 – 700.000/ bulan
	Tunjangan (dalam rupiah)	Wali kelas 20.000/bulan; Kehadiran 6.000/bulan; Ekstrakurikuler 25.000/hadir
	Total	800.000 – 950.000
Kesehatan	Askes Pribadi	Tidak ada
	Askes Keluarga	Tidak ada
Sosial	Tinggal Bersama Keluarga	Non suster
	Jarak tempat tinggal ke sekolah	Dekat
Kesempatan	Rekreasi keluarga	Tidak pernah
	Rekreasi bersama	Tidak pernah

Sumber: Tabel olahan hasil wawancara

5.2.4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan pembinaan guru di sekolah merupakan tugas Kepala Sekolah/Guru Senior dan Pengawas Sekolah. Kepala Sekolah SD Fransisco Yashinta melakukan pengawasan hanya pada aspek administrasi dan tidak pernah melakukan supervisi kelas. MacBeath & Mortimore menyebutkan bahwa salah satu indikator profesionalisme kepala sekolah adalah melakukan supervisi yang mengarah pada peningkatan pembelajaran. Ketidakhadiran kepala sekolah untuk melakukan supervisi akan mengurangi pemahaman kepala sekolah terhadap interaksi, komunikasi, dan perlakuan guru terhadap siswa di kelas. Dari sisi tersebut kepala sekolah kurang mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan Efektivitas pembelajaran. Salah satu alat pengawasan yang digunakan kepala sekolah adalah kehadiran guru di sekolah berupa daftar hadir guru yang harus diisi oleh guru pada saat tiba dan pulang dari sekolah.

Evaluasi terhadap program sekolah dilaksanakan setiap hari Sabtu dipimpin oleh kepala sekolah.

“dalam program (rapat) kita biasanya hari sabtu untuk mengevaluasi kembali perjalanan kita dalam sepekan”.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk bertukar pikiran terhadap pengalaman di kelas. Karena guru merupakan individu yang mengetahui kondisi dan perkembangan anak.

5.1.5. Budaya dan lingkungan sekolah

Pencapaian visi dan misi sekolah dipengaruhi pula oleh budaya sekolah yang berkembang di sekolah tersebut. Respon positif terhadap yang diberikan warga sekolah terhadap kondisi sekolah akan menciptakan suasana senang bagi seluruh warga sekolah. Suasana kehidupan sehari-hari SD Fransisco Yashinta menunjukkan budaya yang dibangun oleh manajemen lembaga tersebut. Kepala sekolah menanamkan kebiasaan kepada siswa untuk berbaris sebelum masuk ruang kelas. Pada kegiatan tersebut ditanamkan nilai-nilai keagamaan agar peserta didik terbiasa dengan memulai aktivitas dengan berdoa. Selain itu, pemeriksaan terhadap kerapihan pakaian juga merupakan budaya hidup sehat yang ditanamkan. Kedisiplinan diajarkan dengan melibatkan tentara.

“kecuali kita melibatkan pihak keamanan. Tentara.kami pernah minta mereka jadi inspektur upacara sebulan sekali”.

Kepala Sekolah juga menanamkan kebiasaan hidup bersih untuk anak-anak TKI yang tinggal di asrama. Anak TKI yang terbiasa hidup bebas diberikan cara hidup bersih dimulai dari diri mereka sendiri. Menurut kepala sekolah anak-anak yang baru ditampung di asrama memiliki kebiasaan yang tidak teratur,

“anak-anak diseberang, mereka dikasih pakaian mereka buang begitu saja.”.

Budaya hidup bersih dan disiplin merupakan sebagian dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak TKI di SD Fransisco Yashinta. Hasil pengamatan setiap hari Sabtu sekolah mengadakan program kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya.

5.1.6. Sarana dan prasarana sekolah

MacBeath & Mortimore menyebutkan bahwa salah satu karakteristik sekolah efektif adalah lingkungan yang kondusif, yang diindikasikan dengan adanya gedung, halaman, dan peralatan sekolah bersih dan terawat. Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang sarana dan prasana pendidikan untuk sekolah dasar adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2006 tentang Standar sarana dan Prasarana Pendidikan. Dalam ketentuan tersebut jenis prasarana yang sesuai dengan standar adalah sebagai berikut;

Jumlah ruang kelas yang dimiliki sesuai dengan rombongan belajar, dengan ketentuan satu ruang kelas tidak lebih dari 28 murid. Pada SD Fransisco Yashinta ketersediaan ruang kelas 5 ruang sementara jumlah rombongan belajar sebanyak 6 rombel, sehingga terdapat kekuarangan 1 ruang kelas. Untuk mengatasi hal tersebut kelas satu dan keals dua masuk bergantian.

Standar lainnya adalah ketersediaan ruang perpustakaan. SD Fransisco Yashinta tidak memiliki ruang perpustakaan. Sehingga aktivitas membaca siswa hanya terbatas pada saat pelajaran di kelas. Beberapa buku bacaan disimpan di lemari di dalam kelas.

Selain itu SD Fransisco Yashinta juga tidak memiliki laboratorium IPA. Pelajaran IPA yang mestinya didukung dengan berbagai praktek langsung tidak dapat dilaksanakan. Sedang lapangan olah raga yang tersedia cukup memadai namun tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti lapangan bola, lapangan volley, dan lapangan outdoor lainnya. Sehingga hanya nampak seperti halaman sekolah yang hanya digunakan untuk melaksanakan upacara dan berbaris di pagi hari. Jika ditinjau dari ketersediaan lahan berupa halaman sekolah tersebut memiliki halaman yang cukup untuk berolah raga, namun karena tidak ada fasilitas pendukung olah raga yang mestinya diajarkan dalam kurikulum seperti loncat jauh, bola volley, sepak takrow sepak bola maka sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan bakat anak.

Ruang pimpinan untuk Kepala Sekolah SD Fransisco Yashinta berukuran 9 meter persegi. Ruang tersebut seluas seperempat ruang kelas. Untuk memenuhi

ketentuan sesuai dengan standar sarana dan prasarana ruangan pimpinan minimal 12 meter persegi. Dari sisi luas ruangan, tempat kerja Kepala Sekolah tersebut tidak memadai. Demikian pula dengan ruang guru, luas ruang guru setengah dari luar ruang kelas atau 21 meter persegi. Kondisi tersebut juga tidak memenuhi standar minimal luas ruang guru 32 meter persegi.

SD Fransisco Yashinta juga memiliki sarana untuk pembinaan kerohanian siswa berupa sebuah gereja dengan luas 25 meter persegi. Kondisi bangunnya terbuat dari kayu yang tampak kokoh. Gereja tersebut dijadikan tempat kebaktian oleh guru dan murid setiap hari minggu pagi. Sementara itu jamban untuk siswa tampaknya kurang pula memadai setidaknya sekolah tersebut memiliki 4 jamban untuk siswa laki-laki dan perempuan.

Kebutuhan untuk pengembangan usaha kesehatan sekolah tersedia lebih dari memadai. Bukan hanya ruang UKS seperti yang ditentukan oleh peraturan, namun berupa klinik yang dilengkapi dengan dua buah tempat tidur dan obat-obatan. Klinik tersebut dioperasikan oleh seorang suster yang memang dilatih khusus untuk menangani kesehatan.

5.1.7. Keuangan dan pembiayaan

Manajemen sekolah yang kuat merupakan karakteristik lain dari sekolah efektif (MacBeath & Mortimore; 2001), salah satu aspek manajemen adalah pengelolaan dana pendidikan. Sekolah efektif menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana sehingga dapat memberikan informasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah atas alokasi dana yang ditetapkan dalam RAPBS dan jenis serta waktu pemanfaatannya.

Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) bersumber pada bantuan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA), sumbangan donatur, dan beasiswa khusus untuk anak-anak TKI.

“ada program untuk menunjang pendidikan gratis yaitu BOS daerah. kemarin kita dapat peranak duapuluh ribu rupiah perbulan”.

Proses penyusunan RAPBS menyesuaikan dengan sumber dana diperoleh. Untuk RAPBS yang berasal dari dana BOS disusun Rancangan Anggaran Beaya sesuai dengan jumlah dana yang akan diterima. Demikian pula untuk RAB dari sumber dana lainnya. Untuk kepentingan murid yang tinggal di asrama sepenuhnya mengandalkan sumbangan baik dari donatur maupun sumbangan dari orang tua murid, yang frekuensi dan jumlahnya sangat terbatas. Walaupun secara normal ditetapkan Rp. 200.000/orang, kenyataannya tidak bisa demikian, kadang-kadang orang tua murid tidak membayar dengan berbagai alasan seperti sulitnya mengirimkan uang dan keterbatasan ekonomi.

Pengiriman uang oleh orang tua murid hanya dilakukan bila ada orang tua murid lain menengok anaknya atau melalui jasa antar Western Union. Umumnya orangtua jarang menengok anaknya, sehingga keuangan untuk kepentingan murid di asrama sering kali ditangani secara subsidi silang.

“kadang mereka minta nomor kita, Western Union. Kadang memberinya dua atau tiga bulan. Ada yang tidak bayar sama sekali”.

Uang sekolah normalnya dipungut Rp. 35.000/murid/bulan. Sejauh ini, pembayaran uang sekolah juga tidak lancar.

Tabel 5.4. Sumber dana SD Fransisco Yashinta

Jenis Biaya	Sumber Biaya				
	APBN	APBD	Yayasan	Masyar akat	Orang Tua
1. Biaya Investasi	√	√	√	-	-
2. Biaya Operasional	√	√	-	√	√
3. Biaya Personal	√	√	-	-	√

Sumber: Data olahan hasil wawancara

5.1.8. Peran serta masyarakat dan mediasi oleh lembaga lain

Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan anak TKI merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat Nunukan sendiri.

“masyarakat ini bisa dibilang sudah menjadi bagian dari hidupnya masyarakat Nunukan adalah mengurus dan menjadi bagian dari orang TKI itu sendiri”.

Anggapan masyarakat secara psikologis tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa aturan birokrasi kedua Negara yang berbeda menyebabkan akses pendidikan untuk anak TKI memperoleh kendala administratif.

Menurut keterangan informan, lembaga swadaya masyarakat tidak ada yang melakukan mediasi maupun pengawasan terhadap pelayanan pendidikan bagi anak TKI di sekolah tersebut. Demikian pula dengan orang tua murid dan lembaga non pemerintah lainnya. Mediasi yang terjadi dengan orang tua lebih banyak dilakukan oleh sekolah melalui kunjungan Tim sekolah ke lokasi/ konsentrasi WNI di Sabah, Malaysia.

Sementara itu mediasi orang tua murid dengan warga sekolah lebih banyak terjadi melalui telepon. Kunjungan orang tua murid ke sekolah sangat langka. Beberapa murid menuturkan bahwa selama dua tahun orang tua mereka belum pernah mengunjunginya di sekolah tersebut.

Intensitas mediasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI khususnya kepada SD Fransisco Yashintan dirasa masih sangat kurang oleh pengelola sekolah.

Dengan demikian Efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI di SD Fransisco Yashinta ditinjau dari input, proses dan output pada sembilan faktor yang diteliti menunjukkan kelemahan input dari faktor ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai. Dalam hal keuangan dan pembiayaan, SD Fransisco Yashinta menunjukkan adanya ketergantungan pembiayaan dari APBN dan APBD. Sumber pendanaan SD Fransisco Yashinta dari masyarakat tidak ada, sementara pungutan dari orang tua siswa terutama yang berstatus TKI sangat rendah.

Pada aspek proses melalui manajemen pengelolaan administrasi menunjukkan Efektivitas yang baik pada SD Fransisco Yashinta yaitu adanya kelengkapan administrasi guru, program kerja sekolah, pelibatan masyarakat dalam implementasi program. Kegiatan belajar mengajar guru didukung oleh kesiapan administrasi guru dan buku sumber yang memadai.

Efektivitas sekolah ditinjau dari aspek output menunjukkan adanya peningkatan persentase penguasaan akademik siswa terhadap standar ketuntasan belajar yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran tertentu. Hasil yang dicapai SD Fransisco Yashinta 80% mencapai ketuntasan belajar.

5.2. Sekolah Dasar Nur Islam

Keberadaan SD Nur Islam sebagaimana SD Fransisco Yashinta sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara Bagian Sabah Malaysia. Sebagian besar siswa yang dilayani adalah berasal dari Sulawesi Selatan dan sebagian kecil dari Nusa Tenggara Barat. Sekolah tersebut lebih didorong oleh visi dan misi keagamaan dalam memberikan pelayanan kepada anak TKI di kabupaten Nunukan. Dari delapan faktor yang dikaji, Efektivitas pelayanan pendidikan untuk anak TKI pada sekolah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.2.1. Perencanaan program yang merupakan penjabaran visi, misi sekolah.

SD Nur Islam telah memiliki visi lembaga yaitu mewujudkan pendidikan yang unggul, bermutu tinggi dan mampu mencetak manusia yang siap memikul amanah Allah sebagai hamba dan khalifahannya.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan lembaga tersebut memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan secara terpadu dalam aspek *ruhiyah* (afektif), *aqliyah* (kognitif), dan *fikniyah* (psikomotorik) sehingga melahirkan siswa yang tangguh, bermoral dan berkembang secara optimal dengan potensi yang dimiliki; Membina dan menumbuhkan penghayatann terhadap ajaran agama Islam sumber kearifan dalam bertindak; Meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntutan agama, masyarakat dan perkembangan Iptek.

Tujuan yang ingin dicapai adalah melahirkan anak muslim yang memahami dan meyakini sekaligus mengamalkan ajaran Islam secara kaffah sesuai dengan tuntutan alquran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW; melahirkan anak yang memiliki dasar berpikir, ilmu pengetahuan, bekal hidup mandiri, prestasi akademik dan non akademik, kemampuan hafidz dan seni membaca Alquran.

MacBeath & Mortimore; CCES; menyebutkan bahwa sekolah efektif adalah semua warga sekolah memiliki komitmen untuk memahami misi utama sekolah. Namun tidak demikian dengan Kepala SD Nur Islam. Ungkapan visi dan misi sekolah hanya menjadi catatan Kepala Sekolah dan tidak tersosialisasikan kepada guru, siswa dan warga sekolah lainnya.

5.2.2. Penerapan kurikulum sekolah

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Atas dasar tersebut maka perlu dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sesuai dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Sebagai sekolah formal kegiatan belajar mengajar di SDIT Nur Islam hanya berpedoman pada buku pegangan guru dan intuisi guru. Guru kelas maupun guru bidang studi tidak memiliki dokumen kurikulum tingkat satuan pelajaran (KTSP), silabus, dan rencana pelaksanaan pengajaran. Sehingga target pembelajaran sepenuhnya sangat bergantung kepada guru.

Tabel 5.5. Struktur Kurikulum di SDIT Nur Islam

No	Kelompok Mata pelajaran	Cakupan
1	Agama dan Akhlak mulia	Tidak tersedia dokumen
2	Kewarganegaraan Dan Kepribadian	Tidak tersedia dokumen
3	Ilmu Pengetahuan dan tehnologi	Tidak tersedia dokumen
4	Estetika	Tidak tersedia dokumen
5	Jasmani , Olahraga dan kesehatan	Tidak tersedia dokumen

Sumber: Data olahan hasil wawancara

Hasil ketuntasan belajar siswa dilihat dari pencapaian nilai ujian sekolah pada tahun 2006/2007; pada lima pelajaran pokok yaitu Bahasa Indonesia 0%, Matematika 20%, Ilmu Pengetahuan Alam 0%, Pendidikan Kewarganegaraan 100%, dan Ilmu Pengetahuan Sosial 0% siswa tuntas belajar. Pada tahun ajaran tersebut siswa yang paling banyak tidak tuntas belajar adalah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial masing-masing adalah 100%.

Pada tahun 2007/2008 tingkat ketuntasan belajar terhadap mata pelajaran yang sama adalah Bahasa Indonesia 42,9%, Matematika 0%, Ilmu Pengetahuan Alam 21,4%, Pendidikan Kewarganegaraan 14,3%, Ilmu Pengetahuan Sosial 100% siswa tuntas belajar. Pada tahun ajaran tersebut siswa terbanyak tidak tuntas belajar untuk pelajaran Matematika yaitu 100%.

Dengan demikian efektivitas sekolah ditinjau dari ketuntasan belajar yaitu bahwa pembelajaran yang produktif bila keberhasilan siswa mencapai 80-85%. Tinjauan capaian akademik tahun 2006/2007 dan 2007/2008 terhadap lima mata pelajaran pokok, menunjukkan tidak ada peningkatan efektivitas dalam pelayanan pendidikan secara signifikan yang ditandai oleh tidak tercapainya ketuntasan belajar siswa pada empat pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan

Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada 2006/2007, dan Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan pada 2007/2008.

5.2.3. Tenaga pendidik yang meliputi profesionalisme guru dan kepala sekolah.

Ketersediaan tenaga pendidik dan profesionalismenya turut menentukan efektivitas sekolah (MacBeath & Mortimore; 2001). Selain kedua hal tersebut kualifikasi akademik dan kesejahteraan tenaga pendidik juga merupakan faktor yang diamati dalam penelitian ini. Paradigma modern menyebutkan bahwa kesejahteraan yang berkaitan dengan profesi bukan hanya diukur dari besarnya materi yang diperoleh sebagai upah profesi, namun menyangkut hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kesempatan mengelola keluarga, keterjangkauan lokasi pekerjaan dari tempat tinggal, kesempatan berekreasi, dan fasilitas kesehatan merupakan indikator tingkat kesejahteraan guru sebagai pekerja di sekolah.

Kualifikasi akademik atau tingkat pendidikan guru sangat menentukan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Dengan terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik diharapkan sebuah lembaga pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan secara efektif sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

SD Nur Islam dengan jumlah murid 143 orang dan jumlah guru 10 orang tampaknya telah memenuhi standar rasio jumlah guru terhadap jumlah murid 1:25. Namun jika diperhatikan dari kualifikasi akademik hanya 40% yang memenuhi kualifikasi akademik sedang 60% belum memenuhi kualifikasi tersebut. Sehingga dalam proses belajar mengajar tidak didukung oleh rencana pengajaran yang baik, misal; guru tidak menjadikan kurikulum sebagai pedoman penyusunan silabus, dan rencana pelaksanaan pengajaran juga tidak disiapkan sebelum mengajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar guru tidak menyusun rencana pembelajaran maupun penialain serta tindakan kelas. Hal ini akan menimbulkan kebosanan kelas sehingga konsentrasi belajar siswa tidak fokus. Untuk mengatasi ini siswa sering dibiarkan di luar ruangan untuk menghilangkan kebosanan.

Kualifikasi akademik tenaga pendidik SD Nur Islam menunjukkan tidak seorangpun dari guru yang bekerja di sekolah tersebut berstatus sebagai pegawai

negeri. Seluruh guru berstatus sebagai tenaga pengajar tetap yayasan. Upaya yayasan untuk meningkatkan kemampuan guru dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang menghadirkan narasumber dari Yayasan Hidayatullah pusat di Jakarta, dan narasumber lainnya. Selain itu guru dapat pula mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan jika dipanggil.

Tabel 5.6. Rekapitulasi jumlah tenaga pendidik SD Nur Islam

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Guru Kelas	6 orang
3	Guru Bahasa Indonesia	1 orang
4	Guru Bahasa Inggris	1 orang
5	Guru Matematika	1 orang
Jumlah		10 orang

Sumber: Laporan SD Nur Islam

Beberapa indikator profesionalisme guru dan kepala sekolah yang dapat tidak terpenuhi oleh kondisi tenaga pendidik di SD Nur Islam. Hal ini karena tidak ditemukannya rincian kualifikasi dan pengalaman guru terpajang di ruang guru, sering terjadi pergantian guru dalam waktu yang singkat hal ini mengindikasikan bahwa guru merasa tidak nyaman di sekolah, namun guru dipandang positif oleh siswa. Kualifikasi akademik yang tidak dipenuhi oleh mayoritas guru di sekolah tersebut menyebabkan guru tidak mampu menggunakan berbagai pendekatan mengajar sesuai dengan kebutuhan, dari hasil survey kelas menunjukkan aktivitas siswa sedang mengerjakan latihan soal tanpa dijelaskan oleh guru atau siswa bermain di luar karena bosan di dalam kelas. Demikian pula tidak adanya program sistematis yang direncanakan oleh sekolah untuk mengembangkan profesi guru.

Tabel 5.7. Keterpenuhan kesejahteraan guru di SDIT Nur Islam

Aspek	Parameter	Keadaan Parameter
Finansial	Gaji	250.000 – 500.000
	Tunjangan	Tidak ada
	Total	250.000 – 500.000
Kesehatan	Askes Pribasi	Tidak ada
	Askes Keluarga	Tidak ada
Sosial	Tinggal Bersama Keluarga	Ya
	Jarak tempat tinggal ke sekolah	Di lokasi sekolah
Kesempatan	Rekreasi keluarga	Tidak
	Rekreasi bersama	Tidak

Sumber: Data olahan hasil wawancara

5.2.4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan pembinaan akademik terhadap guru di SDIT Nur Islam tidak pernah dilakukan oleh Kepala Sekolah maupun oleh Pengawas Sekolah setempat. Pembinaan guru masih berupa wacana.

“tiap sabtu ada pembinaan, belum bisa kita wujudkan langsung karena berat betul”.

Lemahnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja guru di kelas menyebabkan tidak terdeteksinya kelemahan guru dari sisi administrasi dan pembelajaran. Perbaikan kinerja guru tidak bisa dilakukan dan peningkatan kualitas pembelajaran juga tidak menjadi perhatian.

5.2.5. Budaya dan lingkungan sekolah

Pengukuran ketercapaian visi dan misi sekolah dipengaruhi pula oleh budaya sekolah yang berkembang di sekolah tersebut. Respon positif terhadap yang diberikan warga sekolah terhadap kondisi sekolah akan menciptakan suasana senang bagi seluruh warga sekolah. Suasana kehidupan sehari-hari SD Nur Islam tidak bisa dijustifikasi dalam rangka pencapaian visi dan misi secara administratif karena visi dan misi sekolah tersebut belum tersosialisasi. Penanaman budaya berpedoman pada nilai keagamaan melalui pembinaan kerohanian.

“biasanya guru kalau pagi rohani di masjid”.

Kepala Sekolah juga menanamkan kebiasaan hidup bersih untuk anak-anak TKI yang tinggal di asrama. Namun kebiasaan hidup bersih tersebut belum nampak pada kondisi tempat tinggal siswa putera dan lingkungan kelas. Menurut kepala sekolah anak-anak yang baru ditampung di asrama memiliki kebiasaan yang tidak teratur,

“kami bikin peraturan tidak boleh keluar malam. Apalagi malam begini. Kalau tidak ijin, keluar, dihukum. Ada sanksinya. Bentuk hukumannya ada yang membersihkan parit, mencabut rumput, ada yang dibotakin.”.

Budaya hidup teratur menjadi perhatian khusus bagi anak-anak TKI di SD Nur Islam.

“kalau disini setelah pagi, siangnya perlu dididik lagi, karena kalau dibiarkan liar lagi”.

Kehidupan bebas yang biasa dijalani anak-anak TKI di perkebunan Negara bagian Sabah terbawa lekat pada diri siswa. Sekolah melakukan pembinaan lebih serius untuk mengubah perilaku siswa termasuk etika pergaulan.

5.2.6. Sarana dan prasarana sekolah

MacBeath & Mortimore menyebutkan bahwa salah satu karakteristik sekolah efektif adalah lingkungan yang kondusif, yang diindikasikan dengan adanya gedung, halaman, dan peralatan sekolah bersih dan terawat.

Ketentuan yang mengatur tentang sarana dan prasana pendidikan untuk sekolah dasar adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2006 tentang Standar sarana dan Prasarana Pendidikan. Dalam ketentuan tersebut jenis prasarana yang sesuai dengan standar adalah sebagai berikut;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, SD Nur Islam memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut;

Jumlah ruang kelas yang dimiliki sesuai dengan rombongan belajar, dengan ketentuan satu ruang kelas tidak lebih dari 28 murid. Pada SD Nur Islam ketersediaan ruang kelas 6 ruang sesuai dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 6 rombel. Namun beberapa catatan yang menyangkut isi ruangan antara lain adanya bangku-bangku pendek di ruang kelas I dan kelas II tidak dilengkapi dengan tempat duduk. Sehingga siswa kelas I dan II harus belajar sambil duduk di lantai keramik. Selain itu serambi ruangan selalu tampak kotor dan berdebu karena tidak dipasang ubin atau plaster.

Standar lainnya adalah ketersediaan ruang perpustakaan. SD Nur Islam tidak memiliki ruang perpustakaan. Sehingga aktivitas membaca siswa hanya terbatas pada saat pelajaran di kelas. Bahkan buku pelajaran yang mestinya dimiliki oleh setiap siswa tidak tersedia di dalam kelas.

Selain itu SD Nur Islam juga tidak memiliki laboratorium IPA. Pelajaran IPA yang mestinya didukung dengan berbagai praktek langsung tidak dapat dilaksanakan.

Sedang lapangan olah raga yang tersedia cukup memadai namun hanya dilengkapi dengan sepak bola. Fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan volley, dan lapangan outdoor lainnya tidak tersedia. Sehingga hanya nampak seperti halaman sekolah yang hanya digunakan untuk bermain sepak bola saja. Jika ditinjau dari ketersediaan lahan berupa halaman sekolah tersebut memiliki halaman yang cukup untuk berolah raga, namun karena tidak ada fasilitas pendukung olah raga yang mestinya diajarkan dalam kurikulum seperti loncat jauh, bola volley, sepak takraw sepak bola maka sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan bakat anak.

Ruang pimpinan untuk Kepala Sekolah SD Nur Islam berukuran 36 meter persegi. Ruang pimpinan menyatu dengan ruang guru, ruang rapat dan tersedia ruang tamu. Dari sisi luas ruangan, tempat kerja Kepala Sekolah tersebut telah sesuai dengan standar minimal luas ruang pimpinan dan guru yaitu minimal 32 meter persegi.

SD Nur Islam juga memiliki sarana untuk pembinaan kerohanian siswa berupa sebuah masjid dengan luas 64 meter persegi. Kondisi bangunnya terbuat dari

tembok yang tampak belum selesai pembangunannya. Masjid tersebut dijadikan tempat beribadah sholat lima waktu, pengajian, dan sholat malam baik untuk guru dan murid setiap hari. Sementara itu jamban untuk siswa tampaknya kurang memadai setidaknya sekolah tersebut memiliki 4 jamban untuk siswa laki-laki dan perempuan, Namun hanya tersedia 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan.

Kebutuhan untuk pengembangan usaha kesehatan sekolah tidak tersedia. Ruang UKS tidak ada demikian juga kegiatan pembinaan tentang kesehatan.

Untuk menunjang kebutuhan siswa yang berstatus sebagai anak TKI, SD Nur Islam dilengkapi dengan asrama yang terdiri dari tiga bangunan rumah pada lokasi yang berbeda. Satu rumah asrama putri luas 63 meter persegi terdiri 6 kamar dihuni oleh 50 orang siswi. Dua rumah lainnya untuk asrama putra. Satu rumah untuk siswa SMP dan lainnya untuk siswa SD. Kondisi asrama putra sangat tidak teratur. Bahkan satu kamar seperti ruangan yang tidak dihuni. Lantai di dalam dan di luar asrama tidak terawat. Tidak ada tempat siswa untuk belajar. Asrama tersebut hanya tampak sebagai ruang tempat menyimpan pakaian dan tempat ganti pakaian semata. Kondisinya sangat tidak layak untuk perkembangan mental anak didik. Hal ini disebabkan karena di setiap rumah tidak ada bapak atau ibu asuh sebagai pembina asrama. Perilaku dan perkembangan anak di dalam asrama tidak terpantau dengan baik.

5.2.7. Keuangan dan pembiayaan

Manajemen sekolah yang kuat merupakan karakteristik lain dari sekolah efektif (MacBeath & Mortimore; 2001), salah satu aspek manajemen adalah pengelolaan dana pendidikan. Sekolah efektif menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana sehingga dapat memberikan informasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah atas alokasi dana yang ditetapkan dalam RAPBS dan jenis serta waktu pemanfaatannya.

SD Nur Islam menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) jika ada tawaran untuk penerimaan subsidi saja. RAPBS tahunan tidak dibuat.

“belum ada. Kemarin satu yang buat sendiri. Yang dibuat daerah sendiri dan pusat sendiri”.

Pernyataan tersebut merupakan respon terhadap pertanyaan peneliti kepada informan apakah sekolah membuat RAPBS.

Sumber pembiayaan lain adalah dari donatur yang berasal dari masyarakat.

“ada yang beras, uang. Ada juga makanan; indomie. Minyak”.

5.2.8. Peran serta masyarakat dan mediasi oleh lembaga lain

Menurut keterangan informan, lembaga swadaya masyarakat tidak ada yang melakukan mediasi maupun pengawasan terhadap pelayanan pendidikan bagi anak TKI di sekolah tersebut. Demikian pula dengan orang tua murid dan lembaga non pemerintah lainnya. Mediasi yang terjadi dengan orang tua lebih banyak dilakukan oleh sekolah melalui kunjungan Tim sekolah ke lokasi/ konsentrasi WNI di Sabah, Malaysia. Sementara itu mediasi orang tua murid dengan warga sekolah lebih banyak terjadi melalui telepon. Kunjungan orang tua murid ke sekolah sangat langka. Beberapa murid menuturkan bahwa selama dua tahun orang tua mereka belum pernah mengunjunginya di sekolah tersebut.

“pernah LSM ke sini, dulu bilang mau antar ke sini tiga ratus anak TKI, kami tidak mampu”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa potensi peningkatan jumlah anak didik yang berasal dari anak TKI sangat besar. Potensi itu tidak dapat difasilitasi oleh SD Nur Islam karena ketersediaan sarana terbatas. Selain itu, koordinasi dengan unsur pemerintah dan masyarakat belum terbangun.

Intensitas mediasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI khususnya kepada SD Nur Islam dirasa masih sangat kurang oleh pengelola sekolah. Pengalaman Kepala Sekolah menolaoak tiga

ratus calon siswa anak TKI yang ditawarkan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat menunjukkan adanya kelemahan tersebut.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan hasil pembahasan dan analisis terhadap masalah penelitian pada bab sebelumnya maka berikut ini disampaikan kesimpulan dan saran dalam peningkatan Efektivitas sekolah untuk anak TKI khususnya pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

6.1. Simpulan

Penelitian tentang Efektivitas sekolah untuk anak TKI pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur melalui pengkajian terhadap delapan faktor sekolah efektif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas sekolah untuk anak TKI pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam ditinjau dari indikator terhadap delapan faktor yang diteliti belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya input dan lemahnya pengawasan dan manajemen. SD Fransisco Yashinta memenuhi tiga karakteristik sekolah efektif yaitu kejelasan visi dan misi, kurikulum, dan Budaya yang dibangun. Sementara itu pada SD Nur Islam tidak ditemukan adanya karakteristik sekolah efektif.
2. SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam keduanya tidak memperoleh mediasi yang baik dari pemerintah daerah maupun dari lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kondisi ini menimbulkan kebuntuan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai kendala pelayanan pendidikan untuk anak TKI yang muncul pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan pendidikan untuk anak TKI di Kabupaten Nunukan.

6.2. Saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut, kondisi sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan anak TKI di wilayah perbatasan Negara yaitu di Kabupaten Nunukan masih memerlukan peningkatan aspek input dan kualitas proses. Untuk mendukung Efektivitas sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam disarankan:

1. Revitalisasi peran SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam sebagai sekolah berasrama yang memberikan pelayanan pendidikan untuk anak TKI di wilayah perbatasan Negara sehingga dapat memperkuat akar budaya bangsa dan nasionalisme melalui pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerintah meningkatkan sarana prasarana pendukung pembelajaran, kualitas dan profesionalisme guru, kemudahan akses bagi anak TKI untuk mendapat layanan pendidikan, sistem pendanaan yang jelas, dan jaminan kelangsungan belajar siswa anak TKI.
2. Untuk meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan keagamaan dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak TKI di kabupaten Nunukan perlu dibangun mediasi yang intens antara pemerintah, pemerintah daerah, sekolah dan lembaga swadaya masyarakat sehingga dapat tercipta budaya dan manajemen yang kuat, transparansi dan akuntabilitas serta antisipasi terhadap permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Beach, L.R. (1993) *Making The Right Decision: Organizational Culture, Vision and Planning*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Beeby, C.E. (1997). *Pendidikan di Indoensia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta LP3ES
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage, London
- Chrispeels, H., Janet, (2002). Oxnard School District Partnership to Implement the Effective Schools Process. Published in Phi Delta Kaplan.
- Delors, (2001). *The Pillars of Education*, UNESCO
- Dunn, W. (1981). *Publik Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Engkoswara (1987). *Dasar Dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta:P2LPTK Jakarta.
- Ewell, P.,T. dan Lisensky, R.,P. (1988). *Assessing Institutional Effectiveness*. Washington: Concorium For The Advancement of Private Higher.
- Etzioni, A. (1985). *Organisasi Organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indoensia (UI-Press).
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3) Malang.
- Gill, John, and Johnson, Phil. (2002). *Research Methods for Managers*. London.Thousand Island. New Delhi: Sage Publiktion.
- Gorton, R.A. (1976). *School Adminstration. Challenge and Opportunity for Leadership*. Iowa: Brown Company Publishers.

- Hatch, Jo, Mary. (1997). *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspective*. Oaford University Press.
- Holdaway, E.A. dan Johnson, Neil A. (1993). *Effectiveness and Effectiveness Indicators. Dalam School effectiveness and School Improvement: An International journal of Resesarch policy and Practice*. Vol 4 No. 3, pp 165 – 1688.
- Hopkins, David, dan Reynolds, David. (2001). *School Effectiveness and School Improvement*. London: Contium.
- Indochi Anwar, M. (2003). *Adminstrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung Alfabeta.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmi Ilmu Sosial*. Universitas Indonesia.
- Jones, G.R. (1995). *Organizational Theory*. Amsterdam: Addision Wesley Publishing Company.
- Kerlinger, Fred, N, (1973). *Foundation of Behaviorial research*, Holt, Rinehalt.
- Liang Gie, T. (1983) *Unsur Unsur Administrasi*. Yogyakarta: Supersukses.
- Lubis, Hari, dan Huseini, Martani, (1987) *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*.UI.
- Luthans, F. (1981). *Organizatuional Behaviour: Third Edition*. London: McGraw hill International Book Company.
- MacBeath, John, dan Mortimore, Peter. (2001). *Improving School Effectiveness*. Open University Press.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mintzberg, H. (1993). *Structure in Fives Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.
- Moleong, Lexy J., (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nanang Fattah (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Ndraha, T./ (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, Lawrence, W. (2006). *Sixth Edition Sosial Research Methods Qualitatif and Quantitative Approaces*. Pearson International Edition.
- Nugroho. D.R. (2001). *Reinventing Indonesia: Menata Ulang manajemen pemerintahan untukn membangun Indonesia baru dengan keunggulan global*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurmantu, Safri. (2007). *Budaya Organisasi: Dari Chester I Bernard ke Michel E. Porter*. Jakarta: midada Rahma Press.
- Osborne, D. dan Gaebler, T. (2000). *Mewirusahaakan Birokrasi: Reinventing Government*. Jakarta: PPM.
- Parsons, Wayne, (2005). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktk Analissi Kebijakan*, Jakrta: Prenada Media.
- Robbins, S.P. (1993). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Aplications*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Sagala, Saiful. (2008). *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung
- Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sergiovanni, T.J dan Starratt, R.J. (1983). *Supervision Human Perspective*. New York: McGraw Hill Book Company.

Siagian, S.P. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.

Tillar, H.,A.,R. & Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta,,: Pustaka Pelajar.

Warner, Malcolm, (2003). *Culture and Manajemen in Asia*. London and New York: Rotledge Curzon.

Webster, Andrew. (1988). *Introduction to The Sociology of Development*. London: Macmillan Education.

II. SERIAL

Artikel Jurnal

Campbell, A *Cultural Identity As a Sosial Construct* , Intercultural Education, Vol. 11, No. 1, 2000

Chan, E. (2007) *Student Experiences of a Culturally-sensitive Curriculum: ethnic identity development amid conflicting stories to live by* in Journal of Curriculum Studies, VOL. 39, NO. 2, 177–194

Gleeson. J., Munnelly, J. *Developments in Citizenship Education in Ireland: context, rhetoric and reality*, paper read at International Conference on Civic Education, New Orleans, November 2003

Leavy, A. *When I Meet Them I Talk to Them: the Challenges of Diversity for Preservice Teacher Education*. Irish Educational Studies Vol. 24, No. 2 /3, September 2005, pp. 159 /177

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN

_____, (2003). *Undang Undang Republik Indoensia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas

_____, (2005). *Undang Undang Republik Indonesia Noor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas

_____, (2005), *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Naional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

_____, (2007). *Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

_____, *Effective Schools Correlates.* <http://effectiveschools.education.ucsb.edu/correlates.html>

Roebyarto, *Membangun Sekolah Efektif di Era Otonomi.* <http://roebyarto.multiply.com/journal/item/45>

Eurydice (2004) *Integrating Immigrant Children into Schools in Europe.* <http://www.eurydice.org>.

Eurydice (2005) *Citizenship Education at School in Europe 2005.* <http://www.eurydice.org>.

Lampiran I

Pedoman Wawancara Mendalam

Tentang : Efektivitas Pelayanan Pendidikan Anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

Dalam rangka mengumpulkan data dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam maka disusun pedoman wawancara mendalam seperti di bawah ini. Pedoman ini dapat berkembang sesuai dengan situasi pada saat dilakukan wawancara mendalam dengan informan.

1. Program Sekolah pada SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam dalam memberikan pendidikan untuk anak TKI.
2. Bagaimana dukungan dan manfaat yang diterima masyarakat dan lembaga lain terhadap keberadaan lembaga pendidikan yang menampung anak - anak TKI.
3. Sejauh mana sekolah memenuhi karakteristik efektivitas sekolah untuk anak TKI.

Lampiran II

Wawancara

Efektivitas Pelayanan Pendidikan Anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

A. Kepala Sekolah

Informan 1: Kepala Sekolah SD Fransisco Yashinta

Informan 2: Kepala Sekolah SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

1. Berapa jumlah anak TKI di sekolah ini?

Informan 1:

Jumlah anak TKI sekarang ada 267, seluruh siswa. Sedangkan dari TKI yang murni yang bapak-mamaknya tinggal di sana (Malaysia) ada 189. Mereka ada yang dititip di sini, ada yang dititip dengan keluarganya. Kami guru-guru di sini ada beberapa yang tamatan SMA, selesai S-1 Bahasa Inggris, ada yang D2.

Informan 2:

Kalau tanggal lahirnya insya Allah ada semua di buku induknya. Semua itu memang dari Sabah semua. 75% santri di sini dari Sabah semua. Anak TKI semua. Dan itu pun semuanya ditanggung sama Yayasan, baik makannya, tempat tidurnya, sekolahnya. Cuma orangtuanya kirim uang jajan saja. Itu tidak mesti satu bulan sekali. Semuanya, sekolahnya ditanggung Yayasan.

2. Ada LSM yang pernah datang kemari?

Informan 1:

Tidak ada. Untuk pembiayaan, biaya untuk hidup anak di sekolah ini, oleh pemerintah dianjurkan tidak ada pungutan. Karena ini sekolah swasta dan gurunya mayoritas swasta, atas kesepakatan Yayasan dan orangtua murid, siswa kenanya Rp 30 ribu per bulan. Untuk biaya sekolah. Tetapi dari Rp 30 ribu itu, hanya setengah yang bisa membayar. Kami memaklumi karena sebagian anak orangtuanya ada di seberang. Sehingga ada salah satu yang kami rasa sangat membantu yaitu beasiswa TKI. Karena dengan adanya beasiswa TKI itu kami bisa membelikan pakaian-pakaian untuk mereka bahkan juga buku-buku. Untuk biaya asrama atau yang lain, tidak. Hanya semata pakaian dan juga sepatu dan buku-buku dibagikan ke mereka masing-masing.

Untuk pengadaan buku sendiri oleh siswa kadang kesulitan menunggu kiriman dari orangtua. Kita terpaksa dengan keuangan yang ada. Makanya jika melihat pada pertanyaan itu (kuesioner), apakah itu (beasiswa untuk anak TKI) dikelola oleh sekolah atau orangtua, maka kami bilang itu dikelola oleh sekolah. Untuk orang Timur, kalau uang sudah di tangan, sampai ke anak itu susah. Saya berpengalaman dari tahun ke tahun, saya bilang kalau ini ditujukan kepada anak-anak, sebaiknya kita yang datangkan. Pengalaman dari yang sebelumnya, tahun lalu, dia bukan untuk keperluan anak-anaknya, tetapi untuk kebutuhan hidupnya. Karena semua mayoritas orang Timur di sini hidupnya bisa dikatakan hidupnya merakyat. Kalau ada bantuan seperti ini dia tidak akan gunakan untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Atas kesepakatan dalam pertemuan dengan guru, kami bisa mendatangkan buku-buku, sepatu, dan pakaian seragam itu untuk mereka. Dan juga keperluan badge untuk anak-anak perbatasan, mereka harus pakai itu. Badge dibagikan kepada anak-anak. Dan tak ada satupun orangtua menanyakan badge ini dari mana.

Informan 2:

Pernah LSM ke sini, dulu bilang mau antar ke sini 300 anak TKI, kami tidak mampu. Karena itu banyak sekali.

Dari Nunukan juga. Cuma kami tidak tahu...Waktu itu datang satu mobil. Mereka rencana mau....di sini, ada anak TKI yang siap untuk belajar. Untuk belajar kami siap tapi tempat belajarnya yang belum siap. Asramanya, kan, terbatas di sini. Jadi kalau bisa dibangun dulu asrama, bisa. Bahkan kami ditawari untuk menerima yang sudah pasang-pasangan. Kami tidak sanggup. Terutama dan yang paling utama masalah makanannya. Yang ini saja dalam satu bulan berasnya 1,5 ton. Kurang lebih 200 semua.

3. Komunikasi antara mereka (anak-anak) dengan orangtua bagaimana?

Informan 2:

Mereka lewat telepon. Sekitar 80% komunikasi via telepon. Tapi anak di asrama kami larang pegang handphone. Tahun ini sekitar sepuluh anak pindahan dari Flores ke sini karena ikut orangtuanya. Mereka sudah tahu di sini ada sekolah, anak yang biasanya dititip pada neneknya di kampung, di sekolahkan di sini. Selama ini mereka tidak tahu ada sekolah dan tempat penampungan seperti ini. Mereka kembali ke kampung bawa anak dan titip di sini karena mereka bisa lebih dekat (dari Malaysia).

Mereka juga merasa kalau dibimbing oleh nenek pendidikan tidak akan... Kadang kami ke seberang melakukan kunjungan-kunjungan, menceritakan adanya sekolah, sehingga ada yang mengirimkan anak ke sini. Kami harus berkunjung ke sana supaya bisa arahkan mereka akan pentingnya pendidikan. Kita datang ke rumah-rumah langsung, kadang tinggal dengan mereka 1-2

malam, lalu mengarahkan mereka tentang pendidikan, lalu setelah itu jalan lagi ke tempat lain.

Kami kerjasama dengan Hidayatullah. Kalau mereka jalan dan bertemu anak Kristen, mereka sampaikan pada kami. Kami juga begitu.

Informan 2:

Lewat *handphone*. Kadang-kadang orangtuanya setahun sekali ke sini.

Jarang sekali, Pak. Kecuali kalau orangtua di sana betul-betul butuh ngomong sama anaknya baru telepon. Sebulan sekali. Tanya bagaimana anak saya, mau kirim uang untuk anak saya. Baru begitu.

4. Jalan bareng?

Informan 1:

Tidak. Hanya memberitahukan. Kalau kami bertemu dengan anak muslim, kami beritahukan Hidayatullah.

Ada beberapa tempat di sana yang mereka (Hidayatullah) kelola, pendidikan paket. Dilaksanakan di sana. Tapi ujiannya dikirim dari sini. Kalau kami ada di Keningau. Ada satu saja. Tapi akhir-akhir ini dia tidak kirim laporan bulanan ke sini karena langsung dari konsul. Tapi awalnya kita rintis. Waktu itu ada perjanjian mereka mengelola sampai kelas 4. Kelas 5 dan 6 mereka kirim ke sini. Tapi karena sudah ada kerjasama dengan konsul (konsulat jenderal) dan guru-guru yang pernah dikirim ke sana. Dan ada tempat di Lahadbatu ada teman-teman di sana kita bina kerjasama, dia tetap sekolah di sana tetapi kurikulum dan buku-buku kita bantu dari sini. Buku-buku kita kirim dari sini.

Informan 2:

Konsul yang mengantar ke sini. Sudah ada yang mengantar dari sana, Sabah, ke sini. Di sana juga ada cikgu-cikgu sendiri yang dikirim dari indon, kan, sekiranya di sana sudah kelas 6 tidak bisa ujian. Kadang-kadang kelas 3 dan kelas 4 dikirim ke sini karena tidak bisa mengadakan ujian di sana.

Sekarang sudah baik. Beberapa bulan ini sering konsultasi sama konsul. Ada hikmahnya semua. Alhamdulillah sudah membaik. Kalau dulu cuma cikgunya yang dikirim ke sini. Jadi tidak ada dari Konsul. Kayaknya tidak diperhatikan. Setelah diantar dan disimpan di sini, ya sudah. Sekarang ini *alhamdulillah* dua minggu lalu Konsul datang ke sini, dia lihat semua, melihat santri, jadi bisa berbicara dan berkonsultasi langsung. Kami sangat bersyukur. Sudah datang dua kali ke sini.

5. Tapi secara diam-diam ya?

Informan 1:

Iya. Kalau kita membawa terang-terangan juga kadang susah. Kita hanya berprinsip kita ingin mendidik anak-anak kita di sana. Di sana ada sekitar empat atau lima tempat di mana ada hari dikunjungi oleh Departemen Pendidikan dan Kesetaraan.

6. Tiap berkunjung kapan?

Informan 1:

Tiap ada libur di sekolah sini. Kalau saat-saat tertentu mereka minta kita turun ke sana, kita turun ke sana.

Di sana terpaksa pakai sistem paket, padahal anak-anak sudah masuk usia sekolah. Pernah kita kirim pakaian merah putih. Di sana mereka pakai pakaian merah putih dan pramuka.

7. Mereka (anak-anak) kebanyakan pekerja?

Informan 1:

Iya, di ladang-ladang. Sayang anaknya banyak, kita maklumi tinggal di kampung-kampung. Satu tempat bisa seratusan siswa anak usia sekolah. Di satu area perkebunan. Kebanyakan anak-anak Indonesia di perkebunan, kalau Filipina di pantai, nelayan, di pesisir-pesisir.

Anak-anak yang datang dari keluarga yang berantakan. Sekitar 30% yang ditampung di sini. Kita mau tampung lagi, tapi daya tampungnya... Di sini kita ada jam sore, setelah sembahyang, masuk, kita arahkan mereka untuk masuk belajar sama-sama di sini. Pulang, makan, lalu kembali belajar di sini sampai jam setengah sepuluh, sembahyang lalu tidur lagi. Besok pagi juga begitu. Rutin.

Kita tidak punya perpustakaan.

Saat pak Amros, dari Dinas Pendidikan Kabupaten, ke sini, saya sempat ngomong, kami minta dibuatkan perpustakaan. Dari beberapa bulan lalu, dari Dinas Pendidikan, ada yang pakai mobil pintar. Datang bentang di depan sini, anak-anak datang membaca, membantu kami juga. Tetapi dengan adanya kekurangan ruangan di sini, harus sekolah pagi-sore. Sehingga dia tidak bisa ke sini.

Informan 2:

Perkebunan. Umumnya di wilayah perkebunan dan pedesaan. Jadi mereka tidak bisa menerima pelajaran. Artinya kalau mau sekolah di situ harus punya IC. Kalau di negara kita harus punya KTP. Jadi bisa mengikuti ujian negara. Tapi kalau tidak punya KTP, tidak bisa.

8. Jumlah rombongan belajar?

Informan 1:

Kelas 1 sampai 6 ada enam ruangan, tapi hanya lima ruangan (yang dipakai sebagai ruang kelas). Sehingga ada dua kelas 4 dan 5 yang masuk siang. Masuk setengah satu, pulang jam lima.

9. Ada buku-buku yang bisa dipakai siswa?

Informan 1:

Ada. Buku-buku BOS, dijadikan milik anak-anak tetapi kami simpan di sekolah. Sebagian beasiswa siswa TKI kami ambil untuk mengadakan buku.

10. Ada siswa yang setelah lulus dari sini ikut kerja di sana (Malaysia)?

Informan 1:

Ada. Setelah lulus SD, tetapi ada yang sudah tahu tulis-baca. Kalau sudah tahu mobil pengantar barang keluar-masuk, bisa (bekerja). Kalau rasa percaya dirinya sudah besar, dia sudah tahu tulis-baca, dia akan masuk. Makanya kami juga ada paket di sini, Paket A, B, C, jadinya seperti ini, dia tahu tulis dan baca, merasa sudah besar, dia masuk (kerja). Padahal kita sudah ada mesin jahit, komputer, keterampilan.

Informan 2:

Kan mereka kalau sudah tamat di sini tidak mau pulang. Tinggal di sini saja dia bilang. Cuma cuti saja kalau mau Lebaran. Setelah Lebaran datang lagi. Jadi meneruskan SMP di sini. Daripada di Malaysia pungut biji, dia bilang.

Ada dua yang telah kembali ke Malaysia, sampai di Malaysia ketemu dengan cikgunya di sana. Mau meneruskan di sini ditarik sama cikgunya, dibawa ke Mutiara Bangsa. Di Pulau Sebatik. Cikgu itu istilahnya guru.

Iya kebanyakan begitu. Meneruskan pelajarannya di sini. Selama dia di sini untuk pembinaannya sampai SMA sampai kuliah, kalau mau kuliah dikuliahkan. Bahkan sampai rumah tangga dinikahkan. Kan kami bentuk kader, jadi terus-menerus. Sampai nikah ditanggung sama Yayasan.

11. Ada upaya dari sekolah untuk menahan mereka kembali ke sana?

Informan 1:

Iya. Sehingga komputer-komputer yang ada sekarang kita gunakan untuk anak les. Di kurikulum sekolah ada pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). TIK kita ajarkan dari kelas 1.

12. Selain mesin jahit dan komputer, ada keterampilan lain yang diberikan kepada siswa?

Informan 1:

Mencetak bata. Anak asrama kita libatkan. Setelah itu pertukangan. Tapi anak-anak ini mentalnya sekolah, makanya mereka tak memiliki kemauan (untuk belajar). Maunya komputer. Kalau tukang, dia pikir kerja berat. Mesin jahit ada lima, diberikan oleh Direktorat Pendidikan komputer dari Paket A, B, C. Itu sebenarnya untuk biaya Paket. Komputer ada tujuh unit.

Masih ada yang suka ternak ayam. Ada ayam di rumah, sekolah siang untuk bisa isi waktu memelihara ayam. Kadang orangtua mereka di seberang berpikir, kan saya mengirim anak untuk sekolah bukan untuk bekerja.

Pernah kita suruh anak mencari kerikil untuk menutup lumpur di jalan. Langsung ditelepon orangtuanya, “Suster, kami mengirim anak-anak ke sana bukan untuk kerja.” Mereka tidak melihat nilai di balik itu. Padahal tanpa disadari itu bagian dari pendidikan juga. Mereka pikir pendidikan hanya bacatulis di belakang meja.

Informan 2:

Campur. Pertanian, keagamaan. Sekolah biasa juga sama dengan sekolah lain. SD dan SMP sama. Nilai tambahan kita di pesantren itu, kita *full day*, dari subuh. Ini selepas maghrib ada pelajaran sendiri sampai jam 22.

Iya kolamnya ada di belakang sana. Kebetulan saya sendiri yang menangani dan orangtuanya bersyukur. Karena ada juga yang sudah tamat dari sini, mereka ikut saya beberapa bulan, dalam bangunan bisa pasang batako, plester. Sesudah pulang orangtuanya menelepon saya berterima kasih. Anak-anaknya jadi pemborong. Pulang dari sini, pulang ke kampungnya jadi pemborong. Bahkan juga anak itu telepon saya, “Berkat bimbingan Bapak saya bisa seperti begini.” Saya bersyukur sekali karena saya sudah berarti.

13. Sebagian siswa dari NTT?

Informan 1:

Hampir 99%. Saya dari Larantuka, NTT. Ini juga kebanyakan dari keluarga Gubernur. Paling banyak.

Yang ada di asrama sini ada yang masih TK. Kedua orangtua mereka di sana, ada empat atau lima anak. Ada yang berumur 4 tahun dan 3 tahun. Sekarang yang ada di asrama 42 orang.

Ada satu anak SMP yang dikirim oleh orangtuanya di Papua ke sini, karena merasa di sana tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Sebenarnya waktu

itu sekolah di Kupang, masuk panti asuhan. Tapi karena dengan adanya ini, dia kirim ke sini.

Informan 2:

Sulawesi dan Flores. Yang banyak dari Sulawesi. Kalau di Gabriel, mayoritas anak-anaknya dari Flores karena yang banyak Nasrani, kan, orang Flores. Kalau di sini kebanyakan dari Makassar.

14. Untuk anak-anak asrama, kebutuhan akan pakaian dari mana?

Informan 1:

Pakaian itu dari orangtuanya. Tetapi karena orangtuaya tidak... maka seragam siswanya seperti ini. Anak-anak di seberang, mereka dikasih pakaian, mereka buang begitu saja. Tidak dirapikan. "Suster, pakaianku hilang." Padahal dia buang. Kebiasaan, sudah tradisi. Pakaian seragam yang kita berikan, dia buang. Kita tiap hari ajarkan, simpan-lipat. Ada yang kadang tidak pakai seragam datang. Kita lihat itu, sekolah berikan. Makanya uang beasiswa tidak kita berikan ke orangtua. Pensil saja, saya bilang, kalau 365 hari kita sekolah maka 365 pensil yang kamu pegang. Ini menjadi keluhan kami semua, guru-guru.

Ada anak usia SMA tapi masuk SD. Ada lima anak.

15. Orangtua di sana mengirim uang ke anak di sini lewat apa?

Informan 1:

Kadang mereka minta nomor kita, western union. Kadang memberinya dua atau tiga bulan.

Ada yang tidak bayar sama sekali. Ada datanya.

Ada program untuk menunjang pendidikan gratis yaitu BOS Daerah. Kemarin kita dapat per anak Rp 20 ribu. Per bulan. Tetapi untuk tahun 2009 ini keluarnya bulan Oktober. Kadang jadi problem juga berhadapan dengan orangtua anak yang berada di sini.

Informan 2:

Kebanyakan langsung ke anak. Tapi kami buat peraturan setiap anak yang punya uang harus ditiptkan ke ustad-ustadnya. Nanti tiap hari diambil. Kalau tidak begitu, habis, Pak. Enam ratus ribu dalam satu minggu bisa habis. Bapaknya ke sini, geleng kepala. Kan tidak pernah keluar, tahu kota di sini kayak apa, senang, tiap malam ke luar. Kami bikin peraturan tidak boleh ke luar malam. Apalagi malam begini. Kalau tidak izin, keluar, dihukum. Ada sanksinya. Bentuk hukumannya ada yang membersihkan parit, mencabut rumput, ada yang dibotaki.

16. Pernah undang orangtua siswa dalam waktu yang sama?

Informan 1:

Susah. Kita adakan kecuali mereka datang dan mau bertemu kita. Mereka kadang datang lewat jalan tikus karena tidak punya dokumen lengkap.

Informan 2:

Belum pernah. Cuma waktu setahun yang lalu, orangtuanya dikasih amplop semua, diberitahu untuk membayar iuran membeli kulkas untuk putri. Alhamdulillah terkumpul untuk membeli kulkas, untuk menyimpan sayuran, daging dan lain sebagainya. Tapi untuk mengumpulkan orangtuanya, tidak bisa. Mereka sibuk terus kerja. Berangkat pagi pulang sore.

17. Setiap kegiatan gereja, mereka harus ikut?

Informan 1:

Iya. Hari Senin kita periksa siapa yang hari minggu tidak ke gereja. Sedangkan yang muslim, hari Jumat, kita berikan dia kesempatan untuk pulang. Ada sepuluh anak. Ada beberapa yang orangtuanya di sana (Malaysia).

Informan 2:

Kalau di sini pagi sekolah, kemudian untuk sore habis zuhur diniyahnya, agama. Setelah ashar bermain. Kalau malam pendidikan agama lagi. Kalau di sini setelah pagi, siangnya perlu dididik lagi, karena kalau dibiarkan liar lagi.

18. Kenapa mereka tidak ke Hidayatullah?

Informan 1:

Misalnya dia dari kampung, sekolah di sana di sekolah Katolik, maka dia pindah juga ke sekolah Katolik. Mereka (anak muslim) pulang saat jumat, tapi sorenya kita wajibkan ikut kegiatan.

19. Kalau Minggu ikut kebaktian?

Informan 1:

Tidak. Itu namanya pemaksaan.

20. Apa ada kegiatan di luar sekolah?

Informan 1:

Mereka ikut di lingkungan tempat tinggal. Doa bersama.

21. Ada sanksi bagi anak yang tidak ikut kebaktian?

Informan 1:

Sanksinya pungut sampah.

22. Ada pelatihan buat guru-guru?

Informan 1:

Kalau kita diminta, kita kirim. Misalnya Dinas Pendidikan minta kita mengirim untuk ikut pelatihan, kita kirim. Habis kalau kami keluar, siapa yang mengajar? Suster selalu ada, tapi guru-guru yang lain?

Informan 2:

Ada. Biasanya guru kalau pagi rohani di masjid. Seminggu sekali. Kalau pembinaan di sini ada pelatihan. Punya Yayasan.

Kalau saya sering. Pernah ke Jakarta dua kali.

Pelatihan matematika. Terus studi banding di Bontang untuk kepala sekolah.

23. Suster nya juga ngajar?

Informan 1:

Iya. Di sini kami ada tujuh suster, empat di SD, satu di SMP, satu di TK, satu di klinik. Kita tidak punya ruangan UKS khusus, kita ada klinik, langsung ke klinik. Perawat ada satu.

Setiap pagi kita ada baris di depan kelas. Ada pengarahan misalnya menjaga kebersihan, mandi atau makan. Jam 7.15. Besok ujian semester sampai Jumat.

Mendidik anak di tempat lain lebih mudah daripada mendidik anak di sini. Di sini lebih kompleks. Karena dia datang dari mana-mana, latar belakang berbeda.

24. Ada pola pembinaan hanya oleh sekolah?

Informan 1:

Kecuali kita melibatkan pihak keamanan. Tentara. Setiap mereka ada kegiatan, mereka selalu mengundang kita. Misalnya pramuka, kemping. Kedisiplinan, semua diajarkan. Kami pernah minta mereka jadi inspektur upacara sebulan sekali.

25. Apa ada juknis atau juklak dari Pemda mengenai penanganan anak-anak TKI?

Informan 1:

Tiga tahun lalu masih ada dari Depsos. Karena itu untuk anak terlantar, tapi kita diberi bantuan untuk permakanan.

26. Untuk pola pendidikan anak?

Informan 1:

Setiap ada kegiatan, kami selalu diundang. Tapi, pengeluhan ini kami rasakan dengan Hidayatullah juga. Pengeluhannya begini: kalau dari pusat datang kami diminta membuat laporan cepat-cepat. Kesulitan apa yang kamu hadapi di lapangan? Setiap enam bulan kami berikan, tetapi realisasinya tidak ada. Dari Pemda sendiri. Kalau dari Pusat kita dapat bantuan. Kalau dari sini kita dapat bangunan ini. Kita dapat Rp 100 juta.

27. Apakah kakak kelas melakukan semacam mentoring kepada adik di bawahnya?

Informan 1:

Kalau baris-berbaris, kakak kelas atur adik-adiknya. Misalnya yang kelas 6 atur yang kelas 1 atau 2.

Di sini muatan lokal pelajaran Bahasa Inggris dan komputer. Di SD dan SMP.

28. Komunikasi di antara mereka?

Informan 1:

Bahasa Indonesia, ada yang masih jatuh-bangun. Ada yang pakai bahasa Sabah.

29. Ada anak yang sekolahnya di luar tetapi tinggal dia srama. Bagaimana dengan pembiayaannya?

Informan 1:

Mereka dibiayai orangtua mereka. Ada yang SMA dan SMP. Sekolah lebih kepada pembinaan.

“Kenapa kamu titip anak di sini?”

“Mendingan suami kita jaga sendiri saja daripada dia sendiri di sana”. Ada yang bilang, “Suster mendingan kami titip anak saja supaya masuk (sekolah) biar kami jaga suami kami sendiri karena nanti kadang-kadang ada mobil gelap di dalamnya disangka sendiri padahal ada perempuan lain.” Dan memang di perkebunan itu mau tidak mau...

Kemarin juga ada guru Indonesia yang dikirim ke sana (Malaysia) sempat datang singgah ke sini. Pulang libur karena sedang musim libur di sana. Saya tanya bagaimana di sana. Dia bilang, “Iya kita dikirim ke sana tapi satu guru, dua guru, dapat semua...istilahnya borong saja.” Semua pelajaran dan semua diborong saja tapi tidak tahu apakah itu kelas 1, 2, atau tiga. Tapi mereka juga hati-hati karena tidak boleh menyanyi Indonesia Raya, sehingga pada tanggal 28 Oktober kemarin Bupati sini menginstruksikan semua sekolah, sebelum pulang sekolah menyanyikan lagu wajib nasional. Juga adanya badge merah-putih.

Setiap senin diwajibkan upacara bendera.

Sekarang juga ada Nomor Induk Siswa Nasional. Tetapi kita terpaksa menggunakan Nomor Induk sekolah dalam ujian. Tapi tidak tahu ke depannya.

Kalau kelas 3-nya di sana dan kelas 4-nya di sini akan terjadi masalah untuk sistem ujiannya karena menggunakan nomor induk nasional mula ia kelas 1. Sehingga kami yang tahun kemarin hanya beberapa anak yang menggunakan Nomor Induk Sekolah.

Dari Flores sana belum dikeluarkan Nomor Induk Nasional, sementara di sini sudah dikeluarkan Nomor Induk Nasional. Kesulitan juga.

30. Semuanya dari Flores?

Informan 1:

Ada yang dari Flores, ada yang dari Sumba.

31. Selain dari Flores dari mana saja siswa berasal?

Informan 1:

Tanatoraja, Sulawesi ada, Bugis tidak ada.

32. Maluku?

Informan 1:

Tidak ada.

33. Ambon?

Informan 1:

Tidak ada.

Ada yang ditangani di Lahadbatu, mayoritas Bugis.

34. Luas kelas belajar di Sabah berapa?

Informan 1:

Pakai tenda. Bahasa 'kau', itu untuk kita kasar. Untuk mereka barang biasa. Guru saja dibilang 'kau'. Kemarin setelah saya tanya lagi bukan permasalahan paspor saja. Tetapi sebagai pemakai, pengedar apa semua narkotika. Itu di sana tidak ada hukuman mati. Di Keke sana. Karena istrinya juga sering pagi pulang malam, kadang sama suami tidur hilang sendiri. Sekarang suaminya tidak mau mengurusinya.

Anaknya kelas 1 SD. Yang agak parah itu, nasionalismenya yang di Krayan. Kadang-kadang anak-anak Pancasilanya tidak hafal. Mereka lebih hafal lagu Malaysia daripada Indonesia Raya.

Yang mengepalai di sini berarti dia yang menandatangani surat-surat.

35. Berarti yang di sini perwakilan yayasan juga?

Informan 1:

Ya. Perwakilannya di Balikpapan. Karena kita jauh dari Balikpapan sehingga segala sesuatu yang urusannya di sini kita tangani sepengetahuan mereka.

36. Kalau struktur organisasinya ada?

Informan 1:

Ada. Di Balikpapan. Kalau struktur ini saya tahu orang-orangnya.

Kadang-kadang kita ditanya mana Wakil Kepala sekolah, kita kadang bingung karena dalam SK-nya tidak ada. Dan pelajarannya kita tetap pelajaran induk.

37. Kalau penggajian untuk tenaga (guru) yayasannya (yang bayar)?

Informan 1:

Iya. Tapi yayasan di sini. Pengelolaanya. Hanya mengetahui yayasan. Karena untuk membiayai sendiri belum bisa sehingga yayasan belum bisa.

38. Gaji tetap atau hitung jam pelajaran?

Informan 1:

Kita lihat jam pelajaran. Awalnya kita pakai satu jam pelajaran lima ribu. Tapi melihat kebutuhan di sini, dan juga dari Dinas selalu ingatkan bagaimana gaji guru itu. Sehingga kita kasih yang paling tinggi Rp 700 ribu, paling rendah Rp 400 ribu.

39. UMR berapa di sini?

Informan 1:

Rp 750 ribu.

40. Kayak yang dibilang Suster tadi. Orangtua TKI tahunya sekolah di meja. Ha..ha..ha...

Informan 1:

Saya suruh siram bunga atau kerja kebun sedikit, “Anak kami, kan, disuruh ke sekolah, bukan disuruh untuk kerja.” Itu juga merupakan suatu pendidikan. Susah orang Timur. Orang sendiri tapi susah. Makanya mendingan bantuan beasiswa begini, susah kalau di tangan mereka.

Informan 2:

Kalau di sini *alhamdulillah* tidak begitu. Setiap orangtua yang ke sini melihat anaknya saya ajak bekerja di perkebunan dan kemudian semuanya berterima kasih dan bersyukur. Anak itu mempunyai keterampilan. Malah mereka bilang, “Tolong ya Pak Ustad anak saya dididik yang bagus-bagus biar dia

punya keterampilan. Biar kalau sudah tua punya masa depan.” Semua rata-rata orangtua begitu. Tidak ada yang bilang kenapa anak saya di sini disuruh bekerja. Saya belum pernah menemui orangtua seperti itu. Karena kebetulan saya sendiri yang menangani keterampilan, baik itu pertukangan, perkebunan kemudian dalam perikanan.



Lampiran III

Wawancara

Efektivitas Pelayanan Pendidikan Anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

B. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Informan 1: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Informan 2: Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada anak TKI di Kabupaten Nunukan? (pertanyaan tidak terekam)

Informan 1:

Yang jelas sejak 2007 sudah secara langsung ke sekolah dan ke siswa. Siswa tersebar di kecamatan-kecamatan dan konsentrasinya di empat kecamatan, yaitu Nunukan Induk, Nunukan Selatan, Sebatik Induk, dan Sebatik Barat. Dan mereka sudah menerima. Kita harapkan program itu terus berjalan. Salah satu yang menjadi realisasi dan komitmen pemerintah membuat pendidikan anak-anak TKI. *Kedua*, berkaitan dengan dua yayasan yang secara khusus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Yayasan Hidayatullah dan Yayasan Gabriel Manek, memang sejak tahun 2006 sudah menerima dukungan waktu itu pada program pendidikan kesetaraan. Kalau memang ada secara spesifik lebih jauh, baik program maupun realisasinya, tidak ada salahnya.

Informan 2:

Ada kebijakan dari Gubernur, menyetarakan sejuta. Disubsidi oleh pemerintah. Kita di PNS sudah ada tunjangan penghasilan. Di Nunukan dan Sebatik Rp 980 ribu. Itu harus minimal sejuta. Ada tambahan menurut informasi dari Provinsi itu, Kabupaten/Kota sudah dapat, tidak tahu Nunukan. Itu masa kepengurusannya. Kita kadang-kadang terlalu lambat. Dari Pemerintah Kabupaten kita ini sangat lambat kerjanya. Jadi sebagian sudah cair yang lain. Itu ada di bulan Juli-Desember. Ada tambahan Rp 300 ribu dari Pemerintah Provinsi. Konsen terutama untuk kesejahteraan guru.

Kita kalau guru PNS, datanya valid. Tapi kalau guru swasta, kalau tiba-tiba ada (pengumpulan) *database*, jumlah di sekolah berubah-ubah. Saya tidak tahu kepentingannya apa. Dari yang guru honorernya tiga tahu-tahu tujuh. Ini, kan, mengganggu. Jadi data tahun kita 1.000, tahun nanti 1.700. Begitu tidak ada pendataan, tiba-tiba 1.000 lagi. Tujuh ratus kita tidak tahu ke mana? Kadang-kadang bikin bingung.

2. Dari Pemda sendiri untuk TKI ada program khusus?

Informan 1:

Kita program TKI secara ini kita melalui Bantuan Operasional Sekolah APBD, BOSDA. Sejak tahun 2007-2008 secara gradual terus kita raih. Rasanya bencana nasional di sisi anggaran...bagaimana saya memplotkan BOSDA. Kemarin posisi kami begini. Tahun 2009 yang berjalan ini untuk SD baik negeri maupun swasta melalui BOS APBD SD-nya....SMP-nya....

Kenapa kita belum program itu karena kita lihat nanti ada duplikasi kita bingung juga. Program Pusat itu Rp 50 ribu per bulan, itu besar juga lho. Dan itu kita takut ada kondisi yang kemudian menciptakan cara berpikir kontraproduktif dengan yang dimaksud oleh pemerintah. Tidak ada program khusus kita arahkan seperti jumlah sekian ribu anak yang diprogramkan melalui bantuan Pusat dan kita mem-*push* itu tidak ada. Namun secara khusus kita ada.

Masyarakat ini bisa dibilang sudah menjadi bagian dari hidupnya masyarakat Nunukan adalah mengurus dan menjadi bagian dari orang TKI itu sendiri. Jadi pola pikir menyambung saja. Masyarakatnya lho. Misalnya anak TKI dari sebelah datang, dia masuk di SD, mungkin yang kelihatannya adalah mungkin kelebihan di sana anak kelas 5 langsung ke kelas 6 tidak bisa. Penguasaan materi khusus yang sifatnya Indonesia dia belum. Tapi sains dan hal-hal internasional dia nyambung. Tapi masyarakatnya, kalo ngomong bahasa itu masalah. Jadi dari sisi sosial, itu tidak sesuatu yang mengganjal. Tapi pada sisi akademisnya, itu yang masih.....

Kalau dari sana sudah ada tingkatan berapa, masuk ke sini dengan itu. Tapi kalau dia dari sana belum punya pendidikan, kita melalui program di dua lembaga itu di bidang PNS melalui program Paket Kesetaraan.

Dia dari sana misalnya sudah sekolah, masuk sini setelah tes penempatan bisa masuk ke kelas 3. Sementara itu Nomor Induk Siswanya belum ada, tapi kemarin itu dipecahkan oleh teman di LPMP; siswa itu dianggap baru. Jadi dia bisa masuk Nomor Induk Siswa Nasionalnya.

Tetap saja ada kendala karena di Konsul kita sekarang menerapkan aturan begini. Kalau dulu anak dari sana, kita yang minta rekomendasi dari Konsul; apa betul anak sudah belajar sesuai yang terlampir? Sekarang beda, di

balik. Dia sudah sampai di sini, diterima, Konsul baru mengeluarkan rekomendasi. Jadi orangtua itu, kebijakan Konsul itu membingungkan, menyulitkan pula.

Ini manusia yang kita urus. Manusia tanpa pena. Yang hidupnya di gunung-gunung dan kebun-kebun. Untuk bisa ke luar ke sini saja dia sudah berpikir untuk diurus orang. Bagaimana dia di sini disuruh kembali ke sana? Ini yang saya agak terganggu dengan pola pikir mereka itu. Ini yang kita urus manusia TKI, bukan manusia yang punya pendidikan. Maksud kita kalau anak itu dari sana, kalau sudah sampai Konsul keluaran recom (rekomendasi) untuk melanjutkan ke sini. Dulu begitu, sekarang dibalik.

3. Jadi pada awalnya Konsulat Jenderal mengeluarkan surat rekomendasi lalu mereka masuk sini, tetapi sekarang?

Informan 1:

Masuk dulu lalu rekomendasi dari sana. Dibalik. Sementara orangtua membawa anaknya ke sini sudah bukan gampang. Artinya jangan kita berpikir dari sisi kita. Kita berpikir dari sisi orangtua itu. Itu dari kampung langsung dibawa oleh PJTKI langsung ditempatkan di kebun. Berpuluh tahun baru pulang ke sini. Kita suruh uruskan ke segala macam. Mana dia ngerti? Ini yang kadang-kadang membuat saya agak tidak *fresh* cara berpikirnya.

4. Apakah di sini ada SM-LSM yang perhatian terhadap pendidikan?

Informan 1:

Sekarang ada satu yang namanya Serat Bangsa. Serat Bangsa ini, saya melihat, ini memang perlu kita lihat bagaimana karena itu tidak menjadi solusi, malah menimbulkan kesulitan. Tidak memecahkan masalah. Kenapa saya sebut begitu? Mereka mau melaksanakan ujian Paket sementara program itu berjalan bagaimana di sana... Saya pernah ke sana dan itu rawan sekali. Pak, tolong kita kembali melihat manusianya dulu. Bahwa manusia yang kita urus, anaknya yang kita urus, adalah orangtua yang pendidikannya rendah, hidup di lingkungan mereka yang di bawah tekanan.

Kalau orang dari sebelah, polisi takut, Pak. Tidak pernah Bapak bayangkan. Sementara kita dengan polisi biasa saja. Sementara mereka dari sebelah takut pada polisi karena bertahun-tahun mereka di sana takut dengan polisi. Anda bisa bayangkan, tidak, manusia dengan kondisi psikologis seperti itu bagaimana? Kalau begitu dengar dari Jakarta, wow, bukan main mereka merasa. Tidak tahu Jakarta manusianya seperti apa. Mereka, kan, tidak mengerti. Nah ini persoalan.

Lalu kemudian melaksanakan program, tidak dibaca SOP-nya, tapi mau melaksanakan. Kemarin saya tanya, "Sudah kau baca belum SOP-nya?" "Belum, Pak." "Bagaimana kau melaksanakan kalau SOP saja tidak kau

baca?” Ini, kan, celaka, Pak. Berarti membodohi manusia yang sudah bodoh. Saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat tidak bagus. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita kalau mau melaksanakan, mari kita laksanakan dengan niat yang baik. Kita menolong orang susah, bahwa dari situ kita dapat makan itu normal, wajar, kita manusia Tetapi jangan membodohi manusia yang sudah bodoh.

Informan 2:

LSM banyak. Kalau pendidikan ada berapa ya...nanti saya cari. Sebab kadang-kadang ada LSM yang...begitulah ada kepentingan, terlalu banyak kepentingannya. Contoh kita, kan, punya Dewan Pendidikan. Seharusnya menjadi mitra Dinas Pendidikan. Kadang-kadang merongrong Dinas Pendidikan. Seharusnya mereka men-*support*. Misalnya tidak ada dana yang bisa anu, mereka yang membahas ke DPR terus ke Pemerintah Kabupaten, kan?

Kita ini, kan, kurang dalam SDM. Seharusnya mereka *support*, mereka malah menghantam kita. Ini yang lucu.

5. LSM lokal sini?

Informan 1:

Bukan, Jakarta itu!

6. Kalau yang di sini ada?

Informan 1:

Tidak ada. Hanya mereka ini datang menggandeng LSM sini.

7. Punya cabang?

Informan 1:

Tidak ada cabang. Hanya kalau di sini saya lihat mereka menggandeng LSM-LSM yang ada di sini. Kalau Hidayatullah, kan, Yayasan. Dia memang selalu menggandeng Hidayatullah. Kasihan Hidayatullah dengan niat tulusnya mau anu, tapi kemudian ditunggangi. Tapi kita tak punya data. Kalau tidak salah itu orang UNJ. Si Arif namanya. Bukan Arif Rahman tokoh pendidikan itu.

Fokus kita kepada TKI dan anak2 TKI. Kita memang punya masalah atau katakanlah bahwa kita memahami ada masalah bahwa begitu besar anak-anak kita ada di sana dan kita belum punya pola yang jelas bagaimana mereka punya akses pendidikan. Saya diskusi dengan sekretariat Wakil Presiden, kebetulan orang Deplu. Orang Deplu bilang, “Pak, ini susah. Susahnya kalau Bapak omong tentang pendidikan, Departemen Pendidikan bisa menganggarkan duit dan membuat orang sebelah pintar. Tapi ini bukan

persoalan sesederhana itu. Ini persoalan G to G. Ini persoalan geopolitik. Sekarang Bapak berpikir sederhananya begini. Mau tidak orang Indonesia di Malaysia itu kita bikin pintar? Mau, tidak, mereka?”

Ini persoalannya. Jadi menuntaskan pendidikan bagi anak TKI, kita akui kita belum punya pola. Kalau kami pernah mengusulkan, polanya itu pola sekolah berasrama, *boarding school* bagi yang usia sekolah, di luar kita melalui pola Paket. Justru yang keluar dari sana pengiriman guru, 109 orang. Bagaimana ini? 109 guru itu di bawah naungan Humana. Makin tidak jelas, Pak.

Kalau kami, kalau mau memecahkan masalah pendidikan bagi anak TKI itu, mungkin polanya *block grant*, Pak. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan, “Kami sediakan anggarannya sekian, Kabupaten Nunukan tolong ini dikelola untuk bikin anak sebelah sekolah. Polanya atur.” Mungkin dengan begini jalan. Tapi kalau masih polanya seperti sekarang, ya kita hanya jalan-jalan saja. Jujur saya akui, kita hanya jalan-jalan saja, menghabiskan duit negara.

Bagaimana anak-anak teman-teman guru, “Pak, WC pun tidak punya, kami berak itu...kami di sana di kamp-kamp susah.” Bagaimana mau menjangkau, kita monitor waktunya terbatas. Saya bicara secara nasional. Coba Pemerintah Pusat memikirkan di semua titik perbatasan yang persoalannya sama, dipikirkan *block grant*, Pak. Percayakan kepada daerah untuk menangani. Karena persoalan ada di sini. Kalau anak-anak diusir di sini menumpuknya. Masyarakat sini yang mengurus mereka di sana. Yang tahu di mana A berada B berada. PJTKI kami ini bisa. Mereka tahu semua mereka berada di mana. “Siap, Pak, kami bantu kalau hanya bikin pendidikan bagi mereka.” Kalau ada *block grant*, kita bisa gandeng PJTKI swasta untuk mengarahkan. Tutor kita kirimkan. Kalau usia sekolah, melalui Hidayatullah dan Gabriel Manek. Dan kita bisa tambah pola *boarding school*.

Saya sejak masih di PNS, saya sudah ngomong sama Pak Najamudin, Ibu Ela, saya bilang *boarding school* dan paket. Itu saja yang memecahkan masalah pendidikan bagi anak TKI. *Boarding school* diarahkan bagi mereka yang usia sekolah. Secara sosial masyarakat Nunukan masyarakat yang akrab dengan TKI. Sebelum semua manusia bicara soal TKI, Nunukan sudah mengurus masih zaman pakai klotok-klotok.

Tetapi tidak mungkin kita tarik orang yang produktif di sana dan kebetulan buta huruf. Paketlah yang bisa membuat mereka baca-tulis. Paket untuk di sana, *boarding school* di sini.

Jadi memang kalau misalnya kita bisa melakukan bersama-sama, Pak. Tapi kita, kan, ada keterbatasan; anggaran, sumber daya, dsb. Pak Bupati pernah ngomong, “Duit yang dikasih ke sini jangan takut, kami kelola sesuai

aturan.” Kita takut penjara kok. Jadi kalau itu sifatnya *block grant* dengan juknisnya jelas, kita bisa *sharing* agar bisa nyambung, kemudian kita laksanakan monitoring teman-teman dari Pusat, jalan, Pak. Tidak sekaligus, bertahap, kita berada di jalan yang benar. Tetapi sekarang kita tidak jalan. Jadi kondisi tetap tidak terpecahkan, duit negara tiap tahun keluar. Jadi saya selalu bilang masalahnya ada di kami, tapi yang memecahkan orang lain. Tahukah kondisi yang sebenarnya? Dan ini saya bukan bicara tentang Nunukan saja, tetapi banyak persoalan di titik-titik seperti Nunukan yang mengalami hal yang sama. Betul bahwa teman-teman dari Pusat datang melihat, itu penting juga. Tapi kalau pemecahannya tetap dikelola oleh Pusat, saya melihat itu tidak memecahkan persoalan.

Kalau *block grant*...saya bilang tadi tidak sekaligus memecahkan masalah tapi sudah berada di jalan yang benar. Dua pola itu, *boarding school* dan paket. Kalau kita sepakat dengan pola itu dan menyiapkan segala hal sesuatu untuk melaksanakannya, saya kira....

Melalui PP2TKI kita punya akses mereka, kami, kan, tidak. Kalau akses TKI melalui PP2TKI dan Imigrasi. Tapi saya tahu dulu pernah tanya Kepala Disnakertrans, dia bilang baru tahun 2005-2006 tiap hari orang mengecek pass atau pergi ke sana tidak kurang dari seribu manusia setiap hari. Yang sudah di sana kalau belum ada jaminan, kan, harus mengecek pass. Itu tiap hari, tidak pernah kurang dari seribu.

8. Sejauh ini peran kedua yayasan (Hidayatullah dan Gabirel Manek) sejauh apa?

Informan 1:

Peran kedua yayasan ini dalam kondisi mereka yang terbatas saya kira sudah cukup bagus. Karena niat mereka baik dan kerja mereka *lillahi ta'ala*. Kalaupun toh yayasannya bisa semakin eksis, itu ya. Tetapi mereka tidak punya tendensi untuk menjadikan isu anak TKI sebagai lahan. Saya ikuti terus mereka. Peran mereka baik. Tapi, kan, terbatas, Pak. Bahkan Hidayatullah sudah harus buka di Sebatik. Supaya mereka mau mengentaskan persoalan pendidikan bagi anak TKI.

9. Hidayatullah buka di sana?

Informan 1;

Iya. Toh itu yayasan, tapi itu ada keterbatasan. Tapi selama ini kerjasama dengan kita cukup baik. Dan anak-anak yang ada di sana, diasramakan, maupun yang ada di masyarakat. Mereka, kan, pesantren, jadi pola pesantren berjalan. Saya kira tidak ada masalah. Tapi itu tadi, keterbatasan mereka itulah mereka melakukan yang bisa.

Data 2006-2007, itu sudah sampai 25.000-30.000 anak TKI yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

Bagi orangtua, ada yang harus berkorban. Suami di sebelah, istri di sini. Tetapi ada kondisi tertentu lainnya anak itu ditiptkan dengan keluarga termasuk Hidayatullah dan Gabriel Manek. Anak di sekolahkan diasramakan di situ, orangtua yang mendukung biayanya. Pemerintah mendukung semua itu tetapi persoalannya manusia yang punya paspor. Anak itu tidak punya paspor. Selama mereka dalam lingkungan *company*, legallah dia. Begitu dia keluar, dia tidak boleh. Bisa ditangkap. Itu persoalannya. Meskipun anak itu lahir di sana. Aturan Kerajaan, semua pekerja dianggap *single*. Oleh karena perkawinan dan mereka punya anak bukan urusan Kerajaan. Tetapi selama dia berada dilingkungan *company*, perusahaan, tidak maslaah. Tapi kalau dia keluar dari situ, bisa ditangkap. Si anak itu. Ini persoalannya. Nah ini, kan, orang tidak ngerti. Apa mengerti orang di Jakarta sana? Yang mengerti orang di sini. Jadi memecahkan masalahnya mari kita *sharing* informasi tentang ini. Ini tidak mudah.

Kami sejak tahun 2006, Hidayatullah dan Gabriel Manek di sana, kan, punya titik-titik pendidikan. Lalu kemudian mereka ke sini untuk ujian di sini. Mengeluarkan mereka tidak gampang. Itu harus nekad-nekadan, antara yang bawa masuk penjara ditangkap atau lolos. Secara aturan kita tidak boleh melaksanakan (ujian) di sana. Sebab anak itu aman dan syah jika dalam lingkungan perusahaan. Begitu ke luar, ilegal mereka.

Hanya dengan pola pendekatan kenal, seperti orang Nunukan dan TKI itu seperti ikan dengan air. Maka bagaimanapun caranya. Karena ini sama-sama butuh.

Polanya itu yang perlu kita pikirkan. Lebih mendalam daripada persoalan mengentaskan pendidikan. Kami geregetan melihat cara penyelesaian ini yang menurut kami belum menyentuh persoalan dasar. Kita mengerti saja memang namanya G to G tidak mudah, tapi mari kita kalau mau melakukan sesuatu walaupun tidak cepat tapi polanya sudah benar dulu. Polanya yang menurut kami belum ketemu.

Kalau dari sisi pendanaan bersifat *blockgrant*, kalau pola pendidikannya *boarding school* dan paket.

10. Kalau ditanya Pemerintah apakah Pemda Nunukan siap?

Informan 1:

Kita siap. Kami jelas Nunukan siap kalau dibuat *block grant*. Karena ini masyarakat kita, kok. Dan itu semua yang di sana pakai KTP Nunukan, sehingga mereka itu orang Nunukan. Sekian ratus ribu yang di sebelah itu pakai KTP Nunukan. Maka pemerintah dalam hal ini setiap permasalahan yang berkaitan dengan TKI khusus daerah Sabah, Malaysia Timur, sebenarnya itu

masalah Kabupaten Nunukan. Semua pakai KTP Nunukan karena ada kebijakan pihak Imigrasi.

Ini juga persoalan orang cari makan. PJTKI, semakin banyak orang terusir, semakin baiklah. Ngomong kasarnya begitu. Ini *off the record*, tapi inilah kondisinya.

Saya dengan teman-teman PJTKI, “Berapa, Pak?” Ini, kan, ada satgas TKI. “Berapa?” “Seribu orang.” Paling satu PJTKI cuma 20 saja. Santai sekali dia. Sebab manusia dari kampung datang, ditampung oleh PJTKI. Mereka (PJTKI) tidak punya duit. Yang menanggung semua TKI. PJTKI ini seperti pisau bermata dua. Mereka tidak ada masalah. Inilah kondisinya. Saya bilang tadi, TKI dengan masyarakat Nunukan ikan dengan air. Tetapi dari kondisi ikan-air tadi itu, kami paling mengerti soal bagaimana mengatasi apa saja yang berkaitan dengan TKI. Kalau tentang pendidikan, kita mau pola paket, mereka (PJTKI) tahu orang-orang ada di mana.

Tidak semua orang ke sana buta huruf. Ada bahkan sarjana. Saya tidak tahu apa doanya orang Malaysia setiap hari. Kalau kau sudah di sana agak sulit ke luar. Saya tidak mengerti doanya apa. Tapi yang jelas, Bapak bisa bayangkan, Bapak nonton di televisilah, luar biasa kekuatan orang itu. Orang Madura tinggal di Nunukan masih logat Madura. Tapi lima bulan dia di sebelah, berubah logat. Bisa dimakanai ini? Apakah ada orang merenungi ini secara khusus? Kuat sekali. Orang kalau sudah di sana keluarnya susah. Kalau tanpa pena, sudah sarjana, susah keluarnya. Oleh karena itu, mari kita coba pikirkan bagaimana kita membuat mereka itu paling tidak bisa merdeka.

Aneh, Pak. Orang Madura tinggal di Jakarta, sampai tiga turunan, tetap logat Madura. Tapi kalau dia sudah ke sebelah.....

Jadi kami punya PJTKI yang bisa, dan kalau urusan TKI mereka mendukung. Tinggal sekarang kita atur polanya supaya, sebagai pengusaha mereka, kan, cara makan, sebagai pemerintah kita memikirkan orang banyak. Ini bisa nyambung, bagaimana bisa saling mendukung. Pada kondisi yang sama itu tentu kita kerjasama lintas juga dengan Komjen, Imigrasi, Disnakertrans melalui PP2TKI. Kalau ini kita duduk dalam satu tim, tetapi di sini mungkin lebih efektif. Tapi kalau tim dibentuk masih di luar titiknya, saya pikir masih belum maksimal.

Kita berpikir dalam konteks pemerintah, yang saya maksud adalah kita berpikir bagaimana masyarakat kita bisa lebih baik. Tidak pada konteks kita saling menyalahkan satu sama lain. Pada konteks berpikir bahwa dengan kondisi ini, pemecahan yang dilakukan selama ini kita lihat *stuck*, mari kita carikan solusi lain. Mungkin dengan *sharing* pemikiran dan informasi ini dapat membantu juga untuk mencari solusi yang bisa memecahkan masalah. Kita gandeng PJTKI, Disnakertrans, Imigrasi, Komjen.

Lampiran IV

Wawancara

Efektivitas Pelayanan Pendidikan Anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

C. Siswa

Informan 1: Siswa SD Fransisco Yashinta

Informan 2: Siswa SD Fransisco Yashinta

Informan 3: Siswa SD Fransisco Yashinta

Informan 4: Siswa SD Fransisco Yashinta

Interviewer : Di sini dari kelas berapa?

Informan 1 : Kelas 5.

Interviewer :Bagaimana perasaan setelah sekolah di sini?

Informan 1 : Senang. Karena di sini banyak teman.

Interviewer :Sebelumnya sekolah di mana?

Di kampung, Adonara.

Interviewer :Kok bisa sampai di sini?

Informan 1 : Ikut Bapak.

Interviewer :Kan Bapak di Malaysia?

Informan 1 : Bapak pulang ke kampung dulu, baru ambil aku datang ke sini, disuruh tinggal di Nunukan.

Interviewer :Kamu tinggal di asrama?

Informan 1 : Tidak, tinggal di luar. Tinggal sama Pak RT 01, tapi sekarang sudah pindah di rumah 14. Di Kampung Jawa. Tinggal sama guru SMP 1.

Interviewer :Pelajaran apa yang kamu dapat di sini?

Informan 1 : Pelajaran Bahasa Inggris, TIK (komputer).

Interviewer :Ada pelajaran moral, misalnya bagaimana agar bersikap baik?

Informan 1 : Ada, di pelajaran PPKN.

Interviewer :Apa kamu punya keinginan, setelah lulus dari sini lalu ke Malaysia?

Informan 1 : Ada. Bapak bilang, kalau tamat dari SD pasti aku ke sana. Kalau Bapak masih mampu masih terus sekolah. Tapi kalau Bapak sudah tidak mampu...

Soalnya bapak dan mamak sudah tua.

Interviewer :Setelah lulus SD kamu ke Malaysia? Tidak mau ke SMP?

Informan 1 : Kalau Bapaknya masih mampu ya sekolah terus. Di sini. SMP-nya di SMP 1 Gabriel, di kota sana (Nunukan).

Interviewer :Cita-cita kamu apa?

Informan 1 : Polisi. Karena dari kecil suka nonton yang perang-perangan. Jadi kelihatan polisi itu tegas, suka menjalankan tugasnya.

Interviewer :Kamu nanti ke Malaysia, apa itu keinginan kamu atau orangtua?

Informan 1 : Aku maunya sekolah terus. Tapi kalau keinginan orangtua aku ke sana supaya gabung sama mereka di sana.

Interviewer :Kamu disini suka dikirim uang oleh orangtua?

Informan 1 : Suka.

Interviewer :Tiap berapa bulan?

Informan 1 : Kadang-kadang 5 bulan.

Interviewer :Orangtua suka berkunjung ke sini?

Informan 1 : Kadang-kadang. Kalau bulan 12 ini Bapak atau Mamak datang ke sini. Lihat aku.

Interviewer :Agama kamu apa?

Informan 1 : Katolik.

Interviewer :Di sini kamu belajar tentang moral, misalnya menolong teman. Apakah kamu sering mempraktikkannya?

Informan 1 : Jarang. Kadang-kadang praktik, kadang-kadang tidak.

Pernah satu kali aku ketemu teman yang digebuk. Aku bantu. Tapi habis dibantu, orang yang kena gebuk tadi malah mendorong aku, bilanganya kamu bantu aku sok pria. Kubilang aku bantu kamu bukan karena sok pria, tapi membantu aku kasihan sama kamu karena kamu digebuk. Jadi orang itu marah-marah. Pernah jumpa satu kali pas sembahyang di gereja pas orang itu sekolahnya di SD 4. Tapi namanya aku tidak tahu. Cuma menolong, tapi dia malah mendorong.

Interviewer :Di sini ada pelajaran keterampilan? Bikin prakarya misalnya?

Informan 1 : Ada. Suka menggambar. Menggambar pemandangan di pegunungan. Pakai buku gambar dan pensil warna.

Interviewer :Punya harapan pada pemerintah?

Informan 1 : Semoga pemerintah mau beri sekolah gratis atau pembayaran lebih murah lagi. Dan pemerintah bisa bantu kami untuk membaguskan sekolah. Sekarang di sini mau bangun SMP, tapi SMP belum cukup uang. Bilangnya mau dibuat tingkat, supaya di atasnya buat ditaruh buku-buku pelajaran macam perpustakaan.

Interviewer :Kamu merasa di sini mahal?

Informan 1 : Di sini satu bulan Rp 30.000.

Interviewer :Orangtua merasa kesusahan membayar itu?

Informan 1 : Susah. Sekarang pembayaran sekolah yang aku punya semester satu, yang kedua belum lunas. Uang buku juga belum.

Interviewer :Lalu bagaimana?

Informan 1 : Aku ada HP jadi aku telepon Bapak. Kubilang di sini Pak Guru suruh bayar uang buku secepat mungkin. Biar semester dua bisa belajar. Bapak bilang Bapak belum gaji. Kalau sudah gaji dikirim.

Interviewer : Sudah berapa lama sekolah di sini?

Informan 2 : Tiga tahun.

Interviewer :Berarti di sini dari kelas 1 ya?

Informan 2 : Iya.

Interviewer :Bapak-Ibumu di Malaysia. Kamu rindu mereka?

Informan 2 : Iya.

Interviewer : Kalau rindu ngapain?

Informan 2 : Telepon. Lewat HP.

Interviewer : Kamu pegang HP?

Informan 2 : Punya kakak.

Interviewer : Kamu di sini tinggal sama siapa?

Informan 2 : Nenek. Di Jalan Sutanto. Sama kakak.

Interviewer : Selama di sini dapat pelajaran apa saja?

Informan 2 : Bahasa Inggris, PPKN, Penjas.

Interviewer : Senang belajar di sini?

Informan 2 : Senang.

Interviewer : Kamu pernah dengar Bapak-Ibumu, selulus SD, menginginkan kamu meneruskan sekolah atau menyusul mereka ke sana?

Informan 2 : Pernah bilang. Tamat SD langsung SMP. SMP 1.

Interviewer : Itu keinginan kamu?

Informan 2 : Iya.

Interviewer : Apa cita-citamu?

Informan 2 : Jadi perawat.

Interviewer : Kenapa?

Informan 2 : Senang saja.

Interviewer : Perawat di rumah sakit atau di panti asuhan atau di mana?

Informan 2 : Di rumah sakit.

Interviewer : Kalau kamu di bawa ke Malaysia, kamu mau?

Informan 2 : Mau. Senang. Karena enak di sana. Bisa jalan-jalan.

Interviewer : Pernah ke sana?

Informan 2 : Pernah empat kali selama liburan. Jalan-jalan, duduk di rumah nonton, sama main.

Interviewer : Di sini tidak bisa jalan-jalan?

Informan 2 : Jalan-jalan kena marah sama nenek.

Interviewer : Di sana ada tempat wisata?

Informan 2 : Iya.

Interviewer : Suka praktik apa?

Informan 2 : Gambar pohon-pohon, rumah, orang-orang.

Interviewer : Pengin jadi pelukis?

Informan 2 : Pengin jadi dua-duanya; pelukis dan perawat.

Interviewer : Praktik sering setiap minggu?

Informan 2 : Kalau masa ujian begini, praktik-praktik ujian olahraga.

Interviewer : Di sini olahraganya apa saja?

Informan 2 : Main bola kaki, kasti, kayang.

Interviewer : Yang uang Rp 275 ribu sudah termasuk uang untuk iuran sekolah?

Informan 2 : Belum.

Interviewer : Harapan pada pemerintah?

Informan 2 : Biar uang sekolahnya dikasih turun lagi dan dibangun sekolah ini biar tambah bagus. Halamannya dikasih bagus.

Interviewer : Sudah berapa lama di sini?

Informan 3 : Informan 3: Sejak kelas 5.

Interviewer : Berarti sudah dua tahun ya. Selama sekolah dapat pelajaran apa saja?

Informan 3 : Pramuka, TIK, matematika.

Interviewer : Kamu senang pelajaran di sini?

Informan 3 : Senang.

Interviewer : Kamu tinggal di mana?

Informan 3 : Di asrama.

Interviewer : Senang tinggal di asrama?

Informan 3 : Senang. Karena banyak teman, bisa main sama-sama.

Interviewer : Kamu pernah ke Malaysia?

Informan 3 : Pernah.

Interviewer : Kamu diajak ke sana ke kebun kelapa sawit?

Informan 3 : Iya. Bantu mama pungut biji.

Interviewer : Kamu senang di sana?

Informan 3 : Senang.

Interviewer : Kok senang disana disuruh kerja bantu pungut biji sawit?

Informan 3 : Kadang-kadang aku disuruh kadang-kadang aku tidak mau.

Interviewer : Setelah lulus SD mau ngapain?

Informan 3 : SMP di sini.

Interviewer : Orangtuamu sudah memberi izin?

Informan 3 : Sudah.

Interviewer : Cita-citamu jadi apa?

Informan 3 : Suster.

Interviewer : Suster di rumah sakit atau seperti Suster Sylvia?

Informan 3 : Suster Sylvia.

Interviewer : Kenapa?

Informan 3 : Aku bisa mengajar nanti, bisa berdoa dengan suster-suster yang lain.

Interviewer : Kalau kamu diajak ibumu ke Malaysia dan tinggal di sana, kamu mau?

Informan 3 : Mau. Aku maunya di sini. Tapi kalau orangtuaku pengen aku di sana, aku ikut.

Interviewer : Kamu kangen sama orangtua?

Informan 3 : Iya.

Interviewer : Kalo kangen ngapain?

Informan 3 : Menelepon.

Interviewer : Sering?

Informan 3 : Kadang-kadang.

Interviewer : Suka bikin apa?

Informan 3 : Bikin bingkai. Gambar orang-orang kudus.

Interviewer : Kalau gambar pakai apa?

Informan 3 : Pensil, buku gambar, pensil warna.

Interviewer : Punya harapan pada pemerintah?

Informan 3 : Uang sekolah diturunkan. Sekolah kami dikasih bangun lebih besar lagi supaya bisa sekolah dengan baik.

Interviewer : Sudah berapa lama di sini?

Informan 4 : Dua tahun.

Interviewer : Berarti saat di sini kelas 2 ya?

Informan 4 : Kelas 1. Dari semester 1 aku loncat ke kelas 2.

Interviewer : Di sini dapat pelajaran apa saja?

Informan 4 : Matematika, TIK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.

Interviewer : Pelajaran apa yang kamu suka?

Informan 4 : Bahasa Indonesia.

Interviewer : Pernah diajak orangtua ke Malaysia?

Informan 4 : Pernah. Satu kali.

Interviewer : Di sana ngapain aja?

Informan 4 : Kadang-kadang aku main ataupun pergi nonton.

Interviewer : Pernah dengar setelah lulus SD akan dibawa ke Malaysia atau sekolah di sini terus?

Informan 4 : Di sini.

Interviewer : Kamu punya cita-cita?

Informan 4 : Jadi tentara. Karena tentara baik, suka menolong.

Interviewer : Suka bikin praktik apa?

Informan 4 : Buat bingkai foto.

Interviewer : Punya harapan pada pemerintah?

Informan 4 : Agar sekolah ini dikasih murah. Karena aku kan tinggal di asrama. Bayar lagi.

Interviewer : Berapa?

Informan 4 : Rp 275 ribu/bulan/orang. Kalau dua orang kakak-adik tetap satu orang Rp 275 ribu.

Interviewer : Itu biaya penginapan dna makan?

Informan 4 : Iya.

Interviewer : Sudah termasuk uang sekolah?

Informan 4 : Sudah. Yang kelas 1 dan 2 sudah lunas. Tapi yang kelas 3 belum. Dibayar saudara, tapi, sudah lunas.

Interviewer : Ada harapan lain?

Informan 4 : Agar orangtua dipulangkan di tempat semula.

Lampiran V

Wawancara

Efektivitas Pelayanan Pendidikan Anak TKI di SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam Kabupaten Nunukan

D. Guru

Informan 1: Guru Kelas 6 SD Fransisco Yashinta

Interviewer : Bagaimana pengalaman di seberang?

Informan : Tahun 1989 saya masuk. Tamat SPG mengajar sedikit di kampung saya, Flores. Tahun 1990 masih ada bagus sedikit. Tidak ada dokumen kita masih bisa jalan jauh. Walaupun ditangkap, dengan uang 5 ringgit 10 ringgit masih bisa lolos. Jadi pada waktu diperketat peraturan karena banyak pekerja masuk, di situlah kita dengan adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia, walaupun kita tidak punya dokumen paspor, kita bisa buat di Malaysia. Istilahnya pemutihan. Bukan disuruh kembali ke Indonesia dan buat di sini. Jadi kita ada kemudahan. Dengan melihat kemudahan itu karena sudah dapat paspor, bukan kesalahan dari pemerintah Malaysia tapi TKI karena menganggap remeh paspor itu, akhirnya sudah hidup, kerja di majikan tidak tetap, terpaksa harus di *cancel* karena tidak punya paspor. Melihat karena tenaga kerja yang setiap tahun bertambah, pekerjaan juga...tapi kita cari makan toh, kita harus betah di sana. Pengalaman saya itu ada yang pahitnya. Selama di sana saya punya pekerjaan yang baik semua.

Interviewer: Bapak sebagai apa?

Informan : Saya bekerja di kilang selama beberapa tahun. Lalu pindah tempat di Keke. Saya kerja di pasar. Saya bawa mobil *pick up*. Ada orang potong sapi saya ambil lalu jual di pasar. Kerja itu lama. Terus tidak betah lagi lari ke tempat lain, bekerja bom batu. Saya bekerja sebagai operator bom batu dan bor batu. Kerja sampai beberapa tahun, saya ingin kerja di wilayah kota. Kebetulan mereka cari orang untuk penjaga sekolah. Saya kerja sebagai penjaga sekolah di sana. Sekolah Cina. Bagus. Sekolah Cina berarti khusus Cina. Bahasa dan kurikulumnya Cina. Kalau yang lain seperti sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan, kita di sini SD, yang lain belajarnya ilmu Malaysia punya.

Di sana orang Indoensia bisa sekolah di sana. Banyak anak kita yang belajar di sana hingga menguasai bahasa Cina. Lama juga di situ.

Saya tinggal di tempat lain, anak-istri tinggal di tempat lain. Jadi macam tidak puas. Saat deportasi tahun 2002. Tahun 2002 saya kembali ke sini. Dan saat saya ke sini sekolah ini baru berumur jagung.

Waktu saya datang ke sini baru satu-dua orang suster di sini. Satu sebagai Kepala Sekolah TK dan satu lagi SD. Jadi yang mengajar waktu itu cuma dua guru.

Interviewer: Bapak di sini langsung jadi guru?

Informan : Guru SD sampai hari ini. Guru kelas. Dari angkatan pertama itu, saya sambut mereka di kelas 2, saya bawa terus sampai kelas 6 dan guru kelas terus.

Interviewer: Sekarang Bapak guru kelas?

Informan : Iya. Kelas 6. Saya memang tamatan SPG di Flores.

Interviewer: Angkatan terakhir ya?

Informan : Kami tamat masih dua angkatan lagi, baru berubah.

Interviewer: Selama ini Bapak sampai SPG. Ada, tidak, pengembangan yang berkaitan dengan profesionalitas sebagai guru semisal ikut penataran dan pelatihan?

Informan : Kita ikut pelatihan kalau diundang. Pemerintah di Nunukan ini lain. Sekolah swasta sulit sekali untuk mereka perhatikan. Seperti kemudahan guru untuk berkembang sulit sekali di sekolah swasta ini. Secara kebetulan jika kita punya orang dalam kita bisa diberitahu.

Interviewer: Bapak pernah punya inisiatif sendiri untuk kursus atau pelatihan?

Informan : Saya dulu pernah ikut UT, dua semester saja, tidak diteruskan. Jurusan Matematika. S-1.

Interviewer: Pernah ikut D-2?

Informan : Belum pernah coba.

Interviewer: Yang diberikan ke anak-anaknya bahan belajarnya mengacu pada buku tertentu inisiatif Bapak seperti modul atau menggunakan buku yang sudah ada?

Informan : Saya sering cocokkan buku tergantung kurikulumnya. Saya kadang-kadang2 kalau keluar KTSP ini saya harus ke KBK. Sebelum KBK ada CBSA. Saya cocokkan kira-kira mana kelemahan dan kekurangannya. Saya lihat buku lain dan cocokkan. Saya juga melihat pengalaman-pengalaman yang kita...saya tidak selalu berfokus pada buku.

Interviewer: Sekarang Bapak pegang buku dari BOS?

Informan : Iya sebagai pegangan saya untuk mengajar. Dalam penyampaian pengajaran kita punya kreativitas sendiri.

Interviewer: Siswa juga mendapat buku BOS?

Informan : Dipakai dan dibagikan. Itu hak mereka.

Interviewer: Itu dikumpulkan lagi?

Informan : Tidak. Langsung pakai. Itu memang rencananya seperti itu. Dibagi lalu pulang dikumpul. Sehingga kalau dikumpul anak di rumah belajar apa toh?

Interviewer: Tapi diakhir tahun dikumpul?

Informan : Tidak. Dia punya hak. Karena pemerintah punya perhatian. Tiap tahun tetap ada.

Interviewer: Bapak guru kelas, berarti seluruh mata pelajaran diajarkan?

Informan : Ada bidang studi lain yang diambil dari guru lain. Ada bidang studi Agama, bahasa Inggris (guru khusus), dan Penjas.

Interviewer: TIK?

Informan : Ada. Guru khusus juga. Itu kawan saya yang pegang bahasa Inggris.

Interviewer: Sepengetahuan Bapak sejauh apa kemampuan anak-anak mengenai Bahasa Inggris dan TIK yang tidak Bapak pegang sendiri?

Informan : Kalau kita melihat kemampuan anak, saya bisa membandingkan sekolah sini dengan sekolah negeri. Kalau punya potensi itu anak sini. Cuma karena kita swasta, kalau ada perlombaan kita diangkat, sehingga orang itu mengenal ke negeri itu, tapi anak sini memang punya potensi semua. Saya contohkan olimpiade matematika. Di sini mengangkat, mewakili kabupaten Nunukan ke provinsi. Kalau namanya bidang studi seperti di sini, saya pegang matematika, saya bisa bandingkan dengan sekolah lain masih angkat. Cuma kita ini swasta, diam-diam.

Interviewer: TIK itu muatan lokal?

Informan : Itu sering kami bahas masalah itu. Kok Bahasa Inggris masih mulok? Sejak tahun 2003 kita sudah ada Bahasa Inggris. Kalau sekolah lain dari kelas 4 ke atas atau 3 ke atas. Di sini dari kelas 1. Jam khusus. Per minggu sampai kelas 6. Karena masih mulok belum ada ketetapan harus berapa jam. Sekolah sendiri mengalokasikan dua jam per minggu.

Interviewer: Anak-anak bisa berbahasa Inggris?

Informan : Bisa. Saya lihat kemampuan anak-anak, satu, anak itu.... Di sana TK saja sudah bahasa Inggris, di Malaysia. Anak kita kalau bicara bahasa Inggris

logatnya sudah pas sekali. Ada datang guru juga yang punya potensi sangat tinggi, sehingga setelah tamat SMP menyebar itu mereka. Diangkat mereka, Inggrisnya angkat.

Interviewer: Ada pelajaran lain seperti mengarahkan anak untuk pada akhirnya bisa mandiri seperti keterampilan? Apakah ada pelajaran formal yang diberikan ke anak di kelas?

Informan : Belum ada. Cuma kita kembangkan mereka dari segi bakat di kepramukaan saja. Bentuknya ekstrakurikuler.

Interviewer: Selain pramuka?

Informan : Pramuka saja. Olahraga dan kesenian hari Sabtu. Itu program sekolah. Masuk kurikulum pengembangan diri. Seperti karate. Di kesenian menyanyi dengan main angklung, drumband. Kalau olahraga main voli, bola kaki. Di lingkungan sini saja. Kadang kami ke GOR.

Interviewer: Misi yang tujuannya mengembangkan kreativitas anak, keberanian, suka diselip-selipkan dalam pelajaran di kelas?

Informan : Diselipkan. Contohnya seperti di PKN dan IPS. Kita selalu mengajarkan sikap bagaimana terhadap teman, guru, dan orangtua. Apalagi terhadap pahlawan kita sendiri. Itu, kan, dalam penerapan. Kira-kira bagaimana sikapnya. Itu, kan, dalam rapor ada penilaian sendiri. Tidak diambil yang tertulis. Langsung diambil dalam penerapannya mereka. Dan saya selalu ambil sikap anak yang paling utama saat upacara. Bagaimana sikap anak saat menghormati bendera.

Interviewer: Di kelas ada diskusi dengan anak-anak yang membicarakan kondisi mereka. Sebetulnya ini, kan, problematika mereka bersama. Ada tidak di kelas bicara tentang TKI, apa itu TKI, dan harapan mereka apakah mau kembali mengikuti orangtua? Atau itu suatu hal yang rawan dibicarakan di kelas?

Informan : Tidak juga. Karena mereka tidak tersinggung disebut anak TKI. Tidak ada rasa minder. Jarang kita ada diskusi itu. Perbedaan siswa dibandingkan dengan kita yang dulu jauh. Mereka tidak pernah takut guru. Dulu dari jauh kita melihat guru saja sudah mau sembunyi. Kadang-kadang saya omong main-main, “Mungkin karena kamu minum susu binatang, otakmu...” Di sini 95% anak TKI.

Interviewer: Berkaitan dengan pendidikan sikap hidup sehat anak. Bagaimana Bapak memberikan penanaman kepada anak untuk hidup sehat, misalnya kalau mau makan cuci tangan, baju jangan dilempar saja biar tidak mengundang nyamuk?

Informan : Saya sering, apalagi kalau di kelas ada anak pakai pakaian tidak disetrika, atau sebelum masuk kelas main, saya selalu tegur agar bagaimana menjaga kesehatan.

Interviewer:Sebagian anak tidak tinggal di asrama. Apakah di sini diingatkan misalnya siapa yang mandi berapa kali sehari?

Informan : Ada. Dalam kelas kalau ada anak yang belum mandi saya langsung tahu. Saya tegur. Kalau saya tegur secara pribadi, dia tidak malu dengan teman-teman. Kalau di depan teman-teman dia malu. Besoknya dia mulai berubah. Termasuk pakaian rapi. Kalau tidak memasukkan baju, saya suruh masukkan di depan (kelas). Saya buat seperti itu supaya anak itu ada tanggung jawabnya.

Interviewer: Ada piket di kelas? Kegiatannya apa?

Informan : Ada. Pagi setelah datang sapu kelas. Bersihkan kelas. Siram tanaman. Lalu siapkan air untuk guru cuci tangan. Ada beberapa kita tugaskan piket kantor. Membantu guru piket.

Interviewer: Berapa anak yang piket dalam sehari?

Informan : Karena satu minggu jadi dihitung jumlah siswa kalau seperti di kelas 6 ada yang bisa delapan orang satu hari.

Interviewer: Pembagian tugasnya?

Informan : Ditentukan oleh koordinatornya. Khusus ada seksi kebersihan. Sebelum bersih tidak boleh pulang. Saya buat seperti itu.

Interviewer: Tujuannya?

Informan : Supaya mereka punya rasa tanggung jawab. Kalau di sekolah mereka buat seperti itu, di rumah juga. Apalagi di masyarakat.

Interviewer: Ada program khusus mengingat kebanyakan siswa di sini kebanyakan anak TKI atau berjalan seperti sekolah-sekolah umum yang lain?

Informan : Seperti sekolah umum yang lain.

Interviewer: Kalau di sekolah seberang tidak boleh nyanyi lagu Indonesia Raya?

Informan : Mungkin dulu. Tapi sekarang ada sekolah Indonesia di sana. Dulu sekolah Indonesia jarang di sana. Berlaku baru kemarin.

Interviewer: Di sini ada muatan-muatan di luar pelajaran PKN, usaha-usaha Bapak menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air?

Informan : Ada. Lagu kebangsaan kita, anak ini, kan, jarang tahu. Pulang sekolah saya suruh nyanyi lagu wajib satu-dua lagu. Yang memimpin anak-anak. Dan kita sama-sama nyanyi. Apa saja lagu wajib. Tiap hari. Itu untuk menanamkan mereka sikap nasionalisme.

Interviewer: Ada anak yang mengikuti olimpiade matematika. Ada pembinaan khusus dari Bapak?

Informan : Secara khusus dibina, tidak. Saya lihat anak itu kemampuan. Saat pemilihan anak ya saya pilih.

Interviewer: Diseleksi di sini?

Informan : Iya.

Interviewer: Setelah tahu ada potensi, sekarang ada langkah-langkah membina anak agar lebih berprestasi?

Informan : Kepala Sekolah mengambil langkah supaya anak tetap berkembang dari bawah sampai kelas 6, dia harus dengan guru bidang studi. Seumpama saya menangani matematika dari kelas ini sampai kelas 6. Itu, kan, satu guru saja. Sehingga perkembangan anak dari bawah ke atas dapat dipantau. Sekarang berjalan. IPA, juga bidang studi yang sering diperlombakan. Satu guru saja. Dan dengan masing-masing jurusan. Itu langkah yang kami tempuh seperti itu saja.

Interviewer: Ada pelajaran di luar jam belajar yang khusus, seperti anak yang mau ikut lomba, di *treatment* lagi?

Informan : Ada. Umpama sudah dapat program pemerintah ada program seperti ini, secara khusus ambil waktu di luar jam pelajaran. Sore-sore. Sebelum dapat itu, biasa belajarnya.

Interviewer: Pelajaran Teknologi Informasi yang diberikan seputar apa?

Informan : Komputer. Langsung ke ruang komputer. Karena itu jamnya hanya satu jam, jadi guru saya lihat dia punya pembagian dihitung berapa banyak komputer, satu kali dia bawa ke sana berapa orang, minggu depan berapa. Bergantian. Kalau satu kali saja tidak bisa.

Interviewer: Tiap anak harus memegang (komputer)?

Informan : Iya harus.

Interviewer: Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan komputer?

Informan : Ada. Dipercayakan kepada guru TIK. Guru lain tidak memberikan tugas yang harus pakai komputer.

Interviewer: Dari segi sarana-prasarana di sekolah ini, pendapat Bapak bagaimana?

Informan : Kita sangat kekurangan. Terlebih sarana atau alat peraga yang dibutuhkan dalam kelas, sulit sekali.

Interviewer: Sarana alat peraga apa yang ada?

Informan : Kita IPA kita punya. Di bidang IPS, ada globe, peta. Kita hanya punya peta Kalimantan Timur saja. Tidak punya peta (Pulau) Kalimantan. Tidak terjual di sini.

Interviewer: Pernah mengusulkan itu? Ke mana?

Informan : Pernah. Kadang-kadang disampaikan ke Kepala Sekolah. Kepala Sekolah berusaha, tapi tidak dapat. Banyak kekurangan. Seperti matematika sendiri. Perlu alat peraga.

Interviewer: Punya alat peraga seperti kubus?

Informan : Belum.

Interviewer: Usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi sarana itu bentuknya seperti apa? Usaha untuk membeli sendiri ada?

Informan : Ada. Cuma dicari tapi...paling-paling cabang yayasan ini, kan, ada di Jakarta, jadi sering minta dari sana. Kalau dari Diknas, kebetulan kita ada orang dalam, jadi kalau ada kelebihan, mereka...

Interviewer: Setahu Bapak biaya operasional sekolah ini dari mana saja?

Informan : Kebanyakan dari pemerintah.

Interviewer: Dari yayasan?

Informan : Ada. Dari Larantuka, Flores. Pusatnya di sana.

Interviewer: Jadi ada pendanaan yang di-*drop* dari sana?

Informan : Ada.

Interviewer: Pernah mengundang orangtua siswa untuk bertemu dengan pihak sekolah?

Informan : Tiap penerimaan rapor harus rapat umum.

Interviewer: Apa yang disampaikan selain menyampaikan rapor?

Informan : Kita sampaikan kira-kira kebutuhan sekolah apa, supaya ada kesepakatan. Jangan sampai kita menyampaikan surat, nanti mereka tidak setuju. Jadi kita undang secara khusus, orangtua harus hadir. Setelah kita bicarakan hal yang penting menyangkut kepentingan sekolah, hubungan kerja antara orangtua murid dengan guru, selesai rapor baru dibagi.

Interviewer: Selama ini ada kontribusi orangtua kepada sekolah?

Informan : Tidak ada. Kebanyakan siswa orang Timur juga.

Interviewer: Kebanyakan orangtua tinggal di sana ya?

Informan : Iya.

Interviewer: Kalau di sini mereka tinggal dengan saudara-saudaranya?

Informan : Iya, keluarga-keluarga yang menetap di sini. Yang tidak punya tempat terpaksa harus tinggal di asrama.

Interviewer: Di asrama berapa orang?

Informan : Sekitar 50-an mungkin, dari TK sampai SMA. Kalau SMA sekolah di luar. SMP ada yang sekolah di sini dan di luar.

Interviewer: Anak SMA sekolah di luar. Yang membiayai siapa?

Informan : Orangnya. Dia ikut tinggal di sini, makannya harus bayar. Tempat tinggalnya tidak bayar. Makannya dalam satu bulan Rp 200 ribu.

Interviewer: Tadi media pembelajaran kurang. Apalagi?

Informan : Sarana olahraga.

Interviewer: Lapangan ini dipakai untuk apa saja?

Informan : Sembarangan saja. Kalau mau kegiatan apa semua di situ.

Lampiran VI

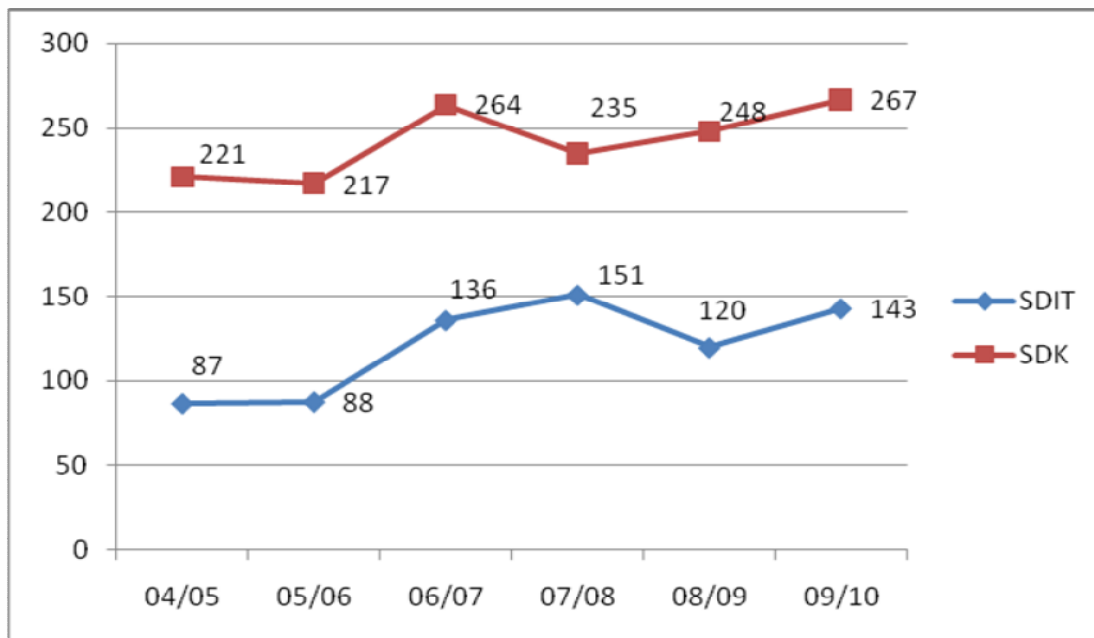
Tabel Kualifikasi Akademik Guru SD Fransisco Yashinta dan SD Nur Islam

tahun 2009/2010

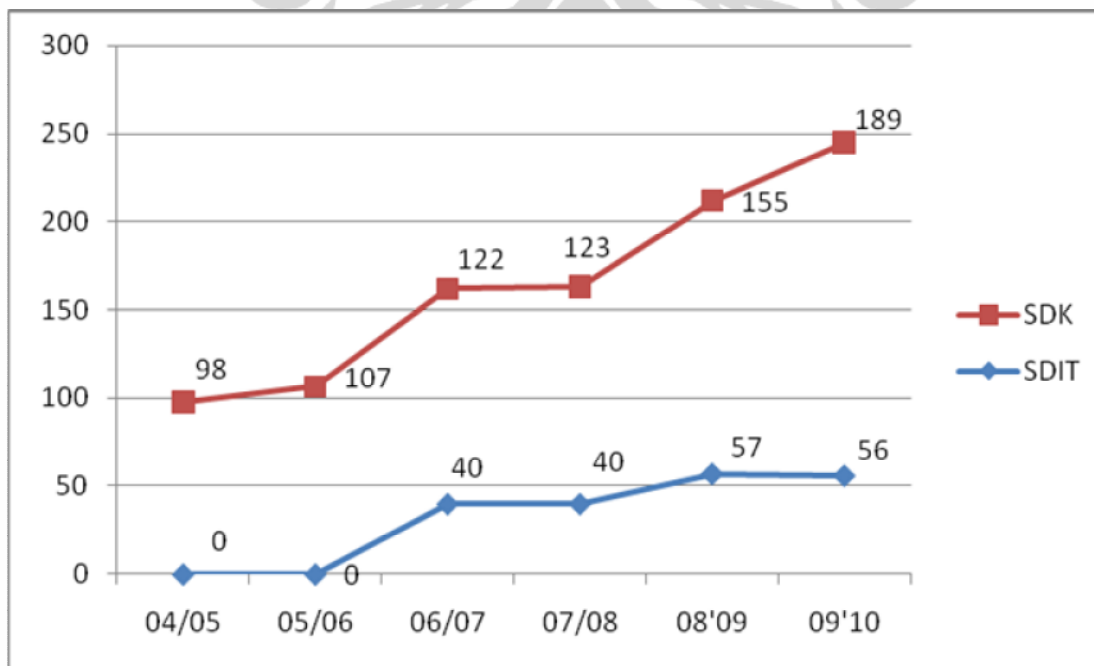
Kualifikasi Akademik	Frekuensi						
	SD Fransisco Yashinta			SD Nur Islam			
	L	P	Jml.	L	P	Jml.	
S3	-	-	-	-	-	-	
S2	-	-	-	-	-	-	
S1	8	12	20	4	1	5	
D3	-	-	-	1	-	1	
D2	1	3	4	3	-	3	
D1	-	-	-	-	-	-	
SLTA	2	4	6	3	1	7	
Jumlah	11	19	30	13	2	16	

Lampiran VII

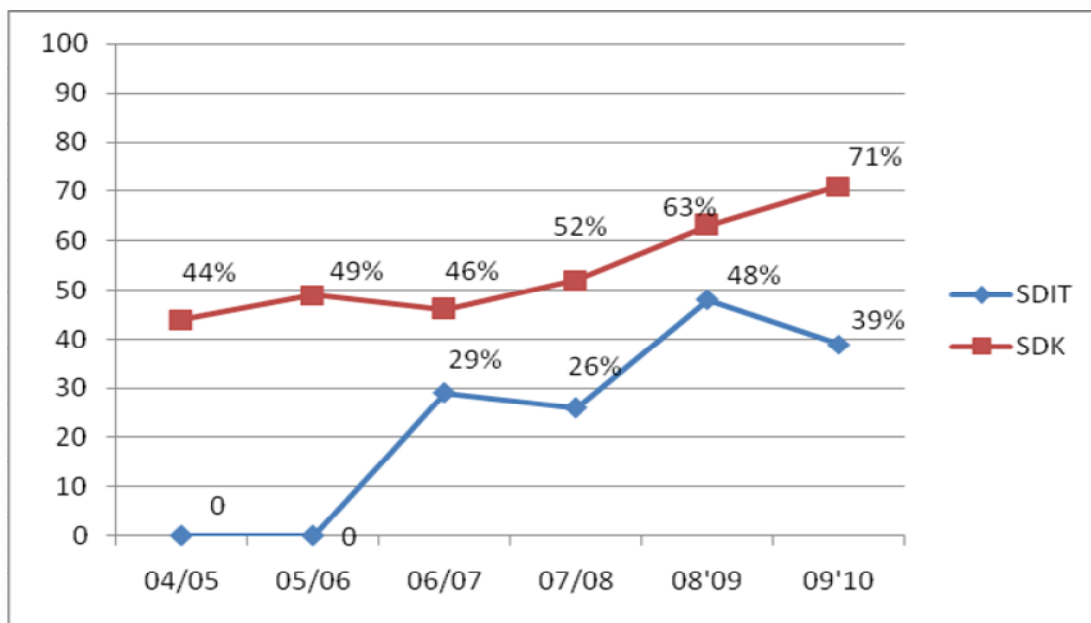
Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Siswa tahun 2004/2005 – 2009/2010



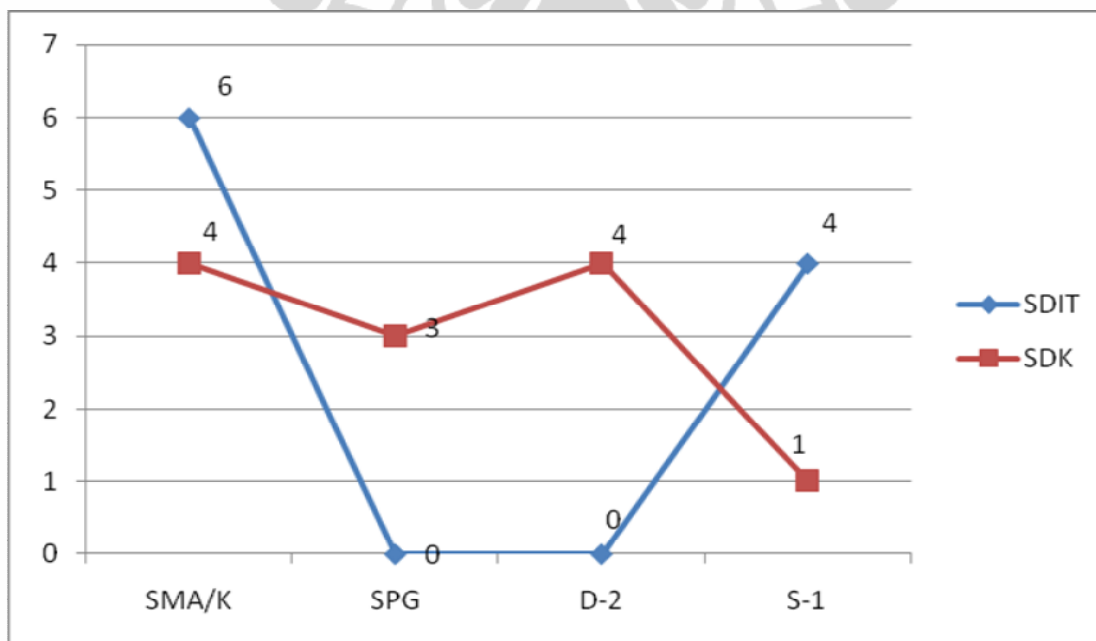
Gambar 2. Grafik Jumlah Siswa (berstatus) Anak TKI



Gambar 3. Grafik Persentase Jumlah Siswa Anak TKI Terhadap Jumlah Siswa Keseluruhan



Gambar 4. Grafik Perbandingan Kualifikasi Akademik Guru



Lampiran VIII

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2007 TANGGAL 23 Mei 2007

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. PERENCANAAN PROGRAM

1. Visi Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.
- b. Visi sekolah/madrasah:
 - 1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
 - 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 - 3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
 - 4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
 - 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 - 6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya.
- b. Misi sekolah/madrasah:
 - 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 - 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
 - 3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
 - 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu

- lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
- 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;
 - 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
 - 7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
 - 8) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
 - 9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya.
- b. Tujuan sekolah/madrasah:
 - 1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
 - 2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - 3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;
 - 4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
 - 5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

4. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah membuat:
 - 1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;
 - 2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah
- b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:
 - 1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada

- sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;
- 2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait;
- c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
 - d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
 - e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - 1) kesiswaan;
 - 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - 4) sarana dan prasarana;
 - 5) keuangan dan pembiayaan;
 - 6) budaya dan lingkungan sekolah;
 - 7) peranserta masyarakat dan kemitraan;
 - 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

1. Pedoman Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
- b. Perumusan pedoman sekolah/madrasah:
 - 1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah;
 - 2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- c. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:
 - 1) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - 2) kalender pendidikan akademik;
 - 3) struktur organisasi sekolah/madrasah;
 - 4) pembagian tugas di antara guru;
 - 5) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - 6) peraturan akademik;
 - 7) tata tertib sekolah/madrasah;
 - 8) kode etik sekolah/madrasah;
 - 9) biaya operasional sekolah/madrasah.

- d. Pedoman sekolah/madrasah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.
- e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

2. Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah

- a. Struktur organisasi sekolah/madrasah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.
- c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah/madrasah:
 - 1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;
 - 2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah;
 - 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah

- a. Kegiatan sekolah/madrasah:
 - 1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan;
 - 2) dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.
- b. Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- c. Kepala sekolah/ madrasah mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non- akademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

4. Bidang Kesiswaan

- a. Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:
 - 1) Kriteria calon peserta didik:
 - a) SD/MI berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dan pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog;

- b) SDLB/SMPLB/SMALB berasal dari peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sensorik, dan/atau sosial;
 - c) SMP/MTs berasal dan lulusan SD, MI, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
 - d) SMA/SMK, MA/MAK berasal dan anggota masyarakat yang telah lulus dari SMP/MTs, Paket B atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.
- 2) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan:
- a) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah;
 - b) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTs, penerima subsidi dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c) berdasar kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK;
 - d) sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah.
- 3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.
- b. Sekolah/Madrasah:
- 1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik;
 - 2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kurikuler untuk para peserta didik;
 - 3) melakukan pembinaan prestasi unggulan;
 - 4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

- a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
- 1) Sekolah/Madrasah menyusun KTSP.
 - 2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya.
 - 3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
 - 4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP.
 - 5) Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.
 - 6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.

- 7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.
 - 8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.
 - 9) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- b. Kalender Pendidikan
- 1) Sekolah/Madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
 - 2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik didasarkan pada Standar Isi;
 - a) berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah/madrasah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - b) diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah
 - 3) Sekolah/Madrasah menyusun jadwal penyusunan KTSP.
 - 4) Sekolah/Madrasah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.
- c. Program Pembelajaran
- 1) Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.
 - 2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.
 - 3) Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan dengan:
 - a) model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses;
 - b) melibatkan peserta didik secara aktif demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
 - c) tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi;
 - d) pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif

dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.

- 4) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:
 - a) meningkat rasa ingin tahunya;
 - b) mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - c) memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi;
 - d) mengolah informasi menjadi pengetahuan;
 - e) menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;
 - f) mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan
 - g) mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 5) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.
- 6) Kepala SD/MI/SDLB/SMPLB/SMALB, wakil kepala SMP/MTs, dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.
- 7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:
 - a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir;
 - b) menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran;
 - c) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien;
 - d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dan yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;
 - e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya;
 - f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

- 1) Sekolah/Madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang

berkeadilan, bertanggungjawab dan berkesinambungan.

- 2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan.
- 3) Sekolah/Madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan,
- 4) laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi.
- 5) Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru.
- 6) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan pengujian eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 7) Sekolah/Madrasah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan.
- 8) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai.
- 9) Sekolah/Madrasah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.
- 10) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan.
- 11) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 12) Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.
- 13) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala.
- 14) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian.
- 15) Sekolah/Madrasah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah/madrasah, dan institusi di atasnya.

e. Peraturan Akademik

- 1) Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik.
- 2) Peraturan Akademik berisi:
 - a) persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru;
 - b) ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan;
 - c) ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan

- fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan;
- d) ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
- 3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Sekolah/Madrasah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan:
 - 1) disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.
- c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
- d. Sekolah/Madrasah perlu mendukung upaya:
 - 1) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme;
 - 2) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah/madrasah;
 - 3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas;
 - 4) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.
- e. Sekolah/madrasah mendayagunakan:
 - 1) kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah;
 - 2) wakil kepala SMP/MTs melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah;
 - 3) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola bidang kurikulum;

- 4) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola sarana prasarana;
- 5) wakil kepala SMA/SMK, MA/MAK bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola peserta didik;
- 6) wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala sekolah/madrasah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 7) guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasi potensi kemanusiaannya secara optimum;
- 8) konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik;
- 9) pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan;
- 10) tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan;
- 11) tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;
- 12) teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran;
- 13) tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif;
- 14) tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:
 - 1) merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan;
 - 3) melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah;
 - 4) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai

- dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat;
- 5) pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.
- c. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
 - d. Pengelolaan sarana prasarana sekolah/madrasah:
 - 1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana;
 - 2) dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.
 - e. Pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah perlu:
 - 1) menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;
 - 2) merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik;
 - 3) membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja;
 - 4) melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal;
 - 5) menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah lain baik negeri maupun swasta.
 - f. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.
 - g. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

- a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.
- b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah mengatur:
 - c. sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;
 - d. penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional;
 - 1) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
 - 2) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.
- e. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala

sekolah/madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.

- f. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
- b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan:
- 1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan;
 - 2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya;
 - 3) diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dalam rapat dewan pendidik.
- c. Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:
- 1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah/madrasah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.
- d. Tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah dan peserta didik.
- e. Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang memuat norma tentang:
- 1) hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan masyarakat;
 - 2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar.
- f. Kode etik sekolah/madrasah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah/ madrasah untuk menegakkan etika sekolah/ madrasah.
- g. Sekolah/Madrasah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolah/madrasah.
- h. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk:
- 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - 2) pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - 3) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman;
- i. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama;
- j. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara; serta

- k. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah/madrasah.
- l. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.
- m. Kode etik sekolah/madrasah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk:
 - 1) menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah/madrasah dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik;
 - 2) memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik;
 - 3) memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang;
 - 4) melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
- n. Kode etik sekolah/madrasah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

10. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
- b. Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
- c. Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.
- d. Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- e. Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
- f. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.
- g. Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTS/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.
- h. Kemitraan SMP/MTS/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry.
- i. Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK, atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta

- dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.
- j. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Program Pengawasan

- a. Sekolah/Madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- b. Penyusunan program pengawasan di sekolah/madrasah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.
- c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
- f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.
- g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali peserta didik.
- h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dan tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/madrasah kepala sekolah/madrasah secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.
- i. Kepala sekolah/madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait.
- k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada madrasah terkait.
- l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka

meningkatkan mutu sekolah/madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.

- m. Sekolah/Madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

2. Evaluasi Diri

- a. Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah.
- b. Sekolah/Madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Sekolah/Madrasah melaksanakan:
 - 1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;
 - 2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
- d. Evaluasi diri sekolah/madrasah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sah.

3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara:

- a. Komprehensif dan fleksibel dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
- b. berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan maupun perubahan sosial;
- c. integrative dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;
- d. menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah/madrasah, pemakai lulusan, dan alumni.

4. Evaluasi, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

5. Akreditasi Sekolah/Madrasah

- a. Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
- c. Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Kepala SMP/MTS/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.
4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industry. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah/madrasah.
5. Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah/madrasah.
6. Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.
7. Kepala sekolah/madrasah:
 - a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
 - b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 - c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah;
 - d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 - e. bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;
 - f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;
 - g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua

- peserta didik dan masyarakat;
- h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 - i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
 - j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
 - k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;
 - l. meningkatkan mutu pendidikan;
 - m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;
 - o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
 - p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
 - q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
 - r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
8. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai dengan bidangnya.

E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sekolah/Madrasah:
 - a. mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;
 - c. menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani informasi atau pengaduan dari sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
 - d. melaporkan atau informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah

dilaksanakan secara efisien dan efektif.

F. PENILAIAN KHUSUS

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.



